



UNIVERSITAS INDONESIA

**PELIBATAN RUSIA DALAM KERANGKA KERJASAMA
KEAMANAN DI KAWASAN ASIA TIMUR**

TESIS

R. DE ARCHELLIE

1006743752

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

JAKARTA

JUNI 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

**PELIBATAN RUSIA DALAM KERANGKA KERJASAMA
KEAMANAN DI KAWASAN ASIA TIMUR**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains
Dalam Bidang Ilmu hubungan Internasional**

R. DE ARCHELLIE

1006743752

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
JAKARTA
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : R. de Archellie

NPM : 1006743752

Tanda Tangan : 

Tanggal : 11 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : R. de Archellie

NPM : 1006743752

Program Studi : Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional

Judul Tesis : Pelibatan Rusia dalam Kerangka Kerjasama Keamanan di Kawasan Asia Timur

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Makmur Keliat

(.....)

Sekretaris : Asra Virgianita, M.A.

(.....)

Pembimbing : Dr. Hariyadi Wirawan

(.....)

Penguji Ahli : Broto Wardoyo, M.A.

(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 27 Juni 2012

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R. de Archellie
NPM : 1006743752
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional
Departemen : Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pelibatan Rusia dalam Kerangka Kerjasama Keamanan di Kawasan Asia Timur

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cita.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Juni 2012

Yang menyatakan



(R. de Archellie)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat kesehatan, kehidupan, dan kesempatan dalam merampungkan tesis dengan judul *Pelibatan Rusia dalam Kerangka Kerjasama Keamanan di Kawasan Asia Timur*. Dinamika keamanan di kawasan Asia Timur menjadi topik pembahasan menarik setelah berakhirnya Perang Dingin. Beberapa peneliti memusatkan perhatiannya pada pembentukan komunitas Asia Timur dan faktor-faktor pendorong dan tantangannya. Penulis mengambil sudut pandang berbeda dalam meneliti dinamika keamanan kawasan Asia Timur, yakni faktor *balance of power* dalam proses konfigurasi struktur sistem.

Penulisan tesis ini terinspirasi oleh peningkatan peran Rusia dalam proses rekonfigurasi struktur sistem, baik secara global maupun regional. Peran Rusia secara regional dapat terlihat dalam aktivitas politiknya di kawasan Asia Timur, salah satunya dalam dimensi keamanan. Sebagai negara bekas *superpower*, Rusia dilibatkan dalam forum dialog keamanan regional ASEAN Regional Forum (ARF) dan pertemuan tingkat tinggi kepala negara East Asia Summit (EAS). Pelibatan Rusia secara aktif dalam kedua forum tersebut diinisiasi oleh ASEAN. Secara teoretis, pelibatan Rusia dalam forum dialog tersebut merupakan bagian dari tindakan *balance of power* untuk mengantisipasi kemunculan dan dominasi Cina di kawasan setelah Perang Dingin berakhir.

Tesis ini menyimpulkan bahwa pelibatan Rusia dimaknai sebagai tindakan strategis ASEAN dalam menciptakan distribusi *power* yang setara dengan tujuan menghasilkan tatanan sistem kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera. Peran ASEAN sebagai *middle power* yang aktif dalam proses rekonfigurasi struktur keamanan sistem merupakan fenomena unik karena ASEAN mengedepankan proses dialogis berbasis norma dan nilai. Struktur sistem Asia Timur dengan karakter multipolar, yang ditandai dengan hadirnya lebih dari dua *great power* di kawasan, relatif stabil sejak berakhirnya Perang Dingin. Stabilitas sistem multipolar ini bertentangan dengan prinsip pemikiran realisme struktural yang menyatakan bahwa sistem multipolar seharusnya relatif tidak stabil dibanding bipolar. Proses dialogis dalam rekonfigurasi struktur keamanan kawasan merupakan kunci stabilitas sistem di Asia Timur.

Dalam proses penulisan, penulis menyadari keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki baik dalam segi pengetahuan maupun keterbatasan teknis. Karenanya, argumen dalam tesis ini terbuka untuk segala masukan dan perdebatan, guna perbaikan selanjutnya. Penulis berharap bahwa tesis ini dapat menjadi bahan pembelajaran yang baik bagi penulis sendiri, pembaca, dan peneliti lain memiliki perhatian pada tema yang terkait.

Penulis

Juni 2012

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang selalu memberikan keringanan kepada penulis untuk meneruskan kehidupan dan menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Saya menyadari, bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari banyak pihak, dari masa perkuliahan sampai dengan penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua dan keluarga saya: Mama Komek (*Almh*) dan Papa Ambi yang selalu menyayangi kami dalam situasi apapun; nenek Rosma (*Almh*) yang selalu mendengarkan kisah-kisah penggugah kesadaran selama beliau hidup; Umak dan keluarga di Sungai Aur; Mac, Bang Goor, Gapuak Ole dan Ola yang selalu menyayangi saya sebagai adik.
2. Dr. Hariyadi Wirawan, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
3. Dr. Makmur Keliat, selaku Ketua Sidang, Broto Wardoyo, M.A., selaku penguji ahli, dan Asra Virgianita, M.A., selaku sekretaris sidang, atas kritik, saran, dan masukan konstruktif bagi tesis saya.
4. Dosen-dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan ilmu dan pencerahan kepada saya selama masa perkuliahan.
5. Melati Sosrowidjojo yang selalu menemani saya dalam senang dan susah selama tujuh tahun ini.
6. Senior dan kolega dosen di Program Studi Rusia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya.
7. Sahabat saya dalam dua tahun terakhir: Adi, Adina, Akbar, Briptu Evelyn, Coki, Deska, Doni, Epica, Edit, Gara, Luthfi, Meita, Murad, Pace Yolis, Poeti, Sally, dan Yusa. Persahabatan dengan mereka banyak memberikan inspirasi bagi saya.

8. Seluruh teman-teman mahasiswa Magister HI FISIP UI angkatan 2010 dan Magister Kajian Terorisme angkatan 2010. Terima kasih atas dukungan dan pertemanan selama ini.
9. Pak Udin, Mbak Ice, dan seluruh staf manajemen Magister Hubungan Internasional UI di Kampus Salemba. Terimakasih atas bantuannya selama ini yang sangat berarti.

Terakhir, penulis ingin meminta maaf kepada teman-teman atas hinaan, cercaan, lawakan, yang mungkin selalu berkenan di hati anda sekalian. Semuanya saya lakukan hanya demi hiburan semata. *Mudah-mudahan pedati hidup kita tidak akan pernah terhenti oleh sebuah kubangan kesedihan.*



ABSTRAK

Nama : R. de Archellie
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Pelibatan Rusia dalam Kerangka Kerjasama Keamanan di Kawasan Asia Timur

Tesis ini membahas pelibatan Rusia dalam kerangka kerjasama keamanan di kawasan Asia Timur. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelibatan Rusia dalam kerangka kerjasama keamanan di kawasan Asia Timur dapat dijelaskan dengan menggunakan faktor kekuatan militer, ekonomi, politik, dan penerimaan Rusia sebagai kekuatan baru di kawasan. Pelibatan Rusia di kawasan Asia Timur sejak tahun 1994 membuktikan kekeliruan teoretis salah satu premis dalam paradigma neorealisme yang menyatakan bahwa struktur multipolar relatif tidak stabil dibanding bipolar. Kawasan Asia Timur relatif stabil dengan struktur multipolar sejak berakhirnya Perang Dingin. Mekanisme *balance of power* di kawasan Asia Timur dilakukan dalam kerangka dialog keamanan multilateral yang konstruktif.

Kata kunci:

Rusia, Keamanan, Kawasan, Asia Timur, *Balance of Power*

ABSTRACT

Name : R. de Archellie

Study Program : International Relations

Title : Russia's Engagement into East Asian Security Cooperation

The focus of this study is the Russia's engagement into East Asian security cooperation. The purpose of this study is to understand why Russia has been engaged into East Asian security cooperation. This study summarizes that Russia's engagement into East Asian security cooperation can be explained by military, economic, and political power, and the acceptance of Russia as a new great power in the region. Russia's engagement in East Asia since 1994 has proved theoretical fallacy of the stability of multipolar structure thesis of neorealism instead of bipolar. Multipolar structure of East Asia since the end of the Cold War has been relatively stable. Balance of power mechanism in East Asia achieved by constructively multilateral security dialog.

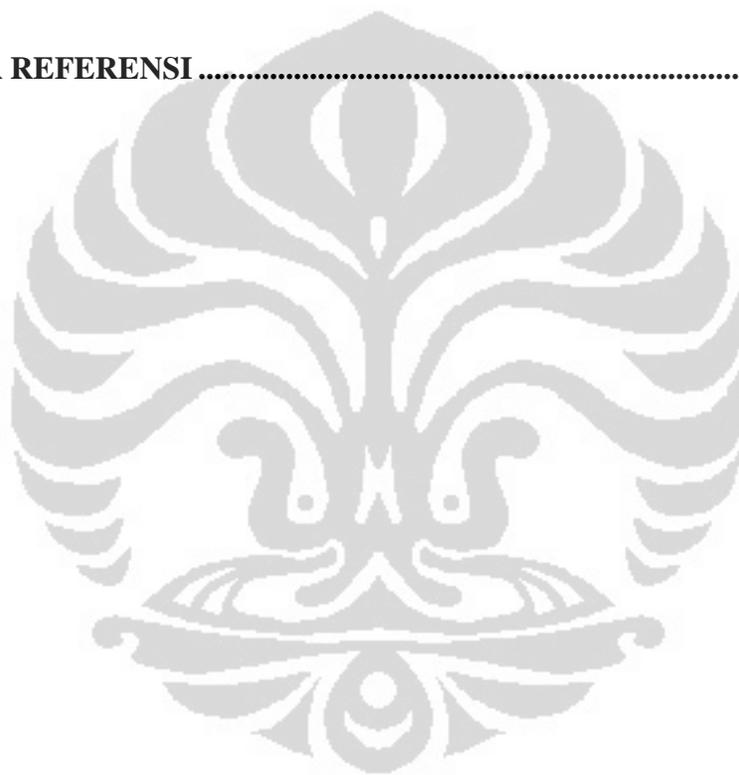
Keywords:

Russia, Security, Region, East Asia, *Balance of Power*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Permasalahan dan Pertanyaan Penelitian.....	8
1.3 Kerangka Pemikiran.....	11
1.4 Model Analisis	16
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	17
1.6 Metode Penelitian.....	17
1.7 Sistematika Penulisan	18
2. TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1 Realisme Struktural atau Neorealisme	21
2.2 <i>Balance of Power</i>	25
2.2.1 <i>Balance of Power</i> dan <i>Balance of Threat</i>	33
2.2.2 Aktor dalam <i>Balance of Power</i>	35
3. GAMBARAN UMUM KAWASAN DAN KERANGKA KERJASAMA KEAMANAN ASIA TIMUR	41
3.1 Kawasan Asia Timur.....	41
3.2 Kondisi Lingkungan Strategis Asia Timur	50
3.3 Kerangka Kerjasama Keamanan	54
3.3.1 <i>ASEAN Regional Forum (ARF)</i>	57
3.2.2 East Asia Summit (EAS).....	61

4. PELIBATAN RUSIA DALAM KERANGKA KERJASAMA KEAMANAN DI ASIA TIMUR.....	65
4.1 Republik Federasi Rusia	67
4.2 Kekuatan Militer Rusia	73
4.3 Kekuatan Ekonomi Rusia.....	90
4.4 Kekuatan Politik Rusia.....	96
4.5 Rusia sebagai Kekuatan Baru.....	104
4.6 Rusia dan Distribusi Power di Asia Timur	112
5. KESIMPULAN.....	117
DAFTAR REFERENSI	121



DAFTAR GAMBAR, TABEL, DAN DIAGRAM

Gambar

Gambar 3.1	Peta Asia Timur.....	45
Gambar 4.1	Sistem Komando Gabungan 4 Distrik Militer Rusia	78

Tabel

Tabel 3.1	Data Populasi 15 Negara Asia Timur.....	46
Tabel 3.2	Produk Domestik Bruto (PDB) Kawasan dalam Juta Dollar AS	47
Tabel 3.3	Pertumbuhan Tahunan Produk Domestik Bruto (PDB) Kawasan	48
Tabel 4.1	Produk Domestik Bruto Rusia dan Persentase Pertumbuhan	70
Tabel 4.2	Cadangan Devisa dan Sovereign Wealth Fund (SWF) Rusia dalam Miliar USD.....	71
Tabel 4.3	Anggaran Pertahanan Rusia dalam miliar USD.....	72
Tabel 4.4	Jumlah Total Personel Angkatan Bersenjata Rusia	76
Tabel 4.5	Perbandingan Kekuatan Militer Cina, Rusia, dan AS.....	79
Tabel 4.6	Kekuatan AS Komando Pasifik	80
Tabel 4.7	Kekuatan Rusia: Komando Gabungan Strategis Wilayah Timur	81
Tabel 4.8	Perbandingan Gelar Pasukan di Asia Timur	81
Tabel 4.9	Target Modernisasi GPV-2020 Berdasarkan Persenjataan	84
Tabel 4.10	Pengeluaran Pasukan dan Persenjataan Rusia tahun 2010.....	87
Tabel 4.11	Cadangan Minyak Bumi Rusia	92
Tabel 4.12	Cadangan Gas Bumi Rusia.....	92
Tabel 4.13	Tujuan Ekspor Minyak Bumi Rusia Berdasarkan Wilayah	94
Tabel 4.14	Permintaan Energi Cina dan Jepang	95
Tabel 4.15	Prioritas Aktivitas Kebijakan Luar Negeri Rusia.....	89
Tabel 4.16	Keterlibatan Rusia dalam Forum Kerjasama di Asia Pasifik.....	107

Diagram

Diagram 4.1	Persentase Utang Luar Negeri Rusia terhadap PDB	71
Diagram 4.2	Tingkat Pendapatan Rata-rata Bulanan dalam USD	71
Diagram 4.3	Estimasi Persentase Anggaran Pertahanan Rusia terhadap PDB	72
Diagram 4.4	Produksi dan Konsumsi Minyak Bumi Rusia (ribu barel/hari).....	92
Diagram 4.5	Produksi dan Konsumsi Gas Bumi Rusia	92

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bubarnya Uni Soviet merupakan salah satu faktor penentu perubahan dinamika politik, keamanan, dan perekonomian internasional pada abad ke-21. Sistem internasional mulai bergeser ke arah sistem multipolar meninggalkan model sistem bipolar pada saat Perang Dingin. Perubahan ini tidak saja mempengaruhi tatanan sistem secara global tetapi juga tatanan regional dan pola-pola kebijakan nasional sebuah negara. Aktor-aktor baru regional banyak bermunculan dan ikut menentukan pengambilan keputusan dan model arsitektur keamanan. Amerika Serikat merupakan *superpower* tunggal setelah Perang Dingin. Sementara itu, beberapa negara muncul sebagai great power regional yang berpotensi mengimbangi unipolaritas AS.

Pada tatanan regional dan interregional, banyak aktor lain yang diprediksi akan ikut secara signifikan menentukan tatanan politik, keamanan, dan perekonomian. Kemunculan aktor-aktor baru ini dimungkinkan dengan semakin majunya perekonomian sebuah negara atau beberapa negara dalam sebuah kawasan. Asia Timur merupakan salah satu kawasan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Tingginya angka pertumbuhan ini didorong oleh pertumbuhan perekonomian domestik Cina sejak tahun 1980-an. Selain Cina, masih terdapat negara-negara, seperti Jepang dan Korea Selatan sebagai motor perekonomian kawasan. Pada bagian lain, ASEAN juga menunjukkan pertumbuhan perekonomian yang positif setelah krisis ekonomi tahun 1997.

Asia Timur merupakan salah satu kawasan di dunia yang sedang mengalami pertumbuhan perekonomian sangat pesat dalam dua dekade terakhir. Laju pertumbuhan ini didorong oleh pesatnya pertumbuhan perekonomian dalam negeri Cina yang telah dimulai sejak tahun 1980-an lewat serangkaian reformasi sistem ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kemudian menjadi perhatian bersama dan perlu dijaga stabilitasnya di kawasan karena memberikan dampak positif bagi kawasan. Pertumbuhan Cina membawa dampak ke kawasan dalam bentuk

kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi dengan negara-negara yang ada di kawasan. Bersamaan dengan itu, Cina mulai memodernisasi dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas militernya. Hal ini lantas menimbulkan semacam kekhawatiran pada sejumlah negara di kawasan yang beranggapan bahwa suatu saat Cina akan memperlihatkan kebijakan-kebijakan asertif dan cenderung menjadi hegemon di kawasan. Kekhawatiran ini diperkuat dengan keputusan AS untuk perlahan-lahan meninggalkan Asia Timur dengan cara mengurangi jumlah pangkalan militernya. Fakta ini berpotensi menjadikan Cina satu-satunya kekuatan utama yang mungkin mengisi kekosongan *power* di kawasan Asia Timur setelah AS pergi. Namun demikian, persoalan keamanan tidak berhenti pada dilema distribusi *power* saja. Banyak isu keamanan baru yang muncul bersamaan dengan berakhirnya Perang Dingin: munculnya aktor baru non-negara, munculnya isu-isu keamanan non-tradisional, munculnya gerakan-gerakan terorisme transnasional, meningkatnya bencana yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan. Kondisi ini paling tidak membuat negara-negara di kawasan Asia Timur merasa perlu menjaga stabilitas kawasan untuk menjaga laju pertumbuhan kawasan tetap stabil.

Menurut konsep *balance of power*, kemunculan sebuah kekuatan dominan potensial di kawasan akan membuat tatanan sistem menjadi cenderung tidak stabil. Ketidakstabilan sistem akan diikuti oleh tindakan penyeimbangan *power* oleh negara-negara lain dalam sistem. Dua kemungkinan yang muncul adalah negara-negara di kawasan bergabung dengan kekuatan dominan (*bandwagoning*) atau negara-negara tersebut membentuk aliansi baru untuk menyeimbangkan kekuatan yang ada (*balancing*).¹ Kemunculan Cina sebagai negara yang paling potensial mengisi kekosongan *power* di Asia Timur setelah AS perlahan menarik mundur kekuatan militernya menciptakan kekhawatiran pada negara-negara lain di kawasan. Cina diprediksi akan menampilkan kebijakan-kebijakan luar negeri asertif dengan dukungan peningkatan kapabilitas militer internalnya.

Dampak kemunculan Cina sebagai kekuatan utama regional dirasakan oleh negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Menanggapi hal ini, ASEAN

¹ Stephen Walt, *The Origins of Alliances*, (New York: Cornell University Press, 1987); Stephen M. Walt. "Alliance Formation and the Balance of Power", *International Security*, (Spring 1985), Vol. 9, No. 4.

melakukan upaya-upaya diplomasi agar tidak terjadi ketegangan. Menurut logika pemikiran neorealisme, kemunculan kekuatan tunggal di kawasan akan diimbangi secara otomatis oleh negara-negara di sekitarnya. Penyeimbangan *power* dilakukan untuk menciptakan kembali *balance of power* yang *equilibrium* dalam sistem.² Aliansi merupakan respon konvensional yang muncul. Namun demikian, tidak pernah terbentuk aliansi militer secara eksplisit di kawasan Asia Timur untuk menciptakan *balance of power*.³ ASEAN lebih memilih opsi yang lebih “lunak” dengan mengundang AS untuk ikut dalam proses dialog keamanan di kawasan Asia Tenggara secara spesifik dan Asia Pasifik dalam skala yang lebih luas. Proses ini telah dimulai sejak tahun 1990-an yang ditandai dengan bergabungnya AS dalam forum dialog keamanan multilateral, yaitu *ASEAN Regional Forum* (ARF).

Balance of power sebagai salah satu faktor pembentukan ARF telah dikaji oleh beberapa peneliti. Michael Leifer⁴ dan Ralf Emmers⁵ berpandangan bahwa berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet membuat konfigurasi sektor keamanan di kawasan Asia Pasifik mengalami pergeseran. Cina muncul sebagai kekuatan regional baru yang patut diperhitungkan. Melihat potensi ini, ASEAN berusaha mempertahankan peran AS di kawasan sebagai penyeimbang besarnya potensi kekuatan Cina dan kemungkinan agresivitas kebijakan luar negeri Cina terhadap kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik secara umum. Hiro Katsumata⁶ memiliki pandangan awal yang sama dengan Leifer dan Emmers tentang faktor *balance of power* dalam ARF. Berbeda dengan dua orang sebelumnya, Katsumata lebih menekankan penelitiannya dalam kerangka paradigma konstruktivis: faktor nilai dan norma banyak mempengaruhi proses dialog dalam ARF.

² Ernst B. Haas. 1953. “The Balance of Power: Prescription, Concept, or Propaganda?” *World Politics*, Vol. 5, No. 4, (Jul., 1953), pp. 442—477.

³ Jack S. Levy and William R. Thompson, “Balancing on Land and at Sea Do States Ally against the Leading Global Power?” *International Security*, Vol. 35, No. 1, (Summer 2020), pp.7—43.

⁴ Michael Leifer, “The ASEAN Regional Forum: Extending ASEAN’s Model of Regional Security,” *Adelphi Papers* 302, (Oxford: Oxford University Press for IISS, 1996).

⁵ Ralf Emmers, “The Influence of the Balance of Power Factor within the ASEAN Regional Forum”, *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 23, No. 2 (August 2001); Ralf Emmers, *Cooperative Security and the Balance of Power in ASEAN and the ARF*, (London: Routledge, 2003).

⁶ Hiro Katsumata, *ASEAN’s Cooperative Security Enterprise: Norms and Interests in the ASEAN Regional Forum*, (New York: Palgrave MacMillan, 2009).

ASEAN Regional Forum dirancang sebagai sebuah forum dialog keamanan multilateral yang membahas isu-isu keamanan di kawasan dengan tujuan menciptakan mekanisme penyelesaian konflik, kerjasama keamanan, dan penggunaan model diplomasi preventif. Permasalahan yang kemudian muncul adalah ASEAN tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas yang cukup untuk mengimbangi besarnya kekuatan Cina dalam proses penyelesaian konflik atau penentuan arsitektur keamanan kawasan. Keputusan ASEAN untuk mengundang mitra dialog ke dalam ARF secara teoretis bertentangan dengan salah satu premis dalam konsep *balance of power*. Kenneth Waltz menyebutkan bahwa tatanan sebuah kawasan akan cenderung stabil apabila terdapat dua kekuatan utama yang saling mengimbangi (bipolaritas).⁷ Premis ini dibangun atas analisis sejarah Perang Dingin yang berlangsung sejak berakhirnya Perang Dunia II sampai dengan bubarnya Uni Soviet di penghujung tahun 1991. Sementara itu, tatanan akan cenderung tidak stabil apabila terdapat lebih dari dua kekuatan utama (*major power*) dalam kawasan. Secara teoretis, ketidakstabilan akan terjadi sebagai akibat dari kemungkinan terjadinya aliansi antara beberapa *major power* untuk mengimbangi dominasi *major power* yang lain (multipolaritas).

ASEAN mencoba menciptakan keseimbangan sistem dengan cara mempertahankan kehadiran AS sebagai *balancer* bagi dominasi China. Langkah ASEAN mempertahankan AS di kawasan berpotensi menimbulkan persepsi bahwa ASEAN menentang kehadiran China sebagai magnet ekonomi baru. Sebaliknya, China adalah mitra perdagangan, investasi, dan ekonomi utama bagi ASEAN. ASEAN tidak ingin terlalu terlibat dalam rivalitas AS-China yang semakin meningkat. Untuk mencegah persepsi-persepsi negatif di antara negara mitra ASEAN, beberapa negara lain yang berpotensi sebagai *rising power* diajak bergabung dalam forum dialog, di antaranya Jepang, Korea Selatan, Uni Eropa, India, Australia, Selandia Baru, dan Rusia.

Langkah ASEAN menjaga stabilitas kawasan dalam kerangka berpikir *balance of power* tidak berhenti pada pembentukan ARF tahun 1994. ASEAN bersama dengan tiga negara mitranya dalam wadah ASEAN Plus Three (APT:

⁷ Kenneth N. Waltz, "Structural Realism after the Cold War", *International Security*, Vol. 25, No. 1 (Summer, 2000), pp. 5—41.

ASEAN, Korea Selatan, Cina, dan Jepang) bersepakat menginisiasi forum dialog strategis Asia Timur dengan nama East Asia Summit (EAS).⁸ Tujuan awal pembentukan EAS adalah sebagai forum dialog strategis multilateral yang membahas isu-isu politik, keamanan, dan ekonomi regional berdasarkan kepentingan bersama dan memperhatikan tujuan-tujuan untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan ekonomi di Asia Timur.⁹ Kesepakatan ini berangkat dari pemahaman tentang tantangan yang akan dihadapi oleh negara-negara di kawasan, mulai dari terorisme, perkembangan dinamis kawasan Timur Tengah, situasi keamanan Semenanjung Korea, persebaran wabah flu burung, tantangan sosio-ekonomi kawasan, kemiskinan, dan pembangunan yang akan membuatsaling ketergantungan dan dialog multilateral menjadi susah dilakukan.

Deklarasi Kuala Lumpur sebagai institusionalisasi legal EAS ditandatangani oleh enam belas negara: sepuluh negara ASEAN, Australia, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Pada KTT EAS ke-6 di Bali, 19 November 2011, Rusia dan AS resmi bergabung sebagai anggota EAS. Negara anggota EAS memiliki visi yang sama, yaitu penciptaan sebuah komunitas bangsa-bangsa Asia Timur yang dirancang akan sejalan dengan visi penciptaan Komunitas ASEAN. EAS diidealkan sebagai sebuah forum terbuka, inklusif, transparan, dan berorientasi keluar (*outward-looking*). EAS berusaha memperkuat norma-norma global dalam aktivitasnya dan secara praktis berlandas pada nilai-nilai yang berlaku di ASEAN. Dengan kata lain, ASEAN merupakan motor penggerak kerjasama dalam forum EAS, baik secara internal maupun dengan negara-negara lain di luar keanggotaan EAS.

Pembentukan EAS sebenarnya tidak terlepas dari kerangka berpikir konsep *balance of power*, seperti yang telah dilakukan ASEAN pada ARF sejak tahun 1994. EAS awalnya digagas Malaysia dan Cina karena kedua negara ini berharap mampu menjadi pemimpin kawasan.¹⁰ Malaysia telah berusaha menjadi

⁸ East Asia Summit (EAS) digagas oleh negara-negara ASEAN Plus Three (APT) pada KTT APT ke-8 di Vientiane, Laos, November 2004. Lebih lanjut lihat “Chairman’s Statement of the 8th ASEAN + 3 Summit.” www.aseansec.org/16847.htm diakses tanggal 12 Februari 2012.

⁹ “Kuala Lumpur Declaration on the East Asia Summit”, Kuala Lumpur, 14 Desember 2005, www.aseansec.org/18098.htm diakses tanggal 12 Februari 2012

¹⁰ Jae Cheol Kim, “Politics of Regionalism in East Asia: The Case of the East Asia Summit”, *Asian Perspective*, Vol. 34, No. 3, 2010, pp. 113—136.

pemimpin di Asia Tenggara dengan mengusulkan inisiatif kelompok kerjasama negara-negara Asia Timur dalam wadah East Asia Economic Group atau East Asia Economic Caucus pada tahun 1990. Cina berusaha memperkuat pengaruhnya di ASEAN dengan cara membentuk ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) tahun 2002. Selain mekanisme ACFTA, Cina juga memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara ASEAN dalam berbagai kerjasama bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi. Ketika Cina mengusulkan pembentukan East Asia Community (EAC) melalui inisiatif visioner EAS tahun 2001¹¹, negara-negara ASEAN memandang gagasan ini sebagai usaha Cina untuk menginstitutionalisasi pengaruhnya di kawasan. ASEAN lantas mengulur inisiatif Cina dengan menunjuk East Asia Study group (EASG) sebagai badan yang akan mengkaji ulang laporan East Asia Vision Group (EAVG).

Hasil kajian EASG sebagai pengecekan ulang terhadap laporan EAVG baru dapat direalisasikan pada KTT APT ke-8 tahun 2004 di Laos dalam bentuk pernyataan bersama kepala negara bersepakat untuk melakukan KTT pertama EAS tahun 2005. Penguluran selama tiga tahun merupakan keberhasilan ASEAN dalam mengembalikan peran penggerak kerjasama dari Cina kepada ASEAN. ASEAN berhasil membuat Cina menyetujui norma dan nilai yang telah dibentuk ASEAN sebagai dasar normatif pembentukan EAS. Dengan kata lain, Cina akan memiliki peran yang tidak signifikan dalam pengaturan agenda (*agenda setting*), model keanggotaan, cakupan dan jenis isu, dan hal-hal mendasar terkait institutionalisasi komunitas Asia Timur.¹² Keberhasilan lain ASEAN terkait upaya menangkal besarnya pengaruh Cina dalam inisiatif EAS dalam masuknya tiga negara lain di luar keanggotaan APT, yaitu Australia, India, dan Selandia Baru. Hal ini tidak terlepas dari kekhawatiran Jepang yang kemudian meminta adanya perluasan keanggotaan di luar APT, meskipun Cina bersikukuh pada awal pengusulan bahwa EAS seharusnya secara institusional merupakan perpanjangan APT dengan cakupan isu kerjasama yang lebih luas. Upaya antisipasi besarnya

¹¹ "Towards an East Asian Community: Region of Peace, Prosperity and Progress," *East Asia Vision Group Report 2001*, www.mofa.go.jp/region/asia-paci/report2001.pdf diakses tanggal 26 Maret 2012.

¹² *Loc.Cit.*, Kim, hlmn: 115—121.

pengaruh Cina di kawasan semakin menguat setelah AS dan Rusia resmi bergabung ke dalam EAS tahun 2011.

Tujuan dasar penciptaan sistem *balance of power* adalah untuk menangkal kemunculan kekuatan dominan dan menjaga kedaulatan dan otonomi setiap negara dalam sebuah sistem. Sistem *balance of power* secara tradisional dioperasikan oleh *great powers* karena mereka memiliki kapasitas yang relatif lebih besar untuk mempengaruhi dan mereka memiliki sejumlah kepentingan yang dalam tatanan sebuah sistem. Operasionalisasi sistem *balance of power* termanifestasi dalam dua bentuk: bipolar dan multipolar. Sistem bipolar mensyaratkan adanya dua kekuatan utama yang mengatur konfigurasi sistem. Model ini cenderung stabil karena ukuran dan instrumen *power* yang digunakan untuk mengukur distribusi kekuatan relatif lebih mudah ditentukan dengan hanya merujuk pada dua kekuatan utama. Sedangkan sistem multipolar relatif tidak stabil karena banyaknya kekuatan utama dalam sebuah sistem. Prediksi arah distribusi kekuatan menjadi lebih sulit ditentukan karena banyaknya aktor utama dan beragamnya kepentingan yang dimiliki.

Kawasan Asia Timur lahir sebagai sebuah sistem multipolar setelah Perang Dingin berakhir.¹³ Hal ini ditandai dengan munculnya aktor-aktor baru di kawasan yang mulai memperoleh kepentingan nasionalnya di kawasan. Cina merupakan aktor utama baru di kawasan yang memiliki daya tarik ekonomi terbesar. Tingginya laju pertumbuhan ekonomi Cina menjadi perhatian baru negara-negara di kawasan dan luar kawasan. Dalam sektor keamanan, isu-isu keamanan tradisional, seperti sengketa klaim Laut Cina Selatan, isu nuklir Korea Selatan, sengketa perbatasan sejumlah negara, dan isu-isu keamanan non-tradisional lainnya, menjadi perhatian utama karena pada satu sisi akan berpotensi menghambat proses kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi di kawasan. Dengan kata lain, terdapat persinggungan isu antara masalah keamanan dengan interdependensi ekonomi yang harus diselesaikan.

¹³ Aaron Friedberg, "Ripe for Rivalry: Prospects for Peace in a Multipolar Asia", *International Security*, Vol. 18, No. 3, (Winter 1993/4), pp.5—33; Richard K. Betts, "Wealth, Power and Instability: East Asia and the United States after the Cold War", *International Security*, Vol. 18, No. 3, (Winter 1993/4), pp.34—77.

ASEAN sebagai motor penggerak kerjasama multilateral di kawasan Asia Timur selalu mengedepankan visi normatif dalam berdiplomasi dan menciptakan kerjasama. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas kawasan dan menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif. Namun, dalam beberapa hal, potensi konflik internal antara negara-negara ASEAN, atau antara negara ASEAN dengan Cina bukan tidak mungkin akan terjadi, khususnya menyangkut permasalahan kedaulatan wilayah di Laut Cina Selatan. Rusia dan Jepang pun masih belum mampu menyelesaikan batas-batas kedaulatan mereka di wilayah kepulauan Kuril. Sengketa batas teritorial ini akan sulit diselesaikan dalam kerangka multilateral meskipun ASEAN telah menggagas ARF sebagai salah satu forum dialog yang membahas isu-isu keamanan. ASEAN tentu memiliki pertimbangan-pertimbangan rasional untuk menciptakan sistem multipolar dalam ARF untuk membicarakan beberapa isu keamanan di kawasan.

1.2 Rumusan Permasalahan dan Pertanyaan Penelitian

Dinamika sistem internasional dan regional setelah Perang Dingin banyak dipengaruhi oleh munculnya kutub-kutub baru dalam sistem dan berdampak pada pola-pola hubungan antarnegara dalam kompetisi distribusi *power*. Asia Timur adalah salah satu kawasan dengan karakteristik sistem multipolar yang ditandai dengan kemunculan China sebagai *rising power*. Kemunculan China lantas menimbulkan *security dilemma* bagi negara-negara lain di kawasan, khususnya negara-negara anggota ASEAN. ASEAN merespon kemunculan China dengan membentuk kerjasama keamanan multilateral yang berlandaskan pada penciptaan *mutual trust* dalam bentuk forum dialog yang mulai dirintis sejak tahun 1990-an.

Besarnya potensi ekonomi dan militer yang dimiliki Cina menempatkannya sebagai *great power* regional dan membuat tetangganya khawatir. Negara-negara di kawasan tidak serta merta mengimbangi *power* yang dimiliki Cina dengan cara pembentukan aliansi. ASEAN sebagai institusi multilateral menggunakan cara-cara “lunak” dalam mengimbangi *power* Cina dengan cara mengundang AS dan beberapa *great power* lain dalam berbagai kerjasama strategis. Berdasarkan argumentasi Mearsheimer, *great power*-lah

yang menentukan dan memberikan dampak sistemik terhadap struktur sistem.¹⁴ Ross mengategorikan Jepang, Korea Selatan, dan Rusia sebagai *great power* sementara Cina sebagai *mainland great power* dan AS disebut sebagai *maritime great power*.¹⁵ Aktor lain yang tidak dapat disangkal eksistensi, peran dan dampaknya terhadap sistem adalah ASEAN. Ralf Emmers menganalisis peran ASEAN dalam menentukan perubahan sistemik struktur melalui pembentukan kerjasama keamanan kooperatif, ASEAN Regional Forum (ARF).¹⁶

Sebagai sebuah forum dialog keamanan regional, ARF dibentuk untuk menciptakan tatanan keamanan regional melalui peningkatan *mutual trust* di antara negara di kawasan, mekanisme penyelesaian konflik, dan penerapan diplomasi preventif. Bersama dengan ARF, ASEAN juga berhasil menjadi motor kerjasama dalam forum dialog strategis EAS yang memiliki keanggotan lebih sedikit dibanding ARF namun dengan cakupan isu yang lebih luas dan memiliki visi jangka panjang sebagai komunitas ideal kawasan Asia Timur. Sementara itu, pembentukan ARF dan EAS didasari pada faktor *balance of power* untuk mengantisipasi besarnya potensi Cina di kawasan. Dalam kerangka sistem *balance of power*, ASEAN telah menciptakan sebuah sistem multipolar dalam mengantisipasi Cina dengan cara mempertahankan peran AS dan mengundang sejumlah kekuatan baru ke kawasan, seperti Jepang, Korea Selatan, India, Australia, Selandia Baru, Rusia. Berdasarkan teori *balance of power*, proses distribusi kekuatan yang setara dalam sistem multipolar relatif lebih sulit tercapai karena banyaknya aktor dan beragamnya kepentingan. Namun demikian, ASEAN tetap memilih opsi tersebut dalam membentuk ARF. Fakta yang terjadi adalah dalam sistem yang cenderung multipolar, kawasan Asia Pasifik dan Asia Tenggara secara khusus, tetap stabil meskipun terdapat lebih dari dua *great power* di kawasan. Sedangkan menurut paradigma neoliberal institusionalis, ARF sebagai rejim keamanan di kawasan yang dibentuk untuk menginstitutionalkan

¹⁴ John J. Mearsheimer, *The Tragedy of Great Power Politics*, (New York: W.W. Norton & Company, 2001).

¹⁵ Robert S. Ross, "Bipolarity and Balancing in East Asia", T.V. Paul, James J. Wirtz, and Michael Fortmann, *Balance of Power Theory and Practice in the 21st Century*, (California: Stanford University Press, 2004), hlmn: 268.

¹⁶ Ralf Emmers, "The Influence of the Balance of Power Factor within the ASEAN Regional Forum", *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 23, No. 2, (August, 2001), pp.275—291.

dialog kerja sama keamanan kawasan cenderung stabil sejak awal pembentukannya.

Langkah-langkah strategis yang dibuat ASEAN dalam merespon kemunculan Cina melalui berbagai mekanisme kerjasama multilateral bertentangan logika berpikir perspektif neorealisme. Secara normatif, ASEAN yang secara geografis sangat dekat dengan Cina, seharusnya merespon dengan cara menerima pengaruh Cina (*bandwagoning*) atau membangun aliansi strategis untuk mengimbangi Cina (*balancing*). Jika ASEAN memilih opsi *balancing*, respon yang paling rasional harusnya tercipta aliansi antara ASEAN dengan AS sebagai *global power* atau antara ASEAN dengan Jepang sebagai *island power* subordinasi AS. ASEAN justru melibatkan Cina ke dalam forum kerjasama kooperatif (ARF dan EAS) untuk meredam potensi hegemonik Cina dan sekaligus menyelesaikan berbagai permasalahan keamanan di kawasan.

Bersamaan dengan itu upaya ASEAN untuk mengimbangi potensi hegemonik Cina, ASEAN juga melibatkan *great power* ekstraregional ke dalam mekanisme kerjasama strategis. ASEAN melibatkan Rusia dalam ARF dan EAS untuk membahas berbagai isu strategis di kawasan Asia Timur. Robert Ross mengkategorikan Rusia sebagai *distant neighbor, marginal power*.¹⁷ Secara geografis, ASEAN dan Rusia terpisah cukup jauh. Kondisi domestik Rusia yang relatif belum stabil setelah Uni Soviet bubar membuat negara ini diragukan memberikan dampak sistemik di Asia Timur. Dengan mengesampingkan fakta-fakta tersebut, ASEAN tetap berupaya meredam potensi konflik di kawasan dengan tetap melibatkan Rusia beserta negara-negara lain dalam mekanisme kerjasama kooperatif. Respon yang dilakukan ASEAN merupakan dampak yang dihasilkan secara sistemik dihasilkan dari kekosongan *power* setelah Perang Dingin usai, kemunculan Cina sebagai *rising power*, lingkungan strategis kawasan sebagai “*the region of turmoil and strategic uncertainty*”¹⁸, potensi pertumbuhan kawasan yang positif, dan keterlibatan strategis negara-negara ekstraregional ke Asia Timur.

¹⁷ *Loc. Cit.*, Ross, “Bipolarity and Balancing in East Asia”, hlmn: 276.

¹⁸ Mikael Weissmann, *Understanding East Asian Peace Informal and Formal Conflict Prevention and Peacebuilding in the Taiwan Strait, the Korean Peninsula, and the South China Sea 1990-2008*, (Goteborg: School of Global Studies Peace and Development Research University of Gothenburg, 2009), hlmn: 38.

Berdasarkan pemaparan di atas, pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah *mengapa ASEAN melibatkan Rusia dalam kerangka kerjasama strategis regional Asia Timur?*

1.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan teori *balance of power* yang diformulasikan oleh beberapa ahli, seperti Kenneth N. Waltz, Stephen M. Walt, dan John Mearsheimer untuk menjelaskan keterlibatan Rusia dalam *ASEAN Regional Forum*. Teori *balance of power* memiliki akar pada pemikiran realisme dan struktural realisme. Asumsi dasar teori ini negara adalah aktor sebagai kesatuan tunggal yang mencari cara untuk bertahan dan menciptakan rasa aman bagi dirinya. Namun demikian, pada bagian ini perlu menjelaskan terlebih dahulu pemikiran Kenneth N. Waltz yang memulai penjelasan teori *balance of power* dengan mengasumsikan negara: *“They are unitary actors who, at a minimum, seek their own preservation and, at a maximum, drive for universal domination.”*¹⁹ Asumsi dasar ini dibangun dalam kerangka berpikir kondisi sistem yang anarkis. Setiap negara akan berusaha mempertahankan eksistensinya pada kondisi minimum karena ketidakjelasan (*uncertainty*) di dalam sistem. Kondisi ini digambarkan juga dengan istilah *self-help system*. Setiap negara yang tidak mampu mempertahankan diri secara mandiri atau memiliki kemampuan relatif lebih lemah dibanding negara lain, akan menderita, menimbulkan ketidakamanan bagi dirinya, dan tidak mampu menjadi sejahtera.

Apabila satu atau sekelompok negara tumbuh lebih kuat secara relatif jika dibanding akan dengan negara atau kelompok negara lain, maka *power* menjadi tidak seimbang dan secara relatif negara dan kelompok negara yang lemah akan merasa tidak aman. Negara-negara yang relatif lemah akan mencari cara untuk meningkatkan keamanannya dengan meningkatkan *power* mereka secara relatif dibanding negara kuat. Dengan demikian, kondisi keseimbangan *power* akan kembali tercapai. Tindakan penyeimbangan dihasilkan dari kekangan struktural

¹⁹ Kenneth N. Waltz, *The Theory of International Relations*, (Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1979), hlmn: 118.

yang secara inheren terdapat dalam sebuah sistem. Dunia diasumsikan sebagai sistem anarkis; konflik akan selalu muncul dan negara akan merasa terancam eksistensinya. Sebagai konsekuensinya, setiap negara akan berusaha mempertahankan eksistensi dan menghindari ketidakseimbangan *power* yang membuat negara-negara tersebut berisiko.

Kawasan Asia Pasifik setelah berakhirnya Perang Dingin ditandai dengan meningkatnya kapabilitas ekonomi dan militer Cina. Peningkatan kapabilitas ini berdampak pada kekhawatiran negara-negara di kawasan (*security dilemma*) karena kebijakan luar negeri Cina yang secara perlahan mulai asertif, seperti beberapa kali tindakan militer Cina di Laut Cina Selatan. Negara-negara di Asia Pasifik, khususnya Asia Tenggara merespon kemunculan dan peningkatan kapabilitas militer Cina dengan melakukan meningkatkan kapabilitas internal. Proses ini digambarkan sebagai sebuah sistem yang anarkis; setiap negara berpikir mempertahankan eksistensi diri dengan cara meningkatkan kapabilitas internalnya secara mandiri. Proses ini berpotensi berujung pada pecahnya perang jika ambisi masing-masing negara tidak diatur dalam sebuah mekanisme sistem *balance of power*.

Balance of power merupakan sebuah konsep yang memiliki banyak pengertian dan variasi. George H. Quester menyebutkan “‘*The balance’s underlying principle...was that all the nth disengaged powers would tend to intervene on the side that seemed in danger of losing any ongoing war, to ensure that such a loser was not eliminated from the system and absorbed into an emerging colossus*’”.²⁰ Hans Morgenthau mendefinisikan *balance of power* sebagai “. . . an actual state of affairs in which power is distributed among several nations with approximate equality”. Dua definisi tersebut merupakan bagian kecil dari definisi konsep *balance of power* yang telah ada sejak abad ke-19. Kritik terhadap konsep ini, seiring dengan perkembangan dan dinamika pola hubungan internasional, adalah pedefinisikan konsep ini terlalu fokus pada fenomena sejarah yang terjadi di kontinental Eropa dengan karakteristik

²⁰ Michael Sheehan, *The Balance of Power: History and Theory*, (London: Routledge 1996).

penguasaan wilayah daratan oleh *great power* atau aliansi *great power*.²¹ Kondisi dan pola hubungan internasional saat ini telah bergeser ke luar kontinental Eropa dan tidak lagi terpusat pada satu regional. Dengan demikian, pendefinisian konsep *balance of power* akan memiliki keragaman sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah dan pola perilaku dan hubungan antaraktor dalam wilayah.

Stephen M. Walt mencoba melengkapinya kekurangan teori *balance of power* yang diformulasikan Waltz. Walt menyebutkan bahwa pergerakan menuju *balance of power* bukanlah didasarkan pada perbedaan *power* secara relatif, seperti yang disebutkan Waltz, tetapi didasarkan pada ancaman yang dihadapi oleh *rising power*. Tingkat ancaman yang dimaksud Walt diukur dengan menggunakan empat faktor: kepemilikan *power* secara keseluruhan (*aggregate power*), jarak (*proximity*), kemampuan menyerang (*offensive capabilities*), dan keinginan untuk menyerang (*offensive intentions*).²² Negara merespon ancaman bukan *power*. Negara yang mengembangkan kapabilitas lebih kuat tidak akan mendapat perlawanan kecuali negara tersebut melakukan tindakan-tindakan yang dipersepsikan sebagai ancaman oleh negara lain.

Bentuk respon sebuah negara terhadap ancaman dalam pemikiran realisme adalah lahirnya aliansi-aliansi. Alasan negara-negara membentuk aliansi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sebagai bentuk *balancing* atau *bandwagoning*. *Balancing* merupakan keputusan sebuah negara untuk bergabung/beraliansi dengan kekuatan atau negara lain yang bukan merupakan sumber ancaman utama. *Bandwagoning* merupakan keputusan sebuah negara untuk bergabung/beraliansi dengan sumber ancaman. Sebuah negara melakukan *balancing* dengan alasan untuk menghindari dominasi sumber ancaman utama yang kekuatannya relatif lebih besar. Alasan kedua sebuah negara melakukan *balancing* adalah untuk meningkatkan pengaruh atas negara-negara lain yang kekuatannya relatif lebih lemah. Sebaliknya, alasan negara melakukan *bandwagoning* atau beraliansi dengan sumber kekuatan adalah untuk menghindar dari kemungkinan diserang

²¹ Jack S. Levy and William R. Thompson, "Balancing on Land and at Sea: Do States Ally against the Leading Global Power?" *International Security*, Vol. 35, No. 1 (Summer, 2010), pp. 7—43.

²² Stephen M. Walt. "Alliance Formation and the Balance of Power", *International Security*, (Spring 1985), Vol. 9, No. 4, hlmn: 9.

oleh sumber ancaman sehingga potensi serangan dapat dialihkan ke tempat lain. Alasan selanjutnya adalah adanya harapan bahwa negara yang relatif lemah akan merasakan dampak kemenangan berupa kebanggaan atau perluasan wilayah dari hasil agresi.²³

Pembentukan aliansi sebagai konsekuensi logis terhadap munculnya hegemon ternyata tidak selama terbukti. Berakhirnya Perang Dingin membuat AS tampil sebagai hegemon global yang tidak memiliki pesaing secara militer dan ekonomi. Idealnya, sejumlah *great power* akan merasa terancam dengan kehadiran AS dan kemudian terbentuklah aliansi *great power* untuk meredam AS sebagai hegemon tunggal. Namun demikian, tidak pernah ada aliansi yang lahir untuk mengimbangi hegemoni AS secara global ataupun regional. Levy dan Thompson menyebutkan bahwa aliansi tersebut hadir tidak secara eksplisit dalam bentuk pakta pertahanan.²⁴ Upaya penyeimbangan hegemoni AS tampil implisit dalam bentuk “*soft balancing*” sebagai tindakan menentang atau non-kooperatif melalui kebijakan penggunaan instrumen non-militer. Selain itu, tindakan lain untuk penyeimbangan muncul dalam bentuk “*internal balancing*”, yaitu usaha-usaha internal yang dilakukan negara dalam bentuk pengembangan kemampuan militernya, seperti peningkatan kemampuan angkatan laut China atau pengembangan kemampuan nuklir Korea Utara dan Iran.

Tujuan yang ingin dicapai dalam teori *balance of power* adalah stabilitas sistem dalam pengertian distribusi *power* di dalam sistem mencapai titik keseimbangan. Tingkat keseimbangan di dalam sistem akan ditentukan oleh aktor negara. Pertanyaan yang harus diajukan adalah negara seperti apa yang memiliki kemampuan menentukan *balance of power* dalam sebuah sistem? Sebagian besar ahli berpendapat bahwa negara dengan kategori *great power*-lah yang mampu memberikan dampak terhadap keseimbangan sistem. Mearsheimer mendefinisikan *great power* sebagai “. . . *state possesses enough capabilities to contend in a military conflict with the most powerful state in the system, with*

²³ *Ibid.*, hlmn: 5—8.

²⁴ *Op. Cit.*, Jack S. Levy and William R. Thompson.

reasonable chances of weakening it.”²⁵ Negara-negara yang relatif lebih kecil atau dikategorikan sekunder tidak akan mampu memberikan pengaruh terhadap sistem secara individual. Dengan demikian, menurut Walt, negara dengan kategori *secondary power* hanya akan mampu melakukan tindakan penyeimbangan di antara kelompok negara dengan kategori sama bukan terhadap hegemon baru. Tindakan negara-negara *secondary power* tidak akan mempengaruhi kejadian pada tingkatan sistem.

Pertanyaan selanjutnya adalah berapa jumlah *great power* untuk dapat mencapai *balance of power* dalam sistem. Waltz menyebutkan cukup dua *world powers* untuk menentukan keseimbangan dalam sistem.²⁶ Pemikiran ini didasarkan pada pengalaman panjang Perang Dingin yang menempatkan AS dan Uni Soviet sebagai dua *superpower* dunia yang mampu menciptakan keseimbangan sistem dan tindakan-tindakan mereka berdampak pada sistem. Sementara itu, sistem yang hanya memiliki satu *superpower* cenderung tidak stabil dan setiap kejadian akan ditentukan oleh kebijakan-kebijakan *superpower* tersebut. Model yang terakhir adalah sistem dengan lebih dari dua *great power*, atau sistem multipolar. Sistem multipolar diasumsikan relatif tidak stabil akibat banyaknya jumlah *great power* menjadikan distribusi *power* menjadi divergen. Pertanyaan yang akan muncul adalah bagaimana cara mendistribusikan *power* dan bagaimana hasilnya. Kekangan *self-help system* akan membuat negara memikirkan cara mengkombinasikan kapabilitas yang dimiliki—militer, ekonomi, politik—semata-mata untuk memenuhi kepentingan nasionalnya.²⁷

Kawasan Asia Timur digambarkan sebagai sebuah sistem multipolar setelah berakhirnya Perang Dingin. Hal ini ditandai dengan bubarnya Uni Soviet yang disertai dengan hilangnya pengaruh di kawasan dan berkurangnya peran AS pada tahun 1990-an yang ditandai dengan pengurangan pangkalan dan personel militer AS. Bersamaan dengan proses tersebut, negara-negara di kawasan Asia Timur mulai memikirkan cara untuk meningkatkan kapabilitas internalnya.

²⁵ *Op.Cit.*, Mearsheimer, hlmn: 55—56.

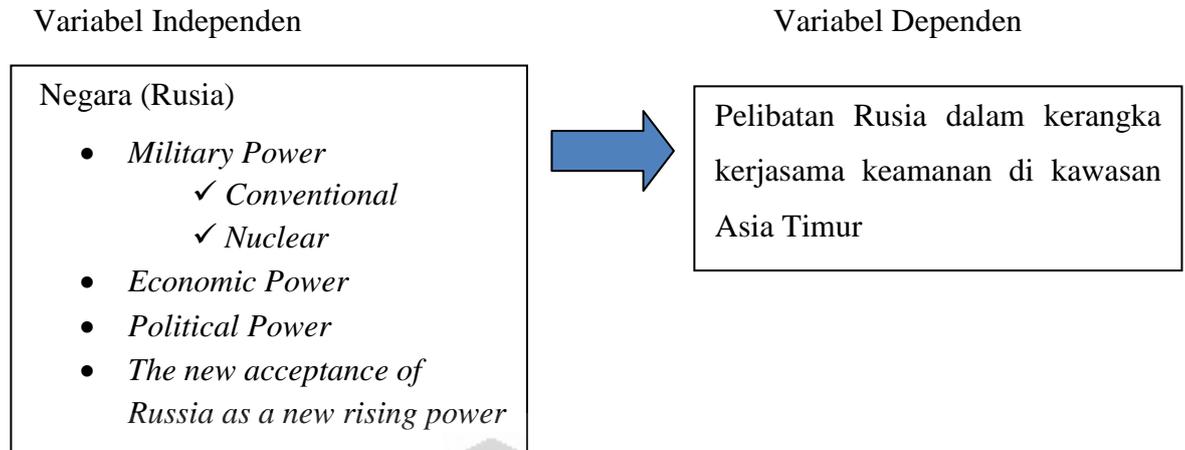
²⁶ Kenneth N. Waltz, “The Stability of Bipolar World”, *Daedalus*, Vol. 93, No. 3 (Summer, 1964), pp. 881—909.

²⁷ *Op.Cit.*, Waltz. *The Theory...*, hlmn: 130—131.

Peningkatan ini lebih banyak dilakukan sebagai akibat dari meningkatnya kapabilitas militer Cina sejak tahun 1990-an. Selain isu keamanan tradisional, isu-isu keamanan non-tradisional mulai banyak mewarnai konfigurasi keamanan kawasan. ASEAN sebagai asosiasi negara dengan jumlah dan kepentingan yang sangat besar di kawasan merasa perlu menata konfigurasi keamanan kawasan, khususnya dalam hal mengantisipasi agresivitas kebijakan luar negeri Cina. ASEAN lantas membentuk ASEAN Regional Forum sebagai institusionalisasi dialog keamanan regional yang bertujuan menciptakan mutual trust, mekanisme penyelesaian konflik, dan penerapan diplomasi preventif. Proses ini dapat berjalan baik dan tatanan kawasan relatif stabil dari awal pembentukan ARF tahun 1994 sampai sekarang dengan melibatkan banyak *great power* di dalamnya. Beberapa tahun kemudian, ASEAN kembali menjadi motor kerjasama kawasan dengan membentuk EAS bersama enam delapan negara anggota di luar ASEAN. Stabilitas kawasan ini bertentangan dengan teori *balance of power* yang menyebutkan bahwa sistem multipolar relatif tidak stabil dibanding sistem bipolar.

1.4 Model Analisis

Penelitian ini menggunakan sebuah model analisis untuk memudahkan proses penelitian. Variabel independen dalam model analisis ini adalah keunggulan yang dimiliki Rusia sebagai bekas negara *superpower*. Pemilihan variabel ini didasarkan pada fakta bahwa Rusia merupakan ahli waris kekuasaan Uni Soviet sebagai *superpower* dan potensi Rusia sebagai kutub utama dalam arsitektur sistem internasional yang mulai bergeser ke arah multipolar setelah Perang Dingin usai. Variabel dependen dalam model analisis adalah pelibatan Rusia dalam kerangka kerjasama keamanan di kawasan Asia Timur. Keterlibatan Rusia dalam ARF sejak tahun 1994 dan EAS sejak tahun 2011 dipengaruhi oleh potensi yang dimiliki Rusia sebagai *balancer* potensial yang dipersiapkan ASEAN untuk mengimbangi besarnya potensi *power* Cina atau kemungkinan terjadinya aliansi Cina-AS, sebagai dua kekuatan terbesar di Asia Timur. Penelitian ini akan melihat bagaimana pengaruh variabel independen dalam pelibatan Rusia dalam ARF.



1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelibatan Rusia dalam kerangka kerjasama strategis regional Asia Timur. Penelitian ini akan menjelaskan mengapa kawasan Asia Timur relatif stabil meskipun cenderung mengarah pada sistem multipolar. Dalam kerangka berpikir *balance of power*, dengan tujuan distribusi kekuatan yang setara, penelitian ini akan menjelaskan mengapa ASEAN melibatkan Rusia sebagai salah satu *great power* dalam kerangka kerjasama strategis regional Asia Timur.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menangkap dan mengungkapkan makna pelibatan Rusia dalam kerangka kerjasama keamanan di kawasan Asia Timur. Unit analisis dalam penelitian ini adalah *ASEAN Regional Forum (ARF)*, *East Asia Summit (EAS)*, dan negara Republik Federasi Rusia (Rusia). Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dalam pengumpulan datanya. Pendekatan penelitian yang tepat digunakan untuk mendeskripsikan tujuan di atas adalah pendekatan kualitatif. John Creswell menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat interpretatif dan menggunakan cara-cara induktif dalam mengungkapkan makna. Penelitian ini menuntut penelitiannya lebih mengutamakan proses pengumpulan dan analisis data daripada hasil dalam usaha

membangun abstraksi, konsep, hipotesis, dan teori dari hal-hal yang sifatnya detail.²⁸

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer hasil pertemuan *ASEAN Ministerial Meeting* (AMM) ke-24 di Kuala Lumpur tahun 1992, yaitu pertemuan yang pertama kali dihadiri Rusia sebagai tamu negara Malaysia, sampai dengan AMM ke-26, yang menjadi cikal bakal terbentuknya *ASEAN Regional Forum* (ARF). Selain itu, sumber lain yang dikumpulkan adalah hasil pertemuan tahunan ARF, pertemuan inter-sessional ARF (track I dan II), dan *Annual Security Outlook 2001—2011*. Data lain yang digunakan sebagai sumber adalah pernyataan resmi kepala negara pada setiap KTT EAS.

Langkah pengumpulan data kemudian dilanjutkan dengan proses analisis. Proses analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap hasil-hasil pertemuan AMM, pertemuan tahunan dan pertemuan inter-sessional ARF, *Annual Security Outlook 2001—2011*, dan pernyataan resmi kepala negara pada KTT EAS. Proses ini dilakukan untuk menemukan arti penting kehadiran Rusia dalam kerangka kerjasama strategis regional Asia Timur. Langkah analisis ini didukung dengan studi sekunder terhadap literatur-literatur terkait ARF dan EAS dari buku, artikel jurnal, dan berita-berita dari situs internet.

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibagi menjadi empat bab. Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan. Bab *kedua* menguraikan konsep *balance of power* yang diawali dengan definisi, sejarah penggunaan, dan penggunaannya untuk menganalisis distribusi *power* di Asia Timur. Bab *ketiga* mendeskripsikan gambaran umum kawasan Asia Timur, ARF, EAS dan negara Republik Federasi Rusia dari tahun 1992 sampai dengan 2011 dalam bidang militer, ekonomi, politik, dan penerimaan Rusia sebagai kekuatan baru di Asia Timur. Bab *keempat*

²⁸ John H. Creswell, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approach*, (London: Sage Publication, 1994), hlmn: 145.

merupakan analisis pelibatan Rusia sebagai *balancer* potensial di Asia Timur dengan mempertimbangkan elemen *power* yang dimiliki Rusia antara tahun 1992 sampai dengan 2011. Bab terakhir, bab *kelima*, merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan hasil temuan penelitian dan saran.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan perspektif pemikiran realisme struktural atau neorealisme. Kedua istilah tersebut tidak memiliki perbedaan mendasar dan akan digunakan secara bergantian tanpa mengalami perubahan makna. Neorealisme merupakan pemikiran yang memiliki akar pada realisme dan mengalami elaborasi di tangan beberapa ahli. Penelitian ini akan menggunakan beberapa karya pemikir neorealisme, di antaranya Kenneth N. Waltz, John Mearsheimer, dan Stephen M. Walt. Bab ini meringkas pemikiran ketiga ahli tersebut untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai realisme struktural. Salah satu teori yang digunakan untuk menjelaskan fenomena struktur sistem di kawasan Asia Timur setelah Perang Dingin adalah *balance of power*. Pemahaman terhadap *balance of power* diperlukan untuk menganalisis rekonfigurasi distribusi *power* setelah Perang Dingin di Asia Timur yang menggabungkan peran *great power* dan *middle power* dalam kerangka kerjasama keamanan konstruktif.

2.1 Realisme Struktural atau Neorealisme

Kenneth N. Waltz merumuskan neorealisme di dalam bukunya *Theory of International Politics* tahun 1979. Waltz memberikan penekanan struktur pada pemikiran realisme dan mendasarkan perumusannya pada penyamaan sistem internasional dengan sebuah pasar menurut teori ekonomi. Sistem internasional dan pasar sama-sama dibentuk oleh unit-unit yang saling berjuang untuk mempertahankan dirinya masing-masing. Unit yang dimaksud oleh Waltz dan yang akan diukur dalam sistem internasional adalah negara-kota, imperium, atau negara-bangsa.

Neorealisme memberikan penekanan analisisnya pada struktur sistem internasional sebagai faktor penjelas, bukan negara dan bukan karakteristik makhluk sebagaimana ditekankan oleh realisme klasik. Struktur sebuah sistem ditentukan oleh prinsip-prinsip pengaturan, yaitu ketiadaan otoritas pengatur dan terdapatnya distribusi kapabilitas di antara negara. Kapabilitas menjadi faktor penentu posisi sebuah negara di dalam sistem. Struktur internasional memiliki

kekuatan dalam dirinya. Struktur mampu mengekang perilaku negara-negara dan negara tidak mampu mengendalikannya. Menurut kaum neorealis, struktur internasional, bukan karakteristik individual negara, yang dapat menentukan dampak.

Struktur menurut Waltz memiliki tiga karakteristik: prinsip pengaturan, fungsi spesifik unit-unitnya, dan kapabilitas relatif unit-unitnya.¹ Sistem internasional merupakan sistem dengan karakteristik anarkis dan terdesentralisasi berbeda dengan sistem politik domestik dengan ciri hierarkis dan sentralistik. Unit-unit di dalam sistem internasional tertata secara koordinatif dan memiliki hak-hak yang setara. Di dalam sistem internasional terdapat unit-unit yang saling berinteraksi, yaitu negara yang memiliki fungsi sama dalam sistem. Satu hal yang membedakan negara di dalam sistem adalah kapabilitas yang dimilikinya. Menurut Waltz, *“The structure of a system changes with changes in the distribution of capabilities across the system’s units.”*²

Kapabilitas unit dalam sistem menjadi penting karena selain berfungsi sebagai pendefinisi unit dalam sistem, kapabilitas unit juga berfungsi mengubah struktur sistem. Perubahan struktur sistem bukan berarti munculnya otoritas supranasional yang berperan mengatur sistem menjadi hierarkis tetapi perubahan yang dimaksud adalah bagaimana distribusi kapabilitas unit menentukan penataan struktur dan pengaturan interaksi unit. Lebih lanjut Waltz menekankan pentingnya struktur:

*“When we are talking about structure we leave aside the qualities, the motive and the interactions of units/actors, not because those matters are uninteresting or unimportant, but because we want to know how the qualities, the motives, and the interactions of units/actors are affected by structure”.*³

Faktor yang menentukan kesamaan unit di dalam sistem internasional adalah tujuannya, yaitu mempertahankan diri (*survival*). Motif pertahanan diri ini menjadi landasan bertindak bagi setiap unit karena keamanan dirinya tidak

¹ Kenneth N. Waltz, 1979, *Theory of International Politics*, (Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company), hlmn: 100—101.

² *Ibid.*, hlmn: 97.

³ *Ibid.*, hlmn: 98.

dijamin oleh siapapun. Karakteristik lingkungan internasional ini dinamakan sebagai *self-help system*. Setiap negara akan berusaha mempertahankan eksistensinya pada kondisi minimum karena ketidakjelasan (*uncertainty*) di dalam sistem. Setiap negara yang tidak mampu mempertahankan diri secara mandiri atau memiliki kemampuan relatif lebih lemah dibanding negara lain, akan menderita, menimbulkan ketidakamanan bagi dirinya, dan tidak mampu menjadi sejahtera.

Kapabilitas negara menjalankan fungsinya diukur dari kemampuannya berbagai elemen dan mengombinasikannya untuk mencapai kepentingan-kepentingan nasional. Kapabilitas ekonomi, militer, dan kapabilitas lain tidak dapat dihitung dan diukur secara terpisah. Di samping itu, negara sebagai unit tidak dapat dibedakan berdasarkan karakteristik ideologi, bentuk pemerintahan, kegemaran berperang atau damai, hasrat, kebiasaan, dan lain-lain. Akumulasi elemen kapabilitas menjadi ukuran sebuah unit dalam struktur sistem. Negara tidak ditempatkan pada urutan teratas karena pengukuran parsial elemen kapabilitasnya. Urutannya ditentukan oleh penghitungan akumulatif beberapa elemen: jumlah populasi, ukuran wilayah, kepemilikan sumber daya, kemampuan ekonomi, kekuatan militer, stabilitas dan kompetensi politik.⁴

Karakteristik struktur sistem yang anarkis dan terdesentralisasi membuat setiap unit mengakumulasi elemen kapabilitas untuk tujuan pertahanan diri. Akumulasi elemen kapabilitas sebagai alat ukur sebuah unit disebut sebagai *power*.⁵ Asumsi awal Waltz terhadap negara adalah “*They are unitary actors who, at a minimum, seek their own preservation and, at a maximum, drive for universal domination.*”⁶ Tindakan negara dalam mengakumulasi *power*, baik untuk tujuan minimum maupun maksimum, akan menimbulkan perbedaan *power* secara relatif. Relativitas ini akan ditentukan oleh perbedaan akumulasi setiap elemen yang dimiliki oleh masing-masing negara.

Pemikiran Waltz sejalan dengan John J. Mearsheimer tentang sistem internasional. Dalam bukunya yang berjudul *The Tragedy of Great Power*

⁴ *Ibid.*, hlmn: 131.

⁵ *Ibid.*, hlmn: 98.

⁶ *Ibid.*, hlmn: 118.

Politics, Mearsheimer menyebutkan lima asumsi tentang sistem internasional: (1) *the international system is anarchic*; (2) *great powers inherently possess some offensive military capability, which gives them the wherewithal to hurt and possibly destroy each other*; (3) *states can never be certain about other states' intentions*; (4) *survival is the primary goal of great powers*, dan (5) *great powers are rational actors*.⁷ Mearsheimer menegaskan bahwa kelima asumsi ini tidak dapat dijadikan aturan umum yang memaksa setiap negara untuk saling bertindak agresif. Namun demikian, tujuan mendasar yang dimiliki setiap negara adalah mempertahankan diri. Apabila kelima asumsi tersebut digabungkan akan menjadi dorongan yang kuat bagi *great power* untuk berpikir dan bertindak ofensif terhadap sesamanya. Dalam kondisi yang umum, terdapat tiga pola perilaku yang dihasilkan: ketakutan (*fear*), *self-help*, dan pemaksimalan *power* (*power maximization*).⁸

Setiap *great power* akan bertindak menggunakan cara-cara yang memungkinkan untuk memaksimalkan *power* karena mereka memiliki ketakutan terhadap kemungkinan serangan dari pihak lain (*fear*) dan setiap *great power* harus mampu mempertahankan diri dari serangan karena tidak ada pihak lain yang akan membantu (*self-help*). Persoalan yang sulit dipecahkan oleh *great power* adalah berapa banyak *power* yang dibutuhkan untuk hari ini dan hari esok. *Great power* menyadari bahwa cara terbaik untuk menjamin keamanan mereka adalah dengan cara mencapai hegemoni dan menyingkirkan kemungkinan munculnya perlawanan dari *great power* lain.⁹ Kondisi ini akan menghasilkan sebuah kondisi yang disebut “*security dilemma*”.

Apabila satu atau sekelompok negara tumbuh lebih kuat secara relatif jika dibanding akan dengan negara atau kelompok negara lain, maka *power* menjadi tidak seimbang dan secara relatif negara dan kelompok negara yang lemah akan merasa tidak aman. Negara-negara yang relatif lemah akan mencari cara untuk meningkatkan keamanannya dengan meningkatkan *power* mereka secara relatif

⁷ John J. Mearsheimer. 2001. *The Tragedy of Great Power Politics* (New York: W.W. Norton & Company), hlmn: 67—69.

⁸ *Ibid.*, hlmn: 70.

⁹ *Ibid.*

dibanding negara kuat. Dengan demikian, kondisi keseimbangan *power* akan kembali tercapai. Tindakan penyeimbangan dihasilkan dari kekangan struktural yang secara inheren terdapat dalam sebuah sistem. Dunia diasumsikan sebagai sistem anarkis; konflik akan selalu muncul dan negara akan merasa terancam eksistensinya. Sebagai konsekuensinya, setiap negara akan berusaha mempertahankan eksistensi dan menghindari ketidakseimbangan *power* yang membuat negara-negara tersebut berisiko. Tindakan negara dalam melakukan penyeimbangan *power* dalam sistem disebut sebagai *balance of power*. *Balance of power* merupakan teori yang masih menjadi perdebatan di kalangan neorealis. Sebagai sebuah teori, *balance of power* masih menjadi salah satu teori yang relevan digunakan, baik sebagai alat analisis sebuah sistem maupun sebagai dasar kebijakan sebuah negara.

2.2 *Balance of Power*

Balance of power merupakan konsep dalam studi ilmu Hubungan Internasional yang memiliki banyak pengertian dan variasi. Konsep ini bahkan mengakibatkan kesulitan dan menjadi sumber kebingungan dalam diskusi ilmu Hubungan Internasional.¹⁰ Upaya menteorikan konsep *balance of power* telah dilakukan oleh Kautilya dan Thucydides pernah menyarankan konsep ini dalam perumusan kebijakan.¹¹ Ahli lain mengatakan bahwa kesulitan dalam perumusan konsep *balance of power* juga disebabkan oleh tidaknya konsensus semantis dalam mendefinisikan kata-kata, seperti "*power*".¹² Fakta sejarah ikut menambah beban bagi kesulitan dalam menteorikan konsep *balance of power* karena konsep ini dibangun berdasarkan peristiwa sejarah yang spesifik secara waktu dan tempat.¹³ Beberapa proposisi yang dibangun berdasarkan fakta sejarah berkaitan dengan model polaritas sistem yang ditentukan oleh jumlah negara atau "*power*" yang berperan menentukan distribusi *power* dalam sistem.

¹⁰ Emerson M.S. Niou and Peter C. Ordeshook. 1986. "A Theory of the Balance of Power in International Systems." *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 30, No. 4, (Dec, 1986), pp. 685—715.

¹¹ Brian Healy and Arthur Stein. 1973. "The Balance of Power in International History." *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 17, No. 1 (Mar., 1973), pp. 33—61.

¹² Alan Alexandroff, Richard Rosecrance, and Arthur Stein. 1977. "History, Quantitative Analysis, and the Balance of Power". *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 21, No. 1, (Mar., 1977), pp. 35—56.

¹³ *Loc. Cit.*, Healy and Stein.

Aplikasi konsep *balance of power* pada abad pertengahan di Eropa membuka perdebatan tentang fungsi konsep ini. Pollard menyebutkan bahwa *power* digunakan oleh para raja di Eropa sebagai alat untuk memelihara perdamaian. “*There have, however, during the Christian era, been three ways in which power has been visualized as means of maintaining peace. The first in in the form of monopoly, the second a balance, and the third a community, of power.*”¹⁴ *Power* yang dimiliki aktor dalam politik internasional harus diatur penggunaannya oleh para pemilik *power* dominan dalam sebuah sistem. Pollard melanjutkan analisisnya dengan membuka ruang diskusi tentang apakah *balance of power* sebagai awalan terhadap sebuah perang atau justru sebagai *antidote*.¹⁵

Pemahaman terhadap konsep *balance of power* perlu diawali dengan pemahaman makna setiap kata yang membangun frasa tersebut. Menurut Pollard, berdasarkan *Oxford English Dictionary*, ia menemukan dua puluh arti untuk kata “*balance*”, enam puluh tiga arti untuk kata “*of*”, dan delapan belas arti untuk kata “*power*”.¹⁶ *Oxford English Dictionary* lantas untuk pertama kalinya menggunakan frasa “*balance of power*” dengan cara mengutip pernyataan seorang penulis yang juga pejabat kementerian Luar Negeri Irlandia, Sir Geoffrey Fenton, kepada Ratu Elizabeth tahun 1579: “*God hath put into your hands the balance of power*”.¹⁷ Pollard berpendapat bahwa *balance of power* yang dimaksudkan Fenton dalam pernyataannya kepada Sang Ratu hanya terbatas pada wewenang kontrol urusan politik dalam negeri sama sekali tidak merujuk pada politik luar negeri.

Berkaitan dengan penggunaan konsep *balance of power* pada studi politik luar negeri, Ernst B. Haas merupakan salah seorang ahli yang mendefinisikan konsep ini ke dalam delapan jenis definisi.¹⁸ Haas menyimpulkan delapan variasi definisi *balance of power* berdasarkan analisisnya terhadap definisi sebelumnya, misalnya oleh L. Bucher, E. Kaeber, dan Hans Morgenthau. Bucher menyebutkan bahwa konsep *balance of power* secara filologis memiliki tiga konotasi:

¹⁴ A.F. Pollard. 1923. “The Balance of Power.” *Journal of the British Institute of International Affairs*, Vol. 2, No. 2, (Mar., 1923), pp. 51—64.

¹⁵ *Ibid.*, p. 58

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Ernst B. Haas. 1953. “The Balance of Power: Prescription, Concept, or Propaganda?” *World Politics*, Vol. 5, No. 4, (Jul., 1953), pp. 442—477.

“balance” meaning an exact equality of political forces, in a two-state system; “balance” meaning the existence, in a three-state system, of two approximately equal forces, with a third one “holding the balance,” i.e., enabling whichever side it decides to join to win the conflict; and “balance” meaning the same thing as hegemony, contradictory though this may sound”¹⁹

Ahli kedua yang dirujuk Haas, E. Kaeber, memiliki beberapa kesamaan definisi dengan Bucher. Kaeber menganalisis isi sejumlah formulasi dan berpikir bahwa terdapat klasifikasi general:

“theories stating the term to mean the exact equality of two contending states, or state systems; theories implying such a distribution of power, in a multi-state system, that no single state would be able, with impunity, to overawe the other states; and “balance” meaning the existence of two contending state systems, with a third state again “holding the balance”²⁰

Sementara itu, Morgenthau sebagai ahli ketiga yang dirujuk Haas, memiliki empat definisi: *“(1) a policy aimed at bringing about a certain power distribution; (2) a description of any actual state of affairs in international politics; (3) an approximately equal distribution of power internationally; and (4) a term describing any distribution of political power in international relations”²¹*

Berdasarkan pemahaman Haas terhadap definisi dari ketiga ahli di atas, ia kemudian memaknai *balance of power* sebagai (1) *distribution of power*, (2) *equilibrium*, (3) *hegemony*, (4) *stability and peace*, (5) *instability and war*, (6) *power politics*, (7) *a universal law of history*, dan (8) *system and guide to policy-making*.²² Pemaknaan *balance of power* sebagai *distribution of power* merupakan jenis penggunaan yang paling sederhana dan banyak ditemukan dalam kalimat deskriptif. Makna ini hanya semata-mata sebuah deskripsi distribusi *power* dan tidak berkonotasi “*balancing*”. Hal ini dapat ditemukan ketika seorang negarawan berkata bahwa telah terjadi pergeseran *balance of power*, berarti ia ingin

¹⁹ *Ibid.*, hlmn: 444.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.* Martin Wight dalam artikelnya “The Balance of Power”, dalam Herbert Butterfield and Martin Wight (eds), *Diplomatic Investigations: Essays in the Theory of International Politics*, (Massachusetts: Harvard University Press: 1966), menyebutkan sembilan definisi *balance of power*. Definisi Wight tidak banyak berbeda secara esensi dengan delapan definisi Haas.

²² *Ibid.*, hlmn: 447.

mengatakan bahwa lawannya (unit politik lain) telah tumbuh lebih kuat dari sebelumnya.

Equilibrium sebagai makna kedua *balance of power* menurut Haas merupakan kelanjutan makna pertama yang berarti kesetaraan *power* antara dua atau lebih pihak yang saling bersaing. Pihak yang saling bersaing dalam sebuah struktur sistem dapat berupa negara atau kelompok negara. Namun demikian, Harold Lasswell berpendapat bahwa upaya untuk mencapai kondisi *equilibrium* yang matang tidak akan pernah sempurna karena adanya unsur-unsur domestik yang akan mengganggu proses tersebut. Gangguan unsur domestik ini biasanya akan membentuk kondisi *balance of power* secara internal dan memroyeksikannya dengan cara bekerja sama dengan negara lain (*balancer*) yang akan menjadi saingan.²³

Haas melanjutkan pemaknaan ketiga *balance of power* sebagai *hegemony*. Hegemoni berarti setiap negara dalam menjalankan tindakan *balance of power* hanya tertarik untuk hasil yang menguntungkan dirinya sendiri. Nicholas J. Spykman memiliki tesis bahwa semua negara berusaha mencapai posisi hegemoni yang dijalankan dengan cara konflik berkelanjutan atau bahkan perang secara penuh. Tujuan akhir *equilibrium* tidak akan pernah tercapai dan justru menciptakan instabilitas dalam sistem karena munculnya negara hegemon.²⁴ Selanjutnya makna keempat *balance of power* menurut Haas adalah *stability and peace*. Haas tidak bermaksud menyebutkan *balance of power* sebagai metode yang tepat untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian tetapi konsep *balance of power* identik dengan stabilitas dan perdamaian. Sifat identik antara konsep *balance of power* dengan stabilitas dan perdamaian hanya akan dapat ditemukan apabila aplikasi konsep *balance of power* bersesuaian dengan pemaknaan pertama dan kedua. Stabilitas dan perdamaian akan muncul apabila terjadi distribusi *power* yang merata di antara unit-unit dalam sistem sehingga *equilibrium* tercapai.

²³ *Ibid.*, p. 450.

²⁴ Nicholas Spykman, *America's Strategy in World Politics*, (New York, 1942), pp. 21—25. Dalam Haas, "The Balance of Power".

Instability and war merupakan makna kelima konsep *balance of power* menurut Haas. Pemaknaan ini berbanding terbalik dengan pemaknaan sebelumnya. Haas secara implisit menyebutkan bahwa *balance of power* bukanlah metode atau variabel independen yang akan menghasilkan instabilitas dan perang. Haas menggunakan kata “sinonim” untuk mendeskripsikan hubungan antara *balance of power* dengan instabilitas dan perang dengan menambahkan terminologi tambahan, seperti perang, intervensi dan kompetisi. Haas kemudian melanjutkan dengan makna keenam, yaitu *power politics*. Haas menyebutkan: ” *Power, politics of pure power, Realpolitik, and the balance of power are here merged into one concept, the concept that state survival in a competitive international world demands the use of power uninhibited by moral consideration.*”²⁵ Negara digambarkan sebagai unit yang berjuang untuk *power* dan hanya semata-mata untuk *power*. Proses perjuangan untuk memperoleh *power* ini dilakukan negara dengan cara atau dapat dilihat melalui instalasi militer, kemampuan militer potensial, dan posisi strategis sebuah negara.

Makna ketujuh *balance of power* adalah *universal law of history*. Pemaknaan ini memiliki akar pemikiran pada premis dasar realisme klasik, yaitu setiap negara, seperti makhluk hidup, memiliki naluri *self-defense* dan cenderung tamak dalam mengakumulasi *power*. Universalitas makna ketujuh ini didasarkan pada sifat alamiah setiap negara yang disebut identik dengan makhluk hidup dalam mempertahankan hidupnya. Setiap negara tidak akan pernah mau hidup di bawah dominasi satu negara hegemon. Kemunculan negara hegemon akan ditangkal oleh negara atau kelompok negara dalam bentuk tindakan *balancing*. Kecenderungan ini menurut Haas dan Morgenthau akan dapat ditemukan apabila terjadinya hegemoni dalam sistem.

Haas menyebutkan *balance as a “system” and “guide” to policy-making* sebagai makna kedelapan. Haas mengawali analisisnya dengan mengatakan: “*In the formulation of the balance of power as a system of political organization and guide to policy-making, emphasis is firmly thrown on conscious and deliberate*

²⁵ *Ibid.*, hlmn: 452.

behavior and decision-making.”²⁶ Secara historis, *balance of power* telah dijadikan alat untuk perumusan kebijakan dalam cara-cara yang cermat dan tidak emosional.²⁷ Keunggulan *balance of power* didasarkan pada objektivitas, ketidakterkaitannya dengan ideologi, universalitas, dan independensinya dari pertimbangan jangka pendek. *Balance of power* memberi penekanan pada hal-hal yang mendasar, tidak dapat dihindarkan, dan tidak terpengaruh waktu dalam hubungan internasional, yakni *power and power relationships*.²⁸

Sebagai sebuah sistem, *balance of power* dimaknai sebagai kondisi atau penciptaan kondisi sistem yang seimbang. Setiap unit dalam sistem yang dibangun oleh *family of nations* akan saling menjaga agar tidak ada satu negara yang lebih dominan atas negara lain. Bentuk ideal struktur sistem yang seimbang ini menjadikan *balance of power* juga sebagai panduan bagi negarawan dalam merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga eksistensi negaranya dari dominasi negara lain. Negara di dalam sistem biasanya akan melakukan *balancing* terhadap negara atau kelompok negara hegemon yang berpotensi menyerap atau membatasi *power* negara atau kelompok negara lain.

Perumusan definisi *balance of power* oleh L. Bucher, E. Kaeber, Hans Morgenthau, Ernst Haas, dan para ahli lainnya bukan berarti membuat *balance of power* sebagai sebuah teori telah mencapai formulasi sempurnanya. Kenneth Waltz merupakan salah satu ahli yang berupaya membuat realisme menjadi lebih ilmiah dalam kerangka berpikir struktur. Teori *balance of power* menurut Waltz dimulai dengan asumsi tentang negara: “*They are unitary actors who, at a minimum, seek their own preservation and, at a maximum, drive for universal domination.*”²⁹ Berbeda dengan realisme klasik, Waltz berargumen bahwa fungsi negara mempertahankan eksistensinya merupakan akibat dari tekanan struktur sistem yang anarkis. Karakter anarkis sistem menurut Waltz disebut juga sebagai *self-help system*. Tekanan struktural sistem terhadap negara pada akhirnya

²⁶ *Ibid.*, hlmn: 455.

²⁷ Ernst B. Haas. “The Balance of Power as a Guide to Policy-Making.” *The Journal of Politics*, Vol. 15, No. 3, (Aug., 1953), pp. 370—398.

²⁸ *Ibid.*, hlmn: 370.

²⁹ *Op. Cit.*, Waltz, 1979, *Theory of International Politics*, hlmn: 118.

memaksa negara untuk tidak saja berusaha untuk kebaikan dirinya tetapi juga memaksimalkan cara untuk melindungi diri dari pihak lain.³⁰

Usaha setiap negara mempertahankan eksistensinya di dalam sistem dapat dikategorikan menjadi dua: internal dan eksternal. Usaha-usaha internal menurut Waltz dapat berupa peningkatan kapabilitas ekonomi, peningkatan kekuatan militer, atau pengembangan strategi-strategi yang cerdas. Sedangkan usaha-usaha eksternal dapat berupa penguatan dan perluasan sebuah aliansi atau pelemahan dan penghancuran aliansi lawan.³¹ Dalam *self-help system*, setiap negara akan melakukan usaha-usaha tersebut karena tidak pihak lain yang akan memberikan kebaikan. Jika negara gagal melindungi diri atau melakukan perlindungan diri tidak lebih efektif dibanding pihak lain, negara tersebut akan gagal mensejahterakan diri dan membahayakan dirinya sendiri. Kondisi ini menurut Waltz bersesuaian dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh teori *balance of power*: tatanan sistem yang anarkis dan sistem diisi oleh unit-unit yang berfungsi mempertahankan eksistensinya.³²

Balance of power merupakan teori yang dihasilkan oleh tindakan-tindakan yang tidak terkoordinasi antarnegara dalam sebuah sistem. Teori ini membuat asumsi-asumsi tentang kepentingan dan motif negara-negara, bukan berusaha menjelaskannya.³³ Apa yang dijelaskan oleh teori *balance of power* adalah kekangan yang membatasi tindakan dan perilaku negara-negara. Persepsi yang jelas terhadap kekangan menyediakan banyak petunjuk kepada reaksi-reaksi yang mungkin diharapkan muncul tetapi teori *balance of power* sendiri tidak dapat menjelaskan reaksi tersebut. Penjelasan reaksi akan bergantung tidak saja pada kekangan internasional tetapi juga pada karakteristik yang dimiliki setiap negara.

Waltz seolah tidak konsisten dalam merumuskan teori *balance of power*. Ia mengatakan bahwa teori *balance of power* hanya menjelaskan dampak yang diharapkan muncul tetapi tidak menjelaskan bagaimana dampak-dampak tersebut

³⁰ *Ibid.*, hlmn: 105.

³¹ *Ibid.*, hlmn: 118.

³² *Ibid.*, hlmn: 121.

³³ *Ibid.*, hlmn: 122.

muncul.³⁴ Hal ini berkaitan dengan penjelasan Waltz sebelumnya bahwa neorealisme mengasumsikan negara sebagai aktor uniter yang hidup dalam struktur sistem anarkis. Sifat uniter negara sebagai aktor melepaskan penilaian-penilaian subjektif, seperti ideologi, bentuk pemerintahan, kegemaran berperang atau damai, hasrat, kebiasaan, faktor-faktor lain yang menjadi ciri unik sebuah negara. Jika faktor-faktor subjektif ini ikut menjadi pertimbangan, analisis akan bergeser menjadi analisis kebijakan luar negeri sebuah negara yang merupakan bagian dari analisis unit, bukan sistem.

Berdasarkan penjabaran pendapat beberapa ahli di atas, definisi *balance of power* dapat dikategorikan menjadi dua: deskriptif dan normatif. Definisi deskriptif berkaitan dengan pemaparan tendensi politik internasional berdasarkan fakta sejarah untuk menguji dan membuktikan sifat teoretis *balance of power* sebagai sebuah teori. Hal ini dilakukan hampir seluruh ahli yang disebutkan sebelumnya. Bukti-bukti sejarah yang banyak dirujuk adalah dinamika politik Eropa sejak abad pertengahan sampai dengan Perang Dunia II. Hal ini menjadi kritik tersendiri terhadap *balance of power* yang dibangun berdasarkan pengalaman sejarah bangsa-bangsa di Eropa, khususnya Eropa daratan. Dengan kata lain, *balance of power* masih merupakan produk pemikiran Eropa-sentris dan memerlukan pengujian lanjutan untuk dinamika regional atau global lain berdasarkan periode waktu tertentu.

Definisi normatif teori *balance of power* berkaitan dengan rekomendasi terhadap perumusan kebijakan luar negeri sebuah negara. Ernst Haas merupakan salah satu ahli yang melakukan analisis politik internasional dengan hasil berupa artikel preskriptif dalam kerangka *balance of power*.³⁵ Sifat normatif atau preskriptif *balance of power* dapat terpengaruh unsur subjektivitas karena dibangun berdasarkan fakta-fakta yang belum tentu sama antara satu wilayah dengan wilayah lain, atau antara satu periode waktu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, Waltz menguji teorinya dengan membuktikan bahwa sistem lebih stabil

³⁴ Jack S. Levy, "What Do Great Powers Balance Against and When?" dalam T. V. Paul, James J. Wirtz, and Michel Fortmann (eds), 2004, *Balance of Power Theory and Practice in the 21st Century*, (California: Stanford University Press), hlmn: 35—36.

³⁵ Ernst B. Haas, "The Balance of Power as a Guide to Policy-Making", *The Journal of Politics*, Vol. 15, No. 3, (Aug., 1953), pp. 370—398.

apabila terdapat dua *superpower*, yakni pada masa Perang Dingin. Sementara itu, Walt Mearsheimer dan beberapa ahli lain berargumentasi bahwa sistem dengan lebih dari dua *great power*-lah yang lebih stabil. Di luar perdebatan itu, para ahli harus mampu menjawab mengapa sistem internasional cenderung stabil setelah Perang Dingin, yakni pada saat AS tampil sebagai *superpower* tunggal tanpa ada penyeimbang.

2.2.1 *Balance of Power* dan *Balance of Threat*

Stephen Walt melakukan elaborasi terhadap teori *balance of power* yang dirumuskan Kenneth Waltz dengan menyebut teorinya sebagai *balance of threat*. Walt berargumen bahwa unit dalam sistem melakukan penyeimbangan atau beraliansi terhadap ancaman (*threat*) bukan terhadap *power* secara mutlak. Pergerakan menuju kondisi sistem yang ekuilibrium bukanlah didasarkan pada perbedaan *power* secara relatif, seperti yang disebutkan Waltz, tetapi didasarkan pada ancaman yang dihadapi oleh *rising power*. Tingkat ancaman yang dimaksud Walt diukur dengan menggunakan empat faktor: kepemilikan *power* secara keseluruhan (*aggregate power*), jarak (*proximity*), kemampuan menyerang (*offensive power/capabilities*), dan keinginan untuk menyerang (*offensive/aggressive intentions*).³⁶

Kepemilikan *power* secara keseluruhan (*aggregate power*) merupakan keseluruhan sumber daya (populasi, kapabilitas industri dan militer, keunggulan teknologi) yang dimiliki sebuah negara dan dapat menjadi ancaman bagi negara lain. *Power* tidak hanya dapat menjadi sumber ancaman tetapi juga dapat dijadikan sebagai pemberian kepada mitra. Dengan demikian *power* merupakan salah satu motif yang akan menghasilkan tindakan *balancing* atau *bandwagoning*. Negara juga akan merespon ancaman yang datang berdasarkan jarak. Kemampuan memproyeksikan *power* akan melemah apabila jaraknya semakin jauh dari titik pangkal. Konsekuensi logisnya adalah negara yang berada dekat dengan pemilik

³⁶ Stephen Walt, *The Origins of Alliances*, New York: Cornell University Press, 1987, hlmn: 5; Stephen M. Walt. "Alliance Formation and the Balance of Power", *International Security*, (Spring 1985), Vol. 9, No. 4, hlmn: 9.

aggregate power besar relatif lebih terancam dibanding negara yang jaraknya lebih jauh.

Berkaitan dengan jarak, kemampuan menyerang (*offensive capabilities*) merupakan unsur ketiga sumber ancaman. Jarak dan kemampuan menyerang merupakan dua hal yang berkaitan sangat erat. Walt mendefinisikan kemampuan menyerang sebagai “*the ability to threaten the sovereignty or territorial integrity of another state at an acceptable cost.*”³⁷ Dampak dari kepemilikan kemampuan menyerang adalah negara-negara di sekitar yang merasa terancam akan mengambil tindakan bijak berupa *bandwagoning* karena negara aliansi/*balancer* belum tentu mampu menyediakan bantuan secara cepat. Keinginan untuk menyerang atau tendensi agresif merupakan unsur ancaman keempat. Ambisi sebuah negara untuk menyerang secara logis tidak akan muncul apabila negara tidak memiliki *aggregate power* yang relatif lebih besar, jarak yang relatif lebih dekat, dan kemampuan menyerang yang tinggi. Negara merespon ancaman bukan semata-mata *power*. Negara yang mengembangkan kapabilitas lebih kuat tidak akan mendapat perlawanan kecuali negara tersebut melakukan tindakan-tindakan yang dipersepsikan sebagai ancaman oleh negara lain.

Walt mendasarkan studinya pada dua bentuk perilaku negara: *balancing*, *bandwagoning*. *Balancing* merupakan keputusan sebuah negara untuk bergabung/beraliansi dengan kekuatan atau negara lain yang bukan dianggap sebagai sumber ancaman utama. Sebuah negara akan bergabung dalam aliansi *balancing* untuk menghindari dominasi sumber ancaman yang kekuatannya jauh lebih besar. Keputusan sebuah negara melakukan tindakan *balancing* didasarkan pada dua alasan: pertama, menggabungkan diri dengan pihak yang lebih lemah bertujuan untuk menghindari dominasi; kedua, menggabungkan diri dengan pihak yang lebih lemah akan meningkatkan pengaruh sebuah negara karena negara yang lebih lemah mungkin akan membutuhkan bantuan. Keputusan bergabung dengan kekuatan dominan akan mengurangi pengaruh sebuah negara.³⁸

³⁷ *Op.Cit.*, Walt, hlmn: 24.

³⁸ *Ibid.*, hlmn: 18.

Bandwagoning merupakan keputusan negara untuk bergabung/beraliansi dengan sumber ancaman. Keputusan negara memilih *bandwagoning* didasarkan pada dua hal. Pertama, dengan memilih beraliansi dengan kekuatan utama, sebuah negara akan terhindar dari potensi serangan dan serangan tersebut dapat dialihkan ke negara lain. Model ini mengandung alasan defensif, yaitu untuk mempertahankan kemerdekaan dari dominasi atau serangan. Kedua, keputusan beraliansi dengan kekuatan dominan atau sumber ancaman mengandung harapan bahwa negara *bandwagoners* akan ikut merasakan dampak kemenangan. Model ini mengandung alasan ofensif, yaitu adanya keinginan memperluas wilayah kedaulatan dari hasil sebuah agresi.³⁹

Perhatian terhadap *balance of threat* tidak serta merta mengubah pemahaman atas perimbangan *power* dalam sistem karena ancaman merupakan fungsi dasar dari kekuatan militer. Walt memberikan perhatian utama terhadap *power (aggregate power)* dalam teorinya. Perilaku mengancam sebuah negara kuat mungkin dapat memicu *balance of power*, tetapi ketiadaan ancaman seharusnya tidak menghambat munculnya *balance of power* karena perbedaan relatif *power* itu sendiri merupakan sebuah ancaman. Apabila sebuah negara menjadi lebih kuat, bukan berarti negara tersebut dapat langsung mengancam tetapi peningkatan *power* mengandung ancaman laten yang dapat mewujudkan secara material kapanpun. Mearsheimer mengatakan: “*a state’s increased “offensive military capability is always a tangible threat to [other states’] survival, regardless of its actions, intentions, or character”*.”⁴⁰ Dengan kata lain, *power* yang berlebihan adalah ancaman tersendiri. *Balance of power* adalah pengaturan secara otomatis yang menciptakan stabilitas sebuah sistem pada saat sebuah negara mengakumulasi kekuatan militer yang tidak proporsional.

2.2.2 Aktor dalam *Balance of Power*

Waltz telah menyebutkan bahwa unit yang akan diukur dalam sistem internasional adalah negara-kota, imperium, atau negara-bangsa. Dalam *balance of power*, aktor yang mampu memberikan dampak terhadap keseimbangan *power*

³⁹ *Ibid.*, hlmn: 19.

⁴⁰ *Op.Cit.*, Mearsheimer, hlmn: 45.

dalam sistem adalah *great power*. Sebagian besar ahli berpendapat bahwa negara dengan kategori *great power*-lah yang mampu memberikan dampak terhadap keseimbangan sistem. Mearsheimer melalui judul bukunya, *The Tragedy of Great Power Politics*, secara tegas memilih *great power* sebagai aktor utama yang mampu memberikan dampak dalam sistem. Mearsheimer mendefinisikan *great power* sebagai “. . . state possesses enough capabilities to contend in a military conflict with the most powerful state in the system, with reasonable chances of weakening it.”⁴¹ Negara-negara yang relatif lebih kecil atau dikategorikan sekunder tidak akan mampu memberikan pengaruh terhadap sistem secara individual. Dengan demikian, menurut Walt, negara dengan kategori *secondary power* hanya akan mampu melakukan tindakan penyeimbangan di antara kelompok negara dengan kategori sama bukan terhadap hegemon baru. Tindakan negara-negara *secondary power* tidak akan memberikan pengaruh pada tingkatan sistem.⁴²

Negara-negara *secondary power* mungkin tidak akan mampu mencegah munculnya rising hegemon di dalam sistem. *Secondary power*, layaknya *great power*, pada dasarnya merupakan unit yang memperhatikan keamanan dirinya dan akan melakukan apapun yang harus dilakukan untuk menjamin eksistensi dirinya. Namun demikian, akibat terbatasnya kapabilitas pertahanan yang dimiliki *secondary power*, usaha penjaminan eksistensi diri dilakukan *secondary power* dengan cara berkolaborasi dengan *great power* yang mampu melindungi, baik yang bertindak sebagai *balancers* ataupun sebagai *rising hegemon*. Ketika *secondary power* merasa tidak mampu memberikan dampak pada sistem secara personal, mereka akan melakukannya dengan cara memberikan dukungan secara kolektif melalui tindakan-tindakan *great power*.

Keputusan *secondary power* untuk memilih bergabung dengan *great power* sebagai jaminan keamanan bukan berarti mereka akan memperoleh rasa aman secara mutlak. Berbagai tindakan yang dilakukan *great power* tidak saja memberikan dampak sistemik tetapi juga akan banyak menimbulkan pengaruh pada *secondary power* yang menjadi aliansi. Walt sebelumnya telah memberikan

⁴¹ *Ibid.*, hlmn: 55—56.

⁴² *Op. Cit.*, Walt, “Alliance Formation”, hlmn: 17

asumsi perilaku negara dalam sistem dalam menghadapi ancaman, yaitu balancing atau bandwagoning. Dan Reiter menegaskan kembali: “*when facing a systemic threat, the affected minor powers could enter alliances to either balance against or bandwagon with the threat*”.⁴³ *Secondary power* rentan terhadap ancaman ganda yang muncul baik dari rivalitas *great power* maupun dari sesama *secondary power* yang berdekatan. Sebagai akibatnya, *secondary power* mungkin akan mengabaikan ancaman jangka panjang dari *rising hegemon* dengan memilih tindakan *bandwagoning* hanya demi jaminan terbebas dari ancaman jangka pendek yang muncul dari negara tetangga. Meskipun dampak individual *secondary power* mungkin bersifat marginal dan mereka tidak melakukan penyeimbangan sistemik layaknya *great power*, partisipasi *secondary power* dalam usaha penyeimbangan tidak dapat disangkal.

Pertanyaan selanjutnya adalah berapa jumlah *great power* untuk dapat mencapai *balance of power* dalam sistem. Waltz menyebutkan cukup dua *world powers* untuk menentukan keseimbangan dalam sistem.⁴⁴ Pemikiran ini didasarkan pada pengalaman panjang Perang Dingin yang menempatkan AS dan Uni Soviet sebagai dua *superpower* dunia yang mampu menciptakan keseimbangan sistem dan tindakan-tindakan mereka berdampak pada sistem. Sementara itu, sistem yang hanya memiliki satu *superpower* cenderung tidak stabil dan setiap kejadian akan ditentukan oleh kebijakan-kebijakan *superpower* tersebut. Model yang terakhir adalah sistem dengan lebih dari dua *great power*, atau sistem multipolar. Morton Kaplan menegaskan stabilitas sistem multipolar dengan berargumentasi sistem *balance of power* yang berfungsi baik: “*must [have] ... at least five and preferably more... essential actors*”.⁴⁵ Sistem multipolar diasumsikan relatif tidak stabil akibat banyaknya jumlah *great power* menjadikan distribusi *power* menjadi divergen.

Jack S. Levy memperkaya perdebatan seputar peran aktor dalam penciptaan *balance of power* dalam sebuah sistem. Levy berargumentasi bahwa

⁴³ Dan Reiter, "Learning, Realism, and Alliances: The Weight of the Shadow of the Past," *World Politics*, Vol. 46, No.4 (July 1994), 502.

⁴⁴ Kenneth N. Waltz, "The Stability of Bipolar World", *Daedalus*, Vol. 93, No. 3 (Summer, 1964), pp. 881—909.

⁴⁵ Morton Kaplan, *System and Process in International Politics* (New York: John Wiley & Sons, Inc., 1957), hlmn: 34.

terdapat bias dalam formulasi teori *balance of power* karena terlalu berfokus pada peran great power secara sistemik.⁴⁶ Perhatian utama yang ditekankan terhadap penciptaan *equilibrium* dalam sistem merujuk pada *equilibrium* di antara *great power* bukan negara-negara secara umum. Formulasi teori *balance of power* menekankan pentingnya pemeliharaan “independensi negara-negara” sebagai tujuan penting *balance of power* dalam sistem. Namun, menurut Levy, yang dimaksud dengan “independensi negara-negara” adalah “. . . *that the great powers attempt to preserve the independence and integrity of other great powers (and not of weaker states) because those great powers might be needed in a balancing coalition against hegemonic threats*”.⁴⁷

Levy melanjutkan argumentasinya perihal bias *great power* dengan merujuk pada ketiadaan perang dalam sistem. *Balance of power* dirancang untuk memprediksi stabilitas sistem berdasarkan ada atau tidaknya perang. Namun demikian, perang yang dimaksud di sini adalah perang antara *great power* bukan perang secara umum di dalam sebuah sistem. Bias ini didasarkan pada pendasaran formulasi teori *balance of power* yang selalu merujuk pada fakta sejarah *great power* di Eropa daratan sejak abad ke-17. Levy kemudian menggunakan istilah kedua untuk menangkap fenomena sejarah *great power* di Eropa, yaitu bias eurosentris.⁴⁸ Hal ini tidak terlepas dari besarnya volume literatur yang diterbitkan oleh para pemikir Eropa, khususnya Inggris sebagai negara *balancer* Eropa, tentang formulasi teori *balance of power*.

Pengetahuan tentang identifikasi aktor dalam teori *balance of power* penting pada saat aplikasinya pada berbagai fenomena, khususnya di beberapa kawasan yang melibatkan *great power* dan *secondary power*. Dinamika sistem internasional setelah Perang Dingin merepresentasikan divergensi aktor, baik dalam jumlah maupun konsentrasi aktivitas yang mulai melibatkan *secondary power* sebagai aktor signifikan. Argumentasi yang dibangun Levy merupakan kritik terhadap bias *great power* dan eurosentris teori *balance of power* yang belum mampu menjelaskan berbagai fenomena yang muncul setelah Perang

⁴⁶ *Loc.Cit.*, Levy, , hlmn: 38—44.

⁴⁷ *Ibid.*, hlmn: 39.

⁴⁸ *Ibid.*

Dingin usai. Salah satu konsentrasi aktivitas geopolitik dan geoekonomi yang menjadi perhatian adalah Asia Timur yang melibatkan *great power* (AS), *rising power* (Rusia dan India), “*potential/rising hegemon*” (Cina), dan *secondary power* (ASEAN). Fakta menarik dari fenomena ini adalah teori *balance of power* berusaha menjawab pertanyaan mengapa tidak terjadi aliansi yang berusaha mengimbangi dominasi AS setelah perang dingin; mengapa ASEAN, yang notabene bukan *great power* secara agregat, sebagai kumpulan bangsa justru berperan vital dalam rekonfigurasi arsitektur geopolitik Asia Timur; dan mengapa tidak terjadi perang di kawasan Asia Timur meskipun beban potensi konflik yang dikandungnya sangat berat. Bagian selanjutnya akan menjelaskan kondisi Asia Timur dalam kerangka *balance of power*.



BAB 3

GAMBARAN UMUM KAWASAN DAN KERANGKA KERJASAMA KEAMANAN ASIA TIMUR

Bab ini menggambarkan secara umum kawasan Asia Timur dan kerangka kerjasama keamanan yang terdapat di kawasan tersebut. Penggambaran dibagi menjadi tiga bagian: pertama, definisi Asia Timur sebagai sebuah kawasan; kedua, gambaran tentang ASEAN Regional Forum (ARF) dan East Asia Summit (EAS); dan ketiga, profil negara Republik Federasi Rusia berdasarkan bidang militer, ekonomi, dan politik. Pemaparan tiga bagian ini dilakukan dalam bentuk narasi dan penyajian data-data yang relevan selama sebelas tahun antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2011. Pemilihan kurun waktu ini didasarkan pada variabel yang digunakan, yaitu pelibatan Rusia dalam kerangka kerjasama keamanan di Asia Timur dan keunggulan Rusia sebagai negara bekas *superpower* yang masih memiliki kepentingan di kawasan. Meskipun predikat *superpower* tidak lagi disandang Rusia setelah Perang Dingin usai, potensi yang dimiliki Rusia dalam hal militer, ekonomi, dan politik masih dipertimbangkan sebagai salah satu negara yang dapat memberikan dampak sistemik di Asia Timur.

3.1 Kawasan Asia Timur

Konsepsi Asia Timur sebagai sebuah kawasan muncul sebagai objek kajian setelah sejumlah negara di benua Asia bagian timur merancang institusionalisasi komunitas bangsa dalam East Asia Summit (EAS) tahun 2005.¹ Pendefinisian sebuah kawasan dilakukan dengan cara mengidentifikasi hal-hal yang bersifat materi dan non-materi. Katzenstein mendefinisikan kawasan (*regions*) menggunakan tiga pendekatan teoretis: teori materialis yang menekankan penanda geografis, teori ideasional yang mendefinisikan kawasan sebagai sebuah konstruksi sosial berdasarkan kepentingan politik, ekonomi, dan

¹ Deepak Nair, "Regionalism in the Asia Pacific/East Asia: A Frustrated Regionalism?" *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 31, No. 1 (2008), hlmn: 111.

kultural, dan teori behavioral yang menekankan pembentukan kawasan oleh aktivitas politik dan ekonomi manusia di dalamnya.²

Camilleri menggunakan dua jenis pengaruh untuk mendefinisikan sebuah wilayah: pengaruh *endogenous* dan *exogenous*.³ Pengaruh *endogenous* dapat muncul dari faktor geografi dan demografi. Sedangkan pengaruh *exogenous* dapat berupa peluang dan ancaman yang dihadapi sebuah wilayah. Pengaruh kedua ini banyak ditentukan oleh kebijakan negara di wilayah, kerjasama transnasional, pasar finansial, institusi internasional, atau organisasi non-pemerintah. Berkaitan dengan faktor geografis sebagai instrumen pendefinisi sebuah wilayah, Pempel mendefinisikan wilayah sebagai

“ . . . are taken as contiguous territorial areas having sufficiently clear internal cohesion and definitive enough external boundaries as to be readily distinguishable from other neighboring, and purportedly equally easy-to-distinguish, regions of the world”.⁴

Dalam hal non-materi sebagai unsur pembentuk sebuah wilayah, Habib menyebutkan perlunya motivasi dan kepentingan ketika menentukan konfigurasi sebuah wilayah.⁵ Meskipun demikian, Habib tidak mengesampingkan unsur-unsur fisik dan ideasional lain sebagai instrumen pendefinisi wilayah, misalnya bahasa, agama, budaya, peradaban, etnisitas, militer, politik, dan lain-lain.

Pendefinisian “Asia Timur” sebagai sebuah wilayah akan menggunakan pemahaman konsepsional di atas dengan menggunakan instrumen materi dan non-materi sebagai penanda. Secara terminologis, “Asia Timur” sering digunakan bergantian dengan “Asia Pasifik” untuk menggambarkan sebuah geografi yang sama dengan kelompok negara yang ada di dalamnya. Beberapa literatur yang mengkaji isu keamanan, ekonomi, regionalisme, regionalisasi, untuk kawasan Asia Timur tidak banyak yang mampu secara definitif memetakan “Asia Timur”

² Peter J. Katzenstein, *A World of Regions*. (London: Cornell University Press, 2005), hlmn: 6—13.

³ Joseph A. Camilleri, *Regionalism in the Asia-Pacific Order*, (Massachusetts: Edward Elgar Publishing Inc., 2003). Hlmn:3.

⁴ T. J. Pempel, *Remapping East Asia: The Construction of Region*, (New York: Cornell University Press, 2005), hlmn: 4.

⁵ A. Hasnan Habib, “Defining the ‘Asia Pacific Region’”, Hadi Soesastro and Anthony Bergin, *The Role of Security and Economic Cooperation Structures in the Asia Pacific Region*, (Jakarta: CSIS, 1996), hlmn: 3—20.

sebagai sebuah wilayah secara material. Para peneliti dan pengkaji biasanya akan langsung melompat pada tema bahasan tanpa terlebih dahulu menentukan batasan ruang kajiannya secara fisik. Dengan kata lain, “Asia Timur” lebih banyak didefinisikan secara ideasional berdasarkan hasil konstruksi secara politik, ekonomi, atau kultural.

Mantan Menteri Luar Negeri Australia, Gareth Evans, menggunakan frasa “*East Asian Hemisphere*” dalam pidatonya pada *ASEAN Post-Ministerial Conference* (PMC) tahun 1995 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.⁶ Evans menggunakan frasa “*East Asian Hemisphere*” untuk menggambarkan “. . . the segment of earth’s sphere stretching from longitudes west of China to east of New Zealand is a similarly large slice of the globe”.⁷ Penggambaran ini ia lakukan dengan menggunakan analogi atas istilah “*American Hemisphere*”, yaitu wilayah benua Amerika yang membelah garis khatulistiwa dan terbagi menjadi dua bagian: Utara dan Selatan. Pada bagian akhir pidato Evans, ia tidak dapat menghindari dari kesulitan fakta geografis dalam mendefinisikan istilah “Asia Timur”. Evans mengatakan bahwa “*The term ‘East Asian Hemisphere’ captures not only the geographical reality, but a good deal of this culture and social flavour as well*”⁸.

Secara material, geografi Asia Timur dibagi menjadi dua sub-kawasan: Asia Timur Laut (*Northeast Asia*) dan Asia Tenggara (*Southeast Asia*). Sub-kawasan Asia Timur Laut didefinisikan berdasarkan eksistensi teritorial negara-negara: Cina (daratan/*mainland*), Taiwan, Jepang, Korea Utara, dan Korea Selatan. Sedangkan sub-kawasan Asia Tenggara didefinisikan berdasarkan kelompok sepuluh negara ASEAN: Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Weissmann menyebutkan bahwa kedua sub-kawasan tersebut diperlakukan secara

⁶ Gareth Evans, “Australia, ASEAN, and the East Asian Hemisphere”, Statement to the ASEAN PMC 7+1 Session, Bandar Seri Begawan, 2 August 1995. Diakses dari www.gevans.org diakses tanggal 21 Mei 2012.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

terpisah dalam banyak penelitian.⁹ Berdasarkan fakta geografis tersebut, AS dan Rusia seharusnya tidak dapat dikategorikan sebagai bagian atau anggota dari kawasan Asia Timur ataupun dua sub-kawasan di bawahnya. Sementara itu, Mongolia seharusnya dapat dikategorikan sebagai negara bagian kawasan Asia Timur atau sub-kawasan Asia Timur Laut karena wilayah teritorialnya menempel pada bagian selatan Cina. Dengan demikian, secara geografis, kawasan Asia Timur beranggotakan lima belas negara.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, penelitian ini menggunakan definisi material geografis “Asia Timur” Weissmann yang membagi kawasan ini menjadi dua sub-kawasan (Asia Timur Laut dan Asia Tenggara) dan lima belas negara (Cina, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Taiwan, Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam). Mongolia tidak dimasukkan sebagai bagian dari Asia Timur karena secara geografis negara ini terpisah sangat jauh dengan sisi timur benua Asia dan secara sosio-kultural lebih dekat dengan negara-negara Asia Tengah. Rusia tidak dimasukkan karena luasnya wilayah negara ini yang membentang dari sisi timur benua Asia sampai ke sisi barat dan utara benua Eropa. Selain itu, secara politik, Rusia lebih memusatkan aktivitasnya pada kota-kota yang terletak di bagian barat wilayah teritorialnya. Australia, Selandia Baru, dan AS tidak dimasukkan karena secara geografis memang ketiga negara ini tidak berada di benua Asia.

⁹ Mikael Weissmann, *Understanding East Asian Peace Informal and Formal Conflict Prevention and Peacebuilding in the Taiwan Strait, the Korean Peninsula, and the South China Sea 1990-2008*, (Goteborg: School of Global Studies Peace and Development Research University of Gothenburg, 2009), hlmn: 16.

Gambar 3.1 Peta Asia Timur



Sumber: www.taiwandocuments.org diakses tanggal 21 Mei 2012.

Instrumen materi kedua sebagai pendefinisi kawasan Asia Timur adalah faktor demografis. Berdasarkan data tahun 2010 yang dipublikasikan oleh situs www.citypopulation.de, jumlah total penduduk lima belas negara Asia Timur adalah sekitar 2 miliar penduduk. Negara dengan jumlah penduduk terbesar adalah Cina, yaitu 1,3 miliar jiwa pada tahun 2010. Sedangkan negara dengan

Universitas Indonesia

jumlah terkecil adalah Brunei Darussalam, yaitu 393.162 jiwa pada tahun 2010. Jumlah penduduk Asia Timur mencapai hampir sepertiga jumlah penduduk dunia yang mencapai angka tujuh miliar jiwa pada akhir tahun 2011 menurut laporan *United Nations Population Fund (UNFPA)*.¹⁰

Tabel 3.1 Data Populasi 15 Negara Asia Timur

No	Negara	Jumlah Penduduk		
		1990	2000	2010
1	Cina	1.130.822.993	1.242.612.226	1.339.724.852
2	Jepang	123.611.167	126.925.843	128.057.352
3	Korea Selatan	43.410.899	46.136.101	48.580.293
4	Korea Utara	20.522.351	n/a	24.052.231
5	Taiwan	20.605.831	22.405.568	23.224.912
6	Brunei Darussalam	260.482	332.844	393.162
7	Filipina	60.703.810	76.506.928	92.337.852
8	Indonesia,	178.631.196	205.132.458	237.641.326
9	Kamboja,	n/a	11.437.656	13.395.682
10	Laos	4.581.258	5.621.982	6.128.000
11	Malaysia	17.563.420	22.198.276	28.334.135
12	Myanmar	40.786.000	50.125.000	n/a
13	Singapura	3.047.123	4.017.733	5.076.700
14	Thailand	54.548.530	60.916.441	65.479.453
15	Vietnam	n/a	76.323.173	85.846.997
Total		1,699,095,060	1,950,692,229	2,098,272,947

Sumber: www.citypopulation.de

Jumlah populasi merupakan salah satu elemen *power* yang dimiliki sebuah bangsa.¹¹ Interaksi antara populasi dengan sumber daya alam akan mempengaruhi kemampuan negara dalam menggunakan *power*. Jumlah populasi kawasan Asia

¹⁰ UNFPA, *The State of World Population 2011. People and Possibilities in a World of 7 Billion*. Diakses melalui situs www.unfpa.org diakses tanggal 23 Mei 2012.

¹¹ Hans Morgenthau, *Politics among Nations*, 4th ed., (New York: Alfred Knopf, 1967).

Timur yang mencapai sepertiga total penduduk dunia membuat kawasan ini menjadi pusat aktivitas geopolitik dan geoekonomi dunia sejak tahun 1980-an. Cina merupakan negara yang menjadi motor penggerak utama pergeseran aktivitas tersebut setelah negara ini berhasil menunjukkan tingkat pertumbuhan positif sejak akhir tahun 1970-an. Negara lain di Asia yang berpotensi menyaingi keunggulan Cina dalam hal interaksi antara berbagai elemen *power* adalah India. Penduduk India pada tahun 2011 mencapai 1,24 miliar jiwa, berdampingan dengan Cina yang berpenduduk 1,35 miliar jiwa.¹²

Hasil interaksi antara jumlah penduduk dengan sumber daya alam dapat terlihat dari angka pertumbuhan ekonomi negara sebuah kawasan. Dalam hitungan riil, Produk Domestik Bruto (PDB) Asia Timur berada di urutan ketiga kawasan di dunia setelah Uni Eropa dan Amerika Utara. Jepang dan Cina merupakan dua negara di Asia Timur yang masing-masing menyumbang 40 persen PDB riil kawasan. Dibanding dengan Jepang, Cina memperlihatkan peningkatan signifikan PDB riil dalam kurun waktu 2001—2011. PDB Cina meningkat 30 persen selama sepuluh tahun terakhir. Sementara itu Jepang dapat mempertahankan PDB riilnya setiap tahun pada kisaran angka yang stabil.

Tabel 3.2 Produk Domestik Bruto (PDB) Kawasan dalam Juta Dollar AS

	Produk Domestik Bruto (PDB) Riil dalam juta Dollar AS Real Gross Domestic Product (GDP) in billion US					
	2001	2003	2005	2007	2009	2011
Amerika Utara	12355,27	12903,64	13756,76	14397,82	13871,21	14513,58
Amerika Latin	2464,44	2524,71	2787,03	3096,09	3149,26	3467,08
Uni Eropa	12812,32	13143,72	13743,35	14637,62	14065,56	14559,17
Timur Tengah	1122,56	1202,22	1386,00	1547,10	1588,44	1770,17
Afrika	801,59	873,27	974,54	1098,65	1186,35	1258,15
Asia Timur	6963,34	7449,58	8202,71	9214,83	9457,68	10599,68

¹² UNFPA

Dunia	40298,99	42221,54	45468,92	49219,94	48783,74	52145,14
--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Sumber: www.ers.usda.gov/data/macroeconomics/data/historicalrealgdpvalues.xls

Data lain memperlihatkan pertumbuhan tahunan PDB kawasan yang menempatkan Cina pada urutan ketiga setelah Timur Tengah dan Amerika Latin. Dalam kurun waktu tahun 2001—2011, Asia Timur mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dalam hal pertumbuhan tahunan PDB. Kondisi global banyak mempengaruhi tingkat pertumbuhan di setiap kawasan. Dampak krisis finansial global tahun 2008—2009 berdampak negatif pada hampir seluruh kawasan dan dunia secara umum. Asia Timur, Amerika Latin, dan Timur Tengah memperlihatkan peningkatan signifikan PDB pascakrisis. Cina memberikan sumbangan sangat signifikan bagi pertumbuhan kawasan dengan angka pertumbuhan tahunan yang mencapai dua digit dalam beberapa tahun selama tahun 2001—2011.

Tabel 3.3 Pertumbuhan Tahunan Produk Domestik Bruto (PDB) Kawasan

	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)					
	2001	2003	2005	2007	2009	2011
Amerika Utara	1,14	2,49	3,07	1,94	-3,40	1,55
Amerika Latin	0,83	1,83	4,43	5,31	-2,10	4,20
Uni Eropa	2,07	1,30	1,97	3,09	-4,38	1,90
Timur Tengah	-0,94	4,43	6,85	4,36	-0,98	5,68
Afrika	3,39	5,42	5,59	6,13	2,75	1,59
Asia Timur	2,18	3,70	4,81	6,40	-0,14	3,91
Dunia	1,78	2,65	3,53	3,96	-2,34	2,68

Sumber: www.ers.usda.gov/data/macroeconomics/data/historicalrealgdpvalues.xls

Tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan sebuah negara atau wilayah akan ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang tersedia. Tingginya tingkat pertumbuhan Asia Timur sepuluh tahun terakhir didukung oleh pertumbuhan domestik Cina. Unsur domestik Cina banyak ditentukan oleh besarnya jumlah tenaga kerja. Menurut The World Factbook, pada tahun 2011, Cina diperkirakan memiliki

Universitas Indonesia

816 juta tenaga kerja dan berada pada urutan teratas jumlah tenaga kerja terbanyak di antara negara-negara lain.¹³ Saingan terdekat Cina di kawasan Asia Timur adalah Indonesia dengan 117 juta tenaga kerja. Sedangkan di seluruh dunia, Cina diikuti India pada urutan kedua negara pemilik tenaga kerja terbanyak, yakni 487 juta jiwa. *The Economist* meramalkan bahwa Cina akan mengalami penurunan jumlah tenaga kerja dalam sepuluh sampai dua puluh tahun mendatang dan akan digantikan oleh India sebagai negara dengan jumlah tenaga kerja terbanyak di dunia.¹⁴ Besarnya jumlah tenaga kerja Cina dan peran besar pemerintah membuat negara ini menjadi magnet ekonomi baru di kawasan yang menyedot tidak saja negara-negara tetangga tetapi juga negara-negara lain di luar Asia Timur. Dengan kata lain, percepatan yang terjadi di dalam negeri Cina telah membuat dampak sistemik pada kawasan Asia Timur.

Sumber *power* sebuah kawasan dapat juga dilihat dari interaksi antara populasi dengan kemampuan militer sehingga menghasilkan jumlah angkatan perang. Interaksi ini tidak akan disajikan pada bagian ini karena tidak ada institusi keamanan regional di kawasan Asia Timur yang bersifat multilateral dengan prinsip *collective defense*. Negara-negara Asia Timur, dimotori oleh ASEAN, membentuk kerjasama keamanan kawasan dalam formulasi *cooperative security*. Institusionalisasi kerjasama pun tidak dirancang secara ketat karena lebih mengedepankan aspek dialogis di antara negara pesertanya. Model *cooperative security* di Asia Timur terwujud sebagai bentuk visi negara-negara di kawasan untuk membentuk sebuah komunitas bangsa Asia Timur.

Pembentukan komunitas bersesuaian dengan instrumen kedua pendefinisi sebuah kawasan, yaitu aspek ideasional. Unsur ideasional pembentuk sebuah kawasan merupakan kesepakatan politik yang dibangun sejumlah negara untuk mendefinisikan dirinya sebagai sebuah kumpulan bangsa yang tinggal di kawasan

¹³ CIA, *The World Factbook* www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ diakses tanggal 25 Mei 2012.

¹⁴ *The Economist*, edisi August 21st—27th 2010, October 2nd—8th 2010, dan December 4th—10th 2010.

tertentu. ASEAN Regional Forum (ARF) dan East Asia Summit (EAS) mewakili aspek ideasional dalam pembentukan komunitas keamanan kawasan Asia Timur.

3.2 Kondisi Lingkungan Strategis Asia Timur

Kondisi lingkungan strategis kawasan Asia Timur mengalami perubahan setelah berakhirnya Perang Dingin. Kawasan ini menjadi perhatian banyak pengkaji politik internasional dan kebijakan luar negeri.¹⁵ Perhatian utama akan banyak terfokus pada prospek kemunculan konflik regional dan peningkatan potensi konflik antar-*great power*.¹⁶ Fokus perhatian ini tidak terlepas dari pergeseran akumulasi *power* dan kekayaan dari kawasan lain yang sebelumnya didominasi oleh negara-negara Barat maju ke arah timur Asia.¹⁷ Pergeseran aktivitas geopolitik dan geoekonomi ke Asia Timur tidak berarti kawasan ini lepas dari pengaruh negara-negara pemilik pengaruh besar dalam sistem internasional. Setelah Perang Dingin usai, jejak pengaruh rivalitas Perang Dingin tetap terjaga di Asia Timur dan mempengaruhi perubahan struktur sistem regional.

Pada masa Perang Dingin *power* politik Asia Timur ditandai dengan kehadiran AS dan Rusia di kawasan dan Cina sebagai *great power* regional. Robert S. Ross menyebut konsentrasi tiga kekuatan ini sebagai “*strategic triangle*”, yang dapat diamati sejak tahun 1970-an sampai dengan berakhirnya Perang Dingin.¹⁸ Tiga kekuatan ini memiliki pengaruh yang bervariasi terhadap negara-negara di kawasan. Dengan berakhirnya Perang Dingin, pengaruh ketiga kekuatan tersebut tidak berarti hilang dan potensi konflik di antara ketiganya mereda. Cikal bakal pertikaian tetap terpelihara dan bahkan bebannya semakin

¹⁵ G. John Ikenberry and Michael Mastanduno, “International Relations Theory and the Search for Regional Stability”, G. John Ikenberry and Michael Mastanduno (eds), *International Relations Theory and the Asia Pacific*, (New York: Columbia University Press, 2003), hlmn: 1; Samuel Kim, “The Evolving Asia System: Three Transformations”, David Shambaugh and Michael Yahuda (eds), *The International Relations of Asia*, (New York: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2008), hlmn: 35. Kim menyebutkan empat tahapan transformasi kawasan “Asia” sebagai sistem internasional: (1) dominasi sistem kontrol Dinasti Cina dari Perang Opium 1839—1842 sampai Perang Cina-Jepang 1894—1895, (2) kemunculan dan kejatuhan Imperium Jepang 1895—1945, (3) masa Perang Dingin 1945—1989, dan (4) masa setelah berakhirnya Perang Dingin.

¹⁶ Robert S. Ross, “The Geography of Peace: East Asia in the Twentieth Century”, *International Security*, Vol. 23, No. 4, (Spring, 1999), pp. 81—118.

¹⁷ Amitav Acharya and Barry Buzan, *Non-western International Relations Theory: Perspectives on and beyond Asia*, (New York: Routledge, 2010), hlmn: 2

¹⁸ *Loc. Cit.*, Ross, hlmn: 83.

berat karena semakin bertambahnya aktor yang terlibat dalam *power* politik, yaitu di antaranya Jepang.¹⁹

Berakhirnya pengaruh Uni Soviet di Asia Timur setelah Perang Dingin, penarikan mundur kekuatan militer AS secara perlahan, kemunculan Cina sebagai aktor regional baru, dan remilitersasi Jepang diprediksi akan mengubah struktur regional ke arah struktur multipolar yang tidak stabil.²⁰ Prediksi dalam perspektif realisme dan neorealisme ini memberikan gambaran kawasan Asia Timur sebagai “*region of turmoil and strategic uncertainty*”.²¹ Dampak yang dihasilkan dari kondisi tersebut adalah tantangan terhadap pengaturan *balance of power* yang sebelumnya relatif damai.²² Untuk menghindari perkembangan negatif sebagai dampak kekosongan power setelah berakhirnya Perang Dingin, perlu dilakukan sebuah mekanisme untuk menciptakan kembali *balance of power*.²³ Proses pengaturan kembali distribusi power di kawasan Asia Timur telah menjadi bahan kajian dan perdebatan ahli sejak tahun 1990-an awal.

Penciptaan atau pengaturan kembali *balance of power* di Asia Timur dilakukan dengan membangun pemahaman atas kinerja sistem atau dengan menggunakan pendekatan sistemik.²⁴ Pendekatan ini digunakan untuk memahami kondisi dan dinamika lingkungan strategis sebuah sistem, baik global maupun regional. Barry Buzan (*regional security complex*) dan Stephen Walt (*balance of threat*) dengan cara mengidentifikasi derajat ancaman yang muncul. Namun demikian, Tang menganggap hasil elaborasi Buzan dan Walt tidak cukup sebagai pendekatan sistemik karena dua ahli tersebut dianggap terlalu fokus kepada

¹⁹ *Loc.Cit.*, Ikenberry and Mastunando, hlmn: 2.

²⁰ Aaron Friedberg, “Ripe for Rivalry: Prospects for Peace in a Multipolar Asia”, *International Security*, Vol. 18, No. 3, (Winter 1993/4), pp.5—33; Richard K. Betts, “Wealth, Power and Instability: East Asia and the United States after the Cold War”, *International Security*, Vol. 18, No. 3, (Winter 1993/4), pp.34—77.

²¹ Mikael Weissmann, *Understanding East Asian Peace Informal and Formal Conflict Prevention and Peacebuilding in the Taiwan Strait, the Korean Peninsula, and the South China Sea 1990-2008*, (Goteborg: School of Global Studies Peace and Development Research University of Gothenburg, 2009), hlmn:38

²² *Loc.Cit.*, Ross, hlmn: 81.

²³ *Loc.Cit.*, Weissmann, hlmn: 38.

²⁴ Shiping Tang, “A Systemic Theory of the Security Environment”, *The Journal of Strategic Studies*, Vol. 27, No. 1, (March 2004), pp. 1—24.

banyak faktor sehingga gagal mengintegrasikannya ke dalam kerangka sistemik.²⁵ Argumentasi Tang dapat diterima mengingat logika sistemik yang digunakan perspektif neorealisme memberikan penekanan utamanya pada sistem dan strukturnya. Menurut Waltz, kualitas, motif, dan interaksi unit atau aktor dalam sistem akan dipengaruhi oleh struktur sistem.²⁶

Pengkategorian struktur Asia Timur setelah Perang Dingin berdasarkan distribusi *power* berada dalam perdebatan. Robert Ross berargumentasi bahwa Asia Timur merupakan sistem dengan struktur bipolar.²⁷ Cina mempertahankan pengaruhnya di wilayah daratan Asia Timur, sementara itu AS tetap mendominasi wilayah maritim. Struktur bipolar Asia Timur relatif stabil disebabkan: minimnya kandidat *great power* selain AS dan Cina; kombinasi bipolaritas dan geografis membuat kompetisi *great power* AS-Cina menjadi tekanan munculnya perlombaan senjata; dan kompetisi AS-Cina tidak akan memancing penataan kembali *balance of power* kawasan.²⁸

Aaron L. Friedberg dan Richar K. Betts memiliki argumentasi berbeda dengan Ross. Friedberg berpendapat bahwa Asia Timur merupakan sistem dengan karakteristik struktur multipolar.²⁹ Lebih lanjut ia mengelaborasi faktor-faktor non-struktural yang dapat ikut memberikan dampak bagi perubahan sistemik. Sejalan dengan Ross, Betts berargumentasi bahwa unipolaritas global, AS sebagai *superpower* tunggal setelah Perang Dingin, berdampingan dengan multipolaritas regional.³⁰ Multipolaritas sistem Asia Timur menurut Betts ditandai dengan kemunculan Cina, Jepang, dan Korea Selatan.

Berdasarkan argumentasi Mearsheimer, *great power*-lah yang menentukan dan memberikan dampak sistemik terhadap struktur sistem. Ross mengkategorikan Jepang, Korea Selatan, dan Rusia sebagai *great power* sementara Cina sebagai *mainland great power* dan AS disebut sebagai *maritime*

²⁵ *Ibid.*, hlmn: 3.

²⁶ *Op.Cit.*, Waltz, *The Theory...*, hlmn: 98.

²⁷ *Loc.Cit.*, Ross, hlmn: 84.

²⁸ Robert S. Ross, "Bipolarity and Balancing in East Asia", T.V. Paul, James J. Wirtz, and Michael Fortmann, *Balance of Power Theory and Practice in the 21st Century*, (California: Stanford University Presss, 2004), hlmn: 268.

²⁹ *Loc.Cit.*, Friedberg, hlmn: 6.

³⁰ *Loc.Cit.*, Betts, hlmn: 41.

great power.³¹ Aktor lain yang tidak dapat disangkal eksistensi, peran dan dampaknya terhadap sistem adalah ASEAN. Ralf Emmers menganalisis peran ASEAN dalam menentukan perubahan sistemik struktur melalui pembentukan kerjasama keamanan kooperatif, ASEAN Regional Forum (ARF).³² ASEAN berhasil mensosialisasikan “*the ASEAN’s ways*”³³ sebagai salah satu instrumen mitigasi konflik di kawasan dengan melibatkan (*engage*) hampir seluruh *great power* di dalam ARF sejak tahun 1994. Pada tahun 2005, ASEAN kembali menjadi motor penggerak kerjasama di kawasan Asia Timur melalui pembentukan East Asia Summit (EAS). EAS tidak saja dikategorikan sebagai kerjasama multilateral tetapi juga sebagai kerjasama ekstraregional karena melibatkan beberapa negara di luar kawasan.

Kemunculan ASEAN sebagai aktor dengan kategori non-negara dan non-*great power*, tidak dapat diantisipasi oleh Mearsheimer yang berpendapat bahwa *great power*-lah yang mampu memberikan dampak sistemik. Neorealisme tidak memberikan perhatiannya pada institusi sebagai instrumen pengatur distribusi power dalam sebuah sistem. Namun demikian, dengan kemunculan ASEAN sebagai motor penggerak kerjasama multilateral di kawasan, teori-teori politik internasional yang selama ini didominasi pemikiran Eropa dan Amerika memerlukan revisi.³⁴ Teori-teori realisme klasik dan neorealisme perlu menjelaskan mengapa kawasan Asia Timur relatif stabil sejak tahun 1970-an³⁵ dan mengapa tidak terbentuk aliansi negara-negara Asia Timur untuk mengimbangi AS setelah Perang Dingin.³⁶

Setelah mengidentifikasi struktur, karakternya, dan aktor yang ada di dalamnya, hal berikutnya yang perlu diidentifikasi untuk menggambarkan

³¹ *Loc.Cit.*, Ross, hlmn: 268.

³² Ralf Emmers, “The Influence of the Balance of Power Factor within the ASEAN Regional Forum”, *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 23, No. 2, (August, 2001), pp.275—291.

³³ Michael Haas, “ASEAN’s Pivotal Role in Asian-pacific Regional Cooperation”, *Global Governance*, Vol. 3, No. 3 (Sept.—Dec. 1997), pp.329—348.

³⁴ *Op.Cit.*, Acharya and Buzan, hlmn: 1—25.

³⁵ Stein Tonnesson, “What Is It that Best Explain the East Asian Peace since 1979? A Call for Research Agenda”, *Asian Perspective*, Vol. 33, No. 1, (2009), pp. 111—136.

³⁶ Jack S. Levy and William R. Thompson, “Balancing on Land and at Sea Do States Ally against the Leading Global Power?” *International Security*, Vol. 35, No. 1, Summer 2010, pp.7—43.

lingkungan strategis Asia Timur adalah isu-isu keamanan. Kawasan Asia Timur didera isu-isu “*hard security*” dan juga “*soft security*” setelah berakhirnya Perang Dingin.³⁷ Isu keamanan bersifat “*hard security*”, seperti nuklir Korea Utara, dan isu-isu “*soft security*”, misalnya terorisme, infeksi penyakit menular, *human trafficking*, klaim wilayah dan perbatasan, secara komprehensif dibahas dalam kerangka kerjasama keamanan kooperatif. Secara akumulatif, potensi konflik didominasi oleh persoalan bilateral antara negara-negara Asia Timur. Namun demikian, upaya penyelesaiannya dilakukan dengan melibatkan negara-negara lain luar kawasan dengan tujuan meredam potensi kemunculan hegemon tunggal. ARF merupakan salah satu mekanisme dialog keamanan yang berfungsi membahas berbagai isu keamanan di kawasan dengan tujuan menciptakan *mutual trust*. Di samping ARF, EAS merupakan mekanisme dialog yang membahas isu-isu yang sifatnya lebih luas dari isu keamanan semata.

3.3 Kerangka Kerjasama Keamanan

Pembentukan kerangka kerjasama keamanan di Asia Timur tidak terlepas dari dinamika keamanan yang muncul di kawasan, munculnya isu-isu keamanan baru setelah Perang Dingin, dan keinginan bangsa-bangsa untuk membentuk sebuah komunitas keamanan. Komunitas keamanan didefinisikan sebagai “. . . *group of states which has developed a long-term habit of peaceful interaction and ruled out the use of force as a means to solve conflicts among members of the groups.*”³⁸ Sekelompok negara yang menggabungkan diri ke dalam komunitas akan merasa bahwa keamanan nasionalnya akan menjadi masalah bersama dan sebaliknya persoalan keamanan di kawasan akan mempengaruhi keamanan sebuah negara. Negara-negara ini diikat oleh kesamaan norma, sejarah, pengalaman politik, dan kedekatan geografis.³⁹ Komunitas keamanan hanya dapat

³⁷ David Shambaugh, “International Relations in Asia The Two-Level Game”, David Shambaugh and Michael Yahuda (eds), *The International Relations of Asia*, (New York: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2008), hlmn: 23; Ikenberry and Mastanduno, “International Relations Theory”, hlmn: 2

³⁸ Amitav Acharya, *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order*, (London: Routledge, 2001), hlmn: 1.

³⁹ Alexandra Retno Wulan and Bantarto Bandoro, *ASEAN's Quest for a Full-Fledged Community*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlmn: 4.

terjadi apabila sekelompok negara telah saling percaya dan masalah keamanan hanya dapat diatasi dengan cara berkerjasama.

Konsep komunitas keamanan sebenarnya telah dirumuskan oleh Karl Deutsch pada tahun 1950-an tetapi tidak banyak mendapat perhatian pengakaji ilmu Hubungan Internasional akibat dominasi paradigma realis. Deutsch mendefinisikan komunitas keamanan sebagai “. . . *as a group of people that had become integrated to the point that there is a "real assurance that the members of that community will not fight each other physically, but will settle their disputes in some other way.*”⁴⁰ Deutsch membagi komunitas keamanan menjadi dua: *amalgamated security community* dan *pluralistic security community*. *Amalgamated security community* merupakan penggabungan dua unit independen menjadi satu unit yang lebih besar dengan kesatuan pemerintahan setelah penggabungan. *Pluralistic security community* merupakan komunitas yang terdiri atas unit-unit independen dengan pemerintahan yang terpisah.⁴¹

Negara-negara yang tergabung dalam komunitas keamanan pluralistik memiliki *core values* yang sama berangkat dari kesamaan identitas dengan munculnya perasaan “kekitaan” atau “*we-ness*”. Sentimen “kekitaan”, menurut Deutsch, dapat terbangun melalui komunikasi antaranggota dalam sebuah komunitas. Proses dan transaksi komunikasi dapat terjadi melalui perdagangan, migrasi, pariwisata, pertukaran di bidang pendidikan dan budaya, yang memungkinkan proses sosialisasi terjadi tidak saja pada tingkatan elite tetapi juga pada tingkatan massa.⁴² Pemikiran Deutsch sejalan dengan pandangan kaum konstruktivis yang berpandangan bahwa politik internasional pada dasarnya merupakan hasil konstruksi sosial. Struktur politik internasional dibentuk atas dasar pertimbangan sosial dibanding material; struktur internasional tidak saja

⁴⁰ Karl W. Deutsch et al., *Political Community and the North Atlantic Area: International Organisation in the Light of Historical Experience*, (Princeton: Princeton University Press, 1957), dalam Emanuel Adler and Michael Barnett eds., *Security Communities*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), hlmn: 6.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.* hlmn: 7.

membentuk perilaku, tetapi juga membentuk identitas dan kepentingan aktor di dalamnya.⁴³

Komunitas keamanan pluralistik memiliki karakteristik transnasional yang memerlukan keinginan politik setiap aktor untuk menjaga kohesi komunitas dan berbagi sentimen “kekitaan”. Bruce Cornin mendefinisikan komunitas sebagai “. . . a collectivity of political actors organized on the basis of a common good and a shared sense of self, giving its members a positive stake in building and maintaining internal relationships”⁴⁴. Keinginan untuk mengikat sentimen “kekitaan” yang dibangun atas dasar sukarela secara politis menunjukkan karakteristik transnasional. Ide transnasional menunjukkan adanya upaya melewati batas-batas tardisional sebuah negara meskipun setiap negara tetap mempertahankan pemerintahannya secara mandiri.

Pembentukan komunitas keamanan membutuhkan pemahaman bersama tentang pengaturan melalui mekanisme perdamaian. Kepentingan-kepentingan yang sebelumnya dicapai melalui cara-cara perang, diselesaikan melalui mekanisme yang lebih damai. Peralihan menuju mekanisme yang lebih damai ini dapat dilihat dari adanya pengaruh institusi, norma-norma, dan proses-proses intersubjektif pembentukan identitas dalam penciptaan komunitas keamanan.⁴⁵ Menurut pandangan kaum neoliberal institusionalis, institusi dapat meminimalisasi anarki dan memfasilitasi kerjasama melalui penyediaan informasi, pengurangan biaya transaksi, membantu penyelesaian konflik, dan yang lebih penting adalah mengurangi potensi kecurangan. Paradigma konstruktivis berpandangan bahwa institusi tidak saja berfungsi mengatur perilaku negara-negara, tetapi juga mampu membangun identitas dan kepentingan negara.

Komunitas keamanan di kawasan Asia Timur belum menemukan bentuk sempurna jika dibandingkan dengan NATO. Berbagai kerangka kerjasama keamanan di Asia Timur dirancang sebagai forum dialog isu-isu keamanan dan

⁴³ Alexander Wendt, “Constructing International Politics.” in Viotti, P.R., and Mark Kauppi, *International Relations Theory*. 4th edition, (New York: Pearson Education, Inc., 2010).

⁴⁴ Bruce Cronin, *Community under Anarchy: Transnational Identity and the Evolution of Cooperation*, (Columbia: Columbia University Press, 1999), hlmn: 1.

⁴⁵ *Op.Cit.*, Acharya, 2011, hlmn: 21.

isu strategis lainnya yang akan banyak melibatkan tidak saja negara di kawasan tetapi juga negara di luar kawasan yang memiliki kepentingan strategis. Berikutnya akan digambarkan dua forum kerjasama keamanan di Asia Timur: ASEAN Regional Forum (ARF) dan East Asia Summit (EAS).

3.3.1 ASEAN Regional Forum (ARF)

Urgensi pembentukan kerangka kerjasama keamanan kawasan di Asia Timur mulai meningkat setelah Perang Dingin usai. Struktur sistem bipolar dianggap telah usang dan tidak relevan dengan perkembangan lingkungan strategis mutakhir. Rusia sebagai negara ahli waris Uni Soviet tidak lagi memiliki pengaruh yang kuat di kawasan. AS secara perlahan mulai mengurangi kehadirannya di Asia Tenggara yang ditandai dengan penarikan mundur pasukannya di Filipina tahun 1992. Kehadiran AS di kawasan telah menciptakan “*classic dilemma*” pada negara-negara di Asia Tenggara khususnya; negara-negara di kawasan tetap menginginkan otonomi bersamaan dengan jaminan keamanan dari AS.⁴⁶ Dengan ditutupnya pangkalan militer AS di Filipina tahun 1992, negara-negara ASEAN khawatir akan muncul ketidakpastian di kawasan (*regional uncertainty*) karena tidak ada lagi kekuatan utama yang mampu memberikan jaminan keamanan. Kekhawatiran ini menjadi wajar karena kawasan Asia Timur meninggalkan beberapa potensi konflik dan isu-isu keamanan tradisional dan non-tradisional yang perlu diantisipasi.

Ide pembentukan sebuah kerjasama keamanan multilateral di Asia Timur datang dari Australia dan Kanada pada *ASEAN Ministerial Meeting* (AMM) ke-23 di Jakarta, Juli 1990. Menteri Luar Negeri Australia, Gareth Evans memiliki gagasan yang sama dengan Menteri Luar Negeri Kanada, Joe Clark, tentang pembentukan kerangka kerjasama keamanan kawasan yang berlandas konsep “*common security*” dan secara organisasi meniru *Conference and Security*

⁴⁶ Amitav Acharya, “Regional Military-Security Cooperation in the Third World: A Conceptual Analysis of the Relevance and Limitations of ASEAN”, *Journal of Peace research* Vol. 29, No. 1 (Feb. 1992) pp. 7—21.

Cooperation in Europe (CSCE).⁴⁷ Satu tahun kemudian, Menteri Luar Negeri Jepang, Taro Nakayama, dan *ASEAN Institutes of Strategic and International Studies (ASEAN-ISIS)* mengusulkan *ASEAN Post-Ministerial Conferences (PMC)* sebagai forum konsultatif yang membahas berbagai isu strategis kawasan.⁴⁸ Menanggapi berbagai gagasan, pemerintah negara ASEAN tidak mampu mencapai kesepakatan dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan untuk menjadikan ASEAN sebagai pusat kerjasama dengan mengedepankan nilai-nilai yang telah dibangun ASEAN. Gagasan yang diinisiasi oleh negara-negara di kawasan jika disetujui akan meninggalkan model kerjasama keamanan bilateral model “*hub and spoke*” yang selama ini terjalin antara negara-negara Asia Timur dengan AS menjadi model kerjasama multilateral.

Cikal bakal ARF muncul pada pertemuan *ASEAN PMC Senior Official Meeting (SOM)* bulan Mei 1993 di Singapura. Singapura sebagai tuan rumah berhasil meyakinkan ASEAN dan negara-negara mitra wicaranya tentang perlunya pembentukan dialog keamanan dalam struktur multilateral di Asia Timur.⁴⁹ Para menteri luar negeri ASEAN dalam komunikasi bersama ASEAN PMC, 20—21 Mei 1993 dan AMM ke-26, 23—24 Juli 1993, di Singapura, bersepakat untuk membentuk ARF berdasarkan adanya konvergensi pandangan di antara partisipan yang memandang perlu menemukan cara untuk mempromosikan konsultasi membahas isu-isu politik dan keamanan.⁵⁰ Partisipan bersepakat mengundang Cina, Laos, Papua Nugini, Rusia, dan Vietnam untuk bertemu dengan ASEAN beserta mitra wicaranya pada pertemuan berikutnya.

Pertemuan pertama ARF diadakan pada tanggal 22—23 Juli 1994 di Bangkok, Thailand, yang dihadiri oleh negara ASEAN (Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand), Mitra Wicara ASEAN (AS, Australia, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Uni Eropa, dan Selandia Baru), Mitra Konsultatif ASEAN (Cina dan Rusia), dan negara pengamat (Laos, Papua

⁴⁷ Michael Antolik, *The ASEAN Regional Forum: The Spirit of Constructive Engagement*, *Contemporary Southeast Asia* Vol. 16, No. 2 (September 1994), pp. 117—136.

⁴⁸ *Ibid.*; Ralf Emmers, “The Influence of the Balance of Power Factor within the ASEAN Regional Forum”, *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 23, No. 2 (August 2001), pp. 275—291.

⁴⁹ *Loc. Cit.*, Emmers, hlmn: 279.

⁵⁰ “Joint Communique of the Twenty-Sixth ASEAN Ministerial Meeting”, Singapore, 23—24 July 1993 www.aseansec.org diakses tanggal 12 Februari 2012.

Nugini, dan Vietnam).⁵¹ Negara partisipan yang hadir sepakat untuk memperkuat tujuan dan prinsip *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) ASEAN di Asia Tenggara sebagai prinsip pengatur hubungan antarnegara. TAC juga dirancang sebagai instrumen bagi penerapan *confidence-building*, diplomasi preventif, dan kerjasama politik dan keamanan di kawasan.

Pengaturan mekanisme organisasi ARF mulai diatur pada pertemuan ARF kedua tahun 1995 di Brunei Darussalam. ARF sepakat menetapkan pertemuan tahunan ARF dalam konteks ASEAN Ministerial Meeting dan Post Ministerial Conferences yang didahului oleh ARF-Senior Official Meeting. Proses dialog dan konsultasi ARF dilakukan dalam dua jalur (*two tracks*). Jalur pertama merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah negara partisipan ARF. Jalur kedua merupakan aktivitas yang dilakukan oleh institusi-institusi strategis dan organisasi-organisasi non-pemerintah yang relevan. Dua jalur ini bukanlah dua aktivitas yang terpisah, membahas isu-isu terpisah, atau melakukan dialog dan konsultasi dengan cara terpisah. Jalur satu dan dua ARF merupakan dua proses yang berjalan bersamaan meskipun dilakukan oleh aktor yang berbeda.

Pada dasarnya, ARF merupakan jenis komunitas keamanan pluralistik karena di dalamnya terdapat sejumlah negara yang secara independen berkumpul melakukan sejumlah dialog membahas isu-isu keamanan di kawasan. Meskipun ASEAN merupakan motor penggerak, ARF tidak memiliki struktur organisasi yang hierarkis, legal-binding, dan kaku sejak pembentukannya. Sebagai sebuah forum dialog, ARF diidealkan mencapai tujuan untuk mendorong terjadinya dialog konstruktif dan konsultasi di bidang politik dan keamanan yang menyangkut perhatian dan kepentingan bersama; ARF diharapkan membuat usaha-usaha signifikan dalam menciptakan *confidence-building* dan *preventive*

⁵¹ "Chairman's Statement", The First ASEAN Regional Forum, Bangkok, Thailand, 25 July 1994 www.aseansec.org diakses tanggal 12 Februari 2012.

diplomacy; ARF diharapkan dapat menjadi wadah penyelesaian konflik di kawasan.⁵²

Pada pertemuan tingkat menteri ARF tahun 2003, ARF mengklaim sejumlah capaian setelah sepuluh tahun berdiri, yaitu ARF sebagai forum dialog multilateral dan bilateral dan konsultasi dan pembentukan prinsip-prinsip efektif untuk mendukung terciptanya dialog dan kerjasama meliputi pembuatan keputusan berdasarkan konsensus, prinsip non-intervensi, kemajuan yang berkelanjutan dan maju bersama sesuai dengan kenyamanan pihak-pihak terlibat; partisipan ARF menunjukkan keinginan mendiskusikan sejumlah isu keamanan dalam kerangka multilateral; kepercayaan bersama yang dibangun dari aktivitas kooperatif; pemeliharaan proses dialog dan konsultasi membahas masalah politik dan keamanan; transparansi yang dipromosikan melalui “aturan-aturan ARF” berupa pertukaran informasi berkaitan kebijakan pertahanan dan penerbitan buku putih pertahanan; dan penciptaan jaringan kerja di antara pejabat keamanan, pertahanan, dan militer, partisipan ARF.⁵³

Pertemuan tahunan ARF menghasilkan beberapa dokumen yang dapat dianalisis untuk mengetahui dinamika lingkungan strategis kawasan, isu keamanan mutakhir, prioritas pembahasan isu keamanan, dan pandangan setiap anggota ARF terhadap lingkungannya. Dokumen-dokumen yang dihasilkan merupakan buah diskusi *track I* (pejabat resmi pemerintah) dan II (akademisi dan lembaga non-pemerintah). ARF telah menerbitkan *Annual Security Outlook* sejak tahun 2001 yang berisi pandangan setiap anggota ARF terhadap diri dan lingkungan strategis kawasan. Para pemimpin negara anggota ARF menghasilkan pernyataan bersama yang disebut sebagai *Chairman Statement*. *Chairman Statement* berisi pemahaman bersama negara anggota ARF tentang berbagai kondisi keamanan dan lingkungan strategis dan langkah-langkah konstruktif apa yang akan diadopsi oleh negara anggota ke depannya.

⁵² <http://www.aseanregionalforum.org/AboutUs/tabid/57/Default.aspx> diakses tanggal 27 Oktober 2011.

⁵³ *Ibid.*

ARF membahas beberapa isu spesifik dan kemudian menerbitkan hasil diskusi tersebut dalam bentuk dokumen yang berbeda dari *Annual Security Outlook* dan *Chairman Statement*. ARF memiliki beberapa *summary report* dari pertemuan: (1) *Intersessional Support Group on Confidence Building Measures* (ISG-CBMs), (2) *Intersessional Meeting on Disaster Relief* (ISM-DR), (3) *Intersessional Meeting on Peacekeeping Operations* (ISM-PKO), (4) *Intersessional Meeting on Search and Rescue Co-ordination and Co-operation* (ISM-SRC), dan (5) *Workshop on Prevention of Terrorism*.

3.3.2 East Asia Summit (EAS)

Langkah ASEAN menjaga stabilitas kawasan dalam kerangka berpikir *balance of power* tidak berhenti pada pembentukan ARF tahun 1994. ASEAN bersama dengan tiga negara mitranya dalam wadah ASEAN Plus Three (APT: ASEAN, Korea Selatan, Cina, dan Jepang) bersepakat menginisiasi forum dialog strategis Asia Timur dengan nama East Asia Summit (EAS).⁵⁴ Tujuan awal pembentukan EAS adalah sebagai forum dialog strategis multilateral yang membahas isu-isu politik, keamanan, dan ekonomi regional berdasarkan kepentingan bersama dan memperhatikan tujuan-tujuan untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan ekonomi di Asia Timur.⁵⁵ Kesepakatan ini berangkat dari pemahaman tentang tantangan yang akan dihadapi oleh negara-negara di kawasan, mulai dari terorisme, perkembangan dinamis kawasan Timur Tengah, situasi keamanan Semenanjung Korea, persebaran wabah flu burung, tantangan sosio-ekonomi kawasan, kemiskinan, dan pembangunan yang akan membuatsaling ketergantungan dan dialog multilateral menjadi susah dielakkan.

Deklarasi Kuala Lumpur sebagai institusionalisasi legal EAS ditandatangani oleh enam belas negara: sepuluh negara ASEAN, Australia, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Pada KTT EAS ke-6 di Bali, 19 November 2011,

⁵⁴ East Asia Summit (EAS) digagas oleh negara-negara ASEAN Plus Three (APT) pada KTT APT ke-8 di Vientiane, Laos, November 2004. Lebih lanjut lihat "Chairman's Statement of the 8th ASEAN + 3 Summit." www.aseansec.org/16847.htm diakses tanggal 12 Februari 2012.

⁵⁵ "Kuala Lumpur Declaration on the East Asia Summit", Kuala Lumpur, 14 Desember 2005, www.aseansec.org/18098.htm diakses tanggal 12 Februari 2012.

Rusia dan AS resmi bergabung sebagai anggota EAS. Negara anggota EAS memiliki visi yang sama, yaitu penciptaan sebuah komunitas bangsa-bangsa Asia Timur yang dirancang akan sejalan dengan visi penciptaan Komunitas ASEAN. EAS diidealkan sebagai sebuah forum terbuka, inklusif, transparan, dan berorientasi keluar (*outward-looking*). EAS berusaha memperkuat norma-norma global dalam aktivitasnya dan secara praktis berlandas pada nilai-nilai yang berlaku di ASEAN. Dengan kata lain, ASEAN merupakan motor penggerak kerjasama dalam forum EAS, baik secara internal maupun dengan negara-negara lain di luar keanggotaan EAS.

Pembentukan EAS sebenarnya tidak terlepas dari kerangka berpikir konsep *balance of power*, seperti yang telah dilakukan ASEAN pada ARF sejak tahun 1994. EAS awalnya digagas Malaysia dan Cina karena kedua negara ini berharap mampu menjadi pemimpin kawasan.⁵⁶ Malaysia telah berusaha menjadi pemimpin di Asia Tenggara dengan mengusulkan inisiatif kelompok kerjasama negara-negara Asia Timur dalam wadah East Asia Economic Group atau East Asia Economic Caucus pada tahun 1990. Cina berusaha memperkuat pengaruhnya di ASEAN dengan cara membentuk ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) tahun 2002. Selain mekanisme ACFTA, Cina juga memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara ASEAN dalam berbagai kerjasama bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi. Ketika Cina mengusulkan pembentukan East Asia Community (EAC) melalui inisiatif visioner EAS tahun 2001⁵⁷, negara-negara ASEAN memandang gagasan ini sebagai usaha Cina untuk menginstitutionalisasi pengaruhnya di kawasan. ASEAN lantas mengulur inisiatif Cina dengan menunjuk East Asia Study group (EASG) sebagai badan yang akan mengkaji ulang laporan East Asia Vision Group (EAVG).

Hasil kajian EASG sebagai pengecekan ulang terhadap laporan EAVG baru dapat direalisasikan pada KTT APT ke-8 tahun 2004 di Laos dalam bentuk pernyataan bersama kepala negara bersepakat untuk melakukan KTT pertama

⁵⁶ Jae Cheol Kim, "Politics of Regionalism in East Asia: The Case of the East Asia Summit", *Asian Perspective*, Vol. 34, No. 3, 2010, pp. 113—136.

⁵⁷ "Towards an East Asian Community: Region of Peace, Prosperity and Progress," *East Asia Vision Group Report 2001*, www.mofa.go.jp/region/asia-paci/report2001.pdf diakses tanggal 26 Maret 2012.

EAS tahun 2005. Penguluran selama tiga tahun merupakan keberhasilan ASEAN dalam mengembalikan peran penggerak kerjasama dari Cina kepada ASEAN. ASEAN berhasil membuat Cina menyetujui norma dan nilai yang telah dibentuk ASEAN sebagai dasar normatif pembentukan EAS. Dengan kata lain, Cina akan memiliki peran yang tidak signifikan dalam pengaturan agenda (*agenda setting*), model keanggotaan, cakupan dan jenis isu, dan hal-hal mendasar terkait institusionalisasi komunitas Asia Timur.⁵⁸ Keberhasilan lain ASEAN terkait upaya menangkal besarnya pengaruh Cina dalam inisiatif EAS dalam masuknya tiga negara lain di luar keanggotaan APT, yaitu Australia, India, dan Selandia Baru. Hal ini tidak terlepas dari kekhawatiran Jepang yang kemudian meminta adanya perluasan keanggotaan di luar APT, meskipun Cina bersikukuh pada awal pengusualan bahwa EAS seharusnya secara institusional merupakan perpanjangan APT dengan cakupan isu kerjasama yang lebih luas. Upaya antisipasi besarnya pengaruh Cina di kawasan semakin menguat setelah AS dan Rusia resmi bergabung ke dalam EAS tahun 2011.

Pertemuan tahunan EAS sejak tahun 2005 menghasilkan *Chairman Statement* yang berisi pandangan kepala negara anggota EAS tentang berbagai isu strategis yang berkembang di kawasan. Isu strategis tidak terbatas pada masalah politik dan keamanan meskipun dua hal ini yang mendapat perhatian besar. Sedikit berbeda dengan ARF, EAS tidak memiliki situs khusus seperti halnya situs resmi ARF. Hal ini disebabkan oleh sifat pertemuan EAS yang hanya melibatkan kepala negara tanpa ada pertemuan awalan pada tingkatan menteri atau *Senior Official* negara anggotanya. Analisis lingkungan strategis kawasan, dampak sistemik dinamika kawasan terhadap negara-negara anggota atau sebaliknya, dan bagaimana kepala negara EAS menanggapi berbagai dinamika tersebut menggunakan *Chairman Statement* sejak tahun 2005 sampai dengan 2011.

⁵⁸ *Loc.Cit.*, Jae Cheol Kim, hlmn: 115—121.

BAB 4

PELIBATAN RUSIA DALAM KERANGKA KERJASAMA KEAMANAN

DI ASIA TIMUR

Pelibatan Rusia dalam kerangka kerjasama keamanan di Asia Timur setelah berakhirnya Perang Dingin dimulai saat ASEAN Regional Forum (ARF) dibentuk tahun 1994. Negara-negara peserta ARF sepakat menjadikan isu-isu politik dan keamanan di kawasan dibahas melalui konsultasi mendalam dan menghasilkan keputusan yang diambil melalui suatu konsensus. ARF dibentuk sebagai salah satu mekanisme dialog konstruktif guna menciptakan stabilitas dan keharmonisan kawasan. Keterlibatan Rusia dalam ARF merupakan bentuk aktif kebijakan luar negeri Rusia secara regional, tanpa meninggalkan hubungan bilateral dengan beberapa negara di Asia Timur. Hal ini juga menandakan bergesernya struktur sistem di kawasan dari bipolar menjadi multipolar karena tidak saja Rusia yang terlibat dalam ARF tetapi juga beberapa negara lain yang berpotensi menjadi kekuatan baru. Makna lain pelibatan Rusia dan beberapa negara ke dalam ARF adalah isu-isu politik keamanan di kawasan bukan lagi menjadi kepentingan bilateral antara dua negara melainkan menyangkut kepentingan kawasan secara komprehensif.

Forum kerjasama keamanan lain yang melibatkan Rusia di Asia Timur adalah East Asia Summit (EAS). Rusia resmi menjadi partisipan dalam EAS pada bulan November 2011. Tujuan awal pembentukan EAS adalah sebagai forum dialog strategis multilateral yang membahas isu-isu politik, keamanan, dan ekonomi regional berdasarkan kepentingan bersama dan memperhatikan tujuan-tujuan untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan ekonomi di Asia Timur.¹ Pelibatan Rusia ke dalam EAS tidak berbeda dengan ARF mengingat peran Rusia sebagai salah satu negara yang diharapkan mampu ikut menjaga stabilitas dan keharmonisan kawasan. Stabilitas dan keharmonisan

¹ "Kuala Lumpur Declaration on the East Asia Summit", Kuala Lumpur, 14 Desember 2005, www.aseansec.org/18098.htm diakses tanggal 12 Februari 2012.

kawasan diciptakan melalui pembangunan *mutual trust* yang berkelanjutan demi tercapainya kesejahteraan kawasan secara keseluruhan.

Bab ini menjelaskan profil negara Republik Federasi Rusia dan alasan pelibatan Rusia ke dalam ARF dan EAS sebagai bentuk kerangka kerjasama keamanan di Asia Timur. Alasan-alasan pelibatan Rusia dijelaskan dengan menggunakan empat indikator:

1. **Kekuatan militer.** Kekuatan militer Rusia dibandingkan dengan Cina sebagai *regional power* dan AS sebagai *maritime/global superpower*. Perbandingan ini bukan sebagai bentuk pemetaan kekuatan militer trilateral tanpa sebab tetapi sebagai hasil dinamika kawasan yang menghasilkan dampak terhadap struktur sistem di Asia Timur dan negara-negara di kawasan. Cina, Rusia, dan AS dibandingkan sebagai *great power* dalam di kawasan Asia Timur. Pengkategorian ketiga negara tersebut sebagai *great power* di Asia Timur mengikuti argumentasi Kenneth Waltz dan John Mearsheimer yang mengatakan bahwa *great power*-lah yang mampu memberikan dampak sistemik terhadap struktur sistem. Salah satu indikator kategori *great power* adalah kekuatan militer yang dimiliki negara. Rusia merupakan bekas *superpower* yang memiliki kapabilitas nuklir dan militer konvensional besar. AS merupakan *maritime/global power* yang memiliki kapabilitas nuklir dan militer konvensional terbesar di dunia saat ini. Sementara itu, Cina merupakan *rising great power* di Asia Timur yang perlahan-lahan menunjukkan afirmasi kebijakan luar negerinya dengan dukungan sektor militer. Besar kecilnya kekuatan militer Rusia menjadi alasan penting dilibatkannya negara ini ke dalam ARF dan EAS karena isu keamanan merupakan salah satu isu penting yang dibahas dalam kaitannya dengan penciptaan stabilitas kawasan.

2. **Kekuatan ekonomi.** Kekuatan ekonomi Rusia digunakan sebagai instrumen kedua untuk melihat upaya peningkatan pertumbuhan domestik dan peningkatan kapabilitas pertahannya. Sektor energi merupakan penopang pertumbuhan ekonomi Rusia dan bidang kerjasama yang
- Universitas Indonesia

dibangun oleh Rusia dengan beberapa negara di Asia Timur. Dinamika yang terjadi di kawasan akan menimbulkan dampak bagi Rusia dan negara di kawasan dalam bidang ekonomi.

3. **Kekuatan politik.** Politik dan diplomasi merupakan salah satu yang digunakan Rusia untuk mencapai tujuan dan kepentingan nasionalnya. Cara-cara diplomasi yang dilakukan Rusia, berbagai kebijakan politik yang mengikutinya, dan hasil-hasil yang menyertainya dapat memperlihatkan kekuatan Rusia sebagai kekuatan politik yang mampu memberikan pengaruh terhadap sistem. Kekuatan politik dan upaya diplomasi Rusia merupakan instrumen ketiga yang dapat dijadikan sebagai alasan penting pelibatan Rusia ke dalam ARF dan EAS.
4. **Rusia sebagai kekuatan baru.** Upaya-upaya diplomasi yang dilakukan Rusia tidak saja ditujukan untuk pemenuhan kepentingan nasional tetapi juga sebagai alat untuk pencitraan diri. Rusia ingin memberikan pemahaman baru kepada komunitas regional dan global bahwa Rusia bukanlah Uni Soviet; Rusia bukan kekuatan besar yang mengancam; Rusia ingin terlibat aktif dalam penciptaan komunitas regional dan global yang konstruktif berdasarkan norma-norma universal. Upaya-upaya diplomasi yang dilakukan Rusia sebagai pencitraan diri dapat dijadikan alasan pelibatan Rusia ke dalam ARF dan EAS.

4.1 Republik Federasi Rusia

Republik Federasi Rusia muncul dari reruntuhan Uni Soviet sebagai negara yang lama dan baru secara bersamaan. Sebagai sebuah negara federasi, Rusia muncul dalam batasan wilayah, pemerintahan, perekonomian, dan masyarakat yang baru.² Sebagai negara lama, Rusia menerima warisan elemen power dari Uni Soviet: sistem persenjataan konvensional, sistem persenjataan nuklir, dan keanggotaan dengan hak veto di DK PBB. Pemerintah Rusia yang baru dihadapkan pada dua tugas besar dalam membangun Rusia: pembangunan

² Steve D. Boilard, *Russia at the Twenty First Century*, (Orlando: Harcourt Brace & Company, 1998), hlmn. 33.

kenegaraan (*state-building*) dan pembangunan kebangsaan (*nation-building*).³ Pembangunan kenegaraan meliputi pembentukan otoritas pemerintahan yang baru dan pengembangan institusi-institusi politik. Sedangkan pembangunan kebangsaan menuntut adanya pemantapan identitas kebangsaan yang terpadu.

Proses pembangunan kenegaraan dan kebangsaan Rusia pasca-Soviet dapat dibagi menjadi dua: masa pemerintahan Boris Yeltsin dan setelahnya. Pemerintahan Boris Yeltsin ditandai dengan perebutan kekuasaan pada tingkat elite, kegagalan reformasi ekonomi, kegelisahan dan ketidakteraturan sosial, dan instabilitas domestik.⁴ Setelah Yeltsin mengundurkan diri pada akhir tahun 1999, Rusia mengalami transformasi dalam proses pembangunan kenegaraan dan kebangsaan. Vladimir Putin sebagai pengganti Yeltsin melakukan serangkaian program kebijakan yang ditujukan merestorasi kembali kejayaan Rusia. Putin lebih memfokuskan kebijakannya pada program reformasi birokrasi dan ekonomi dan pengembalian stabilitas domestik. Pada masa pemerintahannya yang kedua, tahun 2004—2008, Putin mulai memproyeksikan *power* yang dimiliki Rusia secara regional dan global. Langkah Putin dimudahkan oleh semakin membaiknya kondisi perekonomian Rusia antara tahun 2000—2004 sebagai dampak dari surplus penjualan minyak dan gas. Proyeksi *power* terus dilakukan Rusia sampai masa pemerintahan Dmitry Medvedev, tahun 2008—2012, yang ditandai dengan menguatnya peran Rusia dalam berbagai pengambilan kebijakan yang menyangkut isu-isu strategis internasional.

Rusia merupakan negara dengan luas wilayah kedaulatan terluas di dunia. Negara ini memiliki luas 17.098.242 km persegi yang membentang dari bagian barat benua Eropa sampai dengan Samudera Pasifik di Timur; dari Samudera Artik di Kutub Utara sampai dengan pegunungan Kaukasus di bagian selatan.⁵ Luas wilayah ini merupakan 76,2 persen total wilayah yang dulunya dikuasai Uni

³ *Ibid.*

⁴ Donald R. Kelley, *Politics in Russia and Successor States*, (Orlando: Harcourt Brace & Company, 1999); Archie Brown and Lilia Shevtsova. (eds.), *Gorbachev, Yeltsin, and Putin Political Leadership in Russia's Transition*, (Washington: Carnegie Endowment for International Peace, 2001); Stephen White, Richard Sakwa, and Henry E. Hale, *Developments in Russian Politics*, (New York: Palgrave Macmillan, 2011); Richard Sakwa, *Russian Politics and Society 4th ed.*, (New York: Routledge, 2008).

⁵ CIA, *The World Factbook*, www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs/html diakses tanggal 25 Mei 2012.

Soviet.⁶ Rusia berbatasan dengan empat belas negara dengan batas wilayah terpanjang adalah dengan Cina, yaitu 3.645 km di bagian selatan dan tenggara.⁷ Jumlah penduduk Rusia adalah 142.905.200 jiwa dengan konsentrasi terbesar, yakni 73 persen, berada pada perkotaan.⁸ Rusia kaya akan sumber daya alam dengan kandungan yang sangat besar, seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Selain itu, Rusia masih memiliki sumber daya mineral lain yang juga menjadi andalan, seperti biji besi, aluminium, bauksit, dan tembaga. Kekayaan alam inilah yang banyak membantu pertumbuhan ekonomi Rusia sejak tahun 2000.

Rusia baru saja memilih Presiden baru yang dilantik pada tanggal 7 Mei 2012, yaitu Vladimir Putin. Putin akan menjabat selama enam tahun ke depan berdasarkan amandemen konstitusi Rusia tentang lama jabatan presiden. Sebelumnya Putin pernah menjabat Presiden Rusia selama dua kali masa pemerintahan, yaitu pada tahun 2000—2004 dan 2004—2008. Setelah itu, selama empat tahun Putin menjabat Perdana Menteri. Selama menjabat sebagai presiden pada tahun 2000—2008, Putin selalu mengutamakan stabilitas politik dalam kebijakannya.⁹ Politik stabilitas ini dijalankan Putin dengan menggunakan payung kebijakan yang disebut “*the dictatorship of law*”. Politik stabilitas dibangun Putin untuk menciptakan pemerintahan yang solid dengan cara sentralisasi pemerintahan.

Sasaran utama Putin begitu terpilih sebagai presiden Rusia adalah penciptaan sistem birokrasi negara terpusat demi memudahkan pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan penting yang mendesak. Berbagai kebijakan Putin untuk menciptakan pemerintahan yang solid cenderung berlawanan dengan nilai-nilai demokrasi. Tetapi, langkah-langkah pragmatis harus ditempuh demi menjaga integritas negara dan jika tidak ingin kekacauan sosial di masyarakat terus berlarut-larut. Jika stabilitas dapat dicapai dan terus dipertahankan diikuti dengan kondisi perekonomian negara semakin membaik, maka Rusia perlahan-lahan akan menjadi negara maju yang setara dengan negara-negara Barat. Tidak

⁶ Richard Sakwa, *Russian Politics and Society*, 1st edition, (London: Routledge, 1994), hlmn: 38.

⁷ *Ibid.*

⁸ Russian Federation Federal State Statistic Service, www.gks.ru diakses tanggal 26 Mei 2012. Data terakhir adalah hasil sensus tahun 2010.

⁹ Stephen White, Richard Sakwa, and Henry . Hale (eds), *Development in Russian Politics*, 7th edition, (New York: Palgrave MacMillan, 2010), hlmn: 7—11.

diragukan lagi, besarnya jumlah cadangan sumber daya alam yang dimiliki Rusia berpotensi mengangkat kembali derajat bangsa ini sebagai salah satu bangsa yang harus diperhitungkan dalam tatanan politik internasional. Hal ini memang menjadi perhatian utama Putin sebagaimana tertuang dalam pidato tahunan pertamanya di hadapan parlemen pada tanggal 8 Juli 2000.¹⁰

Dalam bidang ekonomi, Rusia mengalami peningkatan signifikan selama delapan tahun dipimpin oleh Putin. Data PDB Rusia sepuluh tahun terakhir memperlihatkan peningkatan positif dari setiap tahunnya. Rusia sempat terdampak krisis finansial global tahun 2008—2009 yang membuat PDB-nya menurun tetapi tidak signifikan. Apabila dilihat dari persentase pertumbuhan ekonomi, Rusia juga memperlihatkan pertumbuhan positif meskipun tidak mencapai angka yang sangat signifikan, seperti Cina misalnya yang mampu mencapai pertumbuhan dua digit. Puncak pertumbuhan ekonomi Rusia pasca-Soviet dicapai antara tahun 2006 dan 2007, yang mampu mencapai angka delapan persen. Krisis finansial 2008—2009 membuat pertumbuhan Rusia menjadi turun sangat drastis.

Tabel 4.1 Produk Domestik Bruto Rusia dan Persentase Pertumbuhan

	Produk Domestik Bruto Rusia										
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Miliar USD	596,3	624,5	670,1	718,2	763,9	826,2	896,8	943,9	870,1	905,2	939,3
%	5,09	4,74	7,30	7,18	6,38	8,15	8,54	5,25	-7,81	4,03	3,77

Sumber: www.ers.usda.gov/data/macroeconomics/data/historicalrealgdpvalues.xls

Indikator lain membaiknya perekonomian Rusia dapat terlihat dari meningkatnya cadangan devisa dan *sovereign wealth fund* Rusia. Peningkatan ini seiring dengan surplus pemerintah Rusia dari hasil ekspor minyak bumi dan gas alam. Keuntungan ini digunakan pemerintah Rusia untuk membayar beban utang negara yang menumpuk sejak masa akhir Uni Soviet sampai dengan pemerintahan Yeltsin tahun 1999. Pemerintah Rusia juga menggunakan surplus ekspor hidrokarbon untuk belanja subsidi sosial, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pembayaran pensiun. Pengukuran terhadap peningkatan

¹⁰ *Annual Address to the federal Assembly of the Russian Federation*, Moscow, Kremlin, July 8, 2000. <http://www.kremlin.ru> diakses tanggal 24 September 2006.

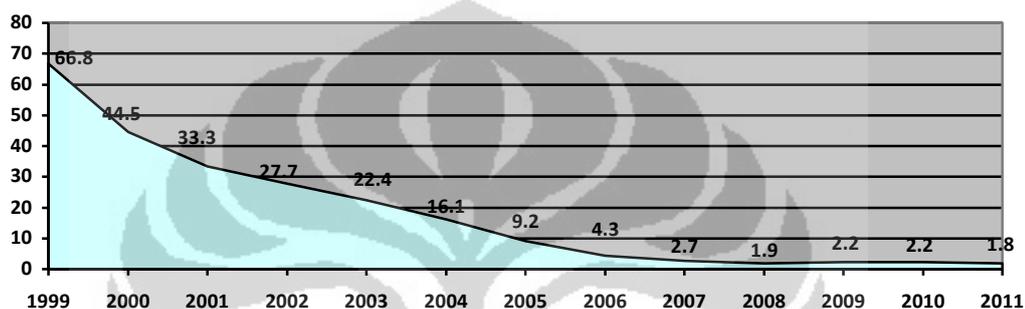
perekonomian Rusia secara keseluruhan dapat dilakukan dengan cara melihat tingkat pendapatan perkapita.

Tabel 4.2 Cadangan Devisa dan Sovereign Wealth Fund (SWF) Rusia dalam Miliar USD

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Devisa	125	168	303	476	427	439	479	499	514
SWF	19	43	89	157	225	152	114	112	152

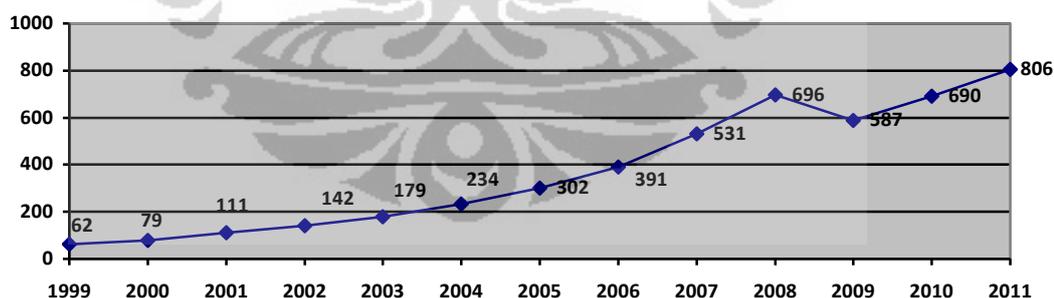
Sumber: Bank of Finland Institute for Economies in Transition, BOFIT Russia Statistic, www.bof.fi/bofit_en/seuranta/venajatilastot/

Diagram 4.1 Persentase Utang Luar Negeri Rusia terhadap PDB



Sumber: Bank of Finland Institute for Economies in Transition, BOFIT Russia Statistic, www.bof.fi/bofit_en/seuranta/venajatilastot/

Diagram 4.2 Tingkat Pendapatan Rata-rata Bulanan dalam USD



Sumber: Bank of Finland Institute for Economies in Transition, BOFIT Russia Statistic, www.bof.fi/bofit_en/seuranta/venajatilastot/

Tingkat pertumbuhan yang positif, meningkatnya cadangan devisa negara, dan naiknya tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran umum tentang perbaikan kondisi perekonomian Rusia, dan kondisi domestik secara keseluruhan. Bidang lain yang ikut terdampak membaiknya kondisi perekonomian

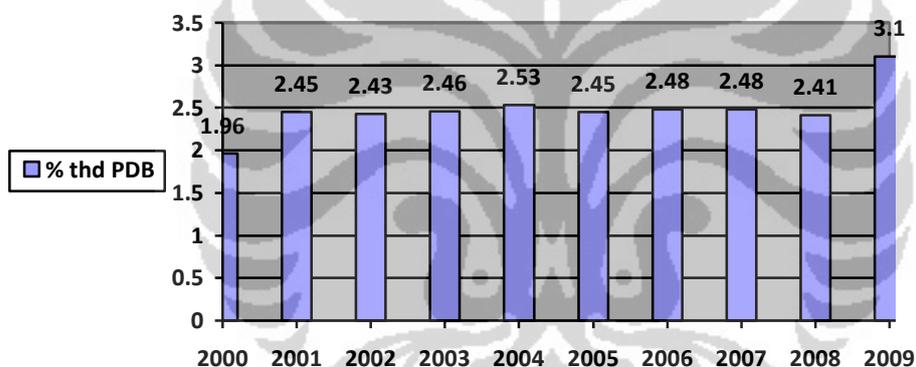
adalah militer. Rusia telah merancang modernisasi dan reformasi sektor militer sejak tahun 1990-an tetapi selalu terbentur dengan minimnya anggaran negara untuk bidang militer. Kelemahan analisis sektor pertahanan dan militer Rusia adalah terbatasnya data yang dapat diakses publik. Hal ini tercantum dalam laporan International Institute for Strategic Studies (IISS) dalam *Military Balance*. Data anggaran pertahanan Rusia antara tahun 2004—2006 tidak dapat diakses sehingga IISS hanya memberikan estimasi.

Tabel 4.3 Anggaran Pertahanan Rusia dalam miliar USD

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (est)	2013 (est)
n/a	28	43	41	38,01	50,67	55,33	70

Sumber: IISS Military Balance 2011

Diagram 4.3 Estimasi Persentase Anggaran Pertahanan Rusia terhadap PDB



Sumber: IISS Military Balance 2011

Militer Rusia telah mengalami perubahan signifikan sejak tahun 2000, yaitu pada saat Putin menjadi presiden untuk pertama kali. Berdasarkan konstitusi, Presiden Rusia merupakan pemimpin angkatan bersenjata tertinggi.¹¹ Presiden memiliki kewenangan membentuk dan membubarkan dewan keamanan negara dan menunjuk dan memberhentikan panglima angkatan bersenjata.¹² Dengan kewenangan ini, presiden Rusia sejak Yeltsin telah memikirkan program reformasi sektor pertahanan Rusia dengan sasaran utamanya adalah penciptaan

¹¹ Pasal 87 Konstitusi Republik Federasi Rusia. www.constitution.ru diakses tanggal 6 Mei 2012.

¹² Pasal 83.

angkatan bersenjata yang lebih ramping dan profesional.¹³ Yeltsin menaruh perhatiannya pada efisiensi anggaran. Jumlah besar personel dan persenjataan harus dirasionalisasi agar dapat sesuai dengan anggaran negara yang terdampak pertumbuhan ekonomi yang lambat pada tahun 1990-an. Putin lebih diuntungkan dengan membaiknya perekonomian Rusia. Putin mengagendakan reformasi sektor pertahanan untuk menciptakan angkatan bersenjata yang efisien, mampu menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional Rusia dari ancaman-ancaman baru setelah berakhirnya Perang Dingin.¹⁴

4.2 Kekuatan Militer Rusia

Rusia telah melakukan reformasi dan modernisasi sektor pertahanannya sejak masa pemerintahan Boris Yeltsin (1993—1999), dilanjutkan oleh Vladimir Putin dalam dua masa pemerintahannya (2000—2008) dan Dmitry Medvedev (2008—2012). Yeltsin memberikan penekanan pada pengurangan jumlah personel angkatan bersenjata karena berhubungan berkurangnya luas teritorial Rusia dan berkurangnya anggaran pertahanan akibat memburuknya ekonomi. Reformasi militer pada masa Putin difokuskan pada pengurangan jumlah personel dengan tujuan menciptakan angkatan bersenjata minimalis namun memiliki fleksibilitas tinggi. Sedangkan Medvedev memfokuskan reformasi militer pada persenjataan dan restrukturisasi organisasi dan personel.¹⁵ Faktor non-teknis yang menjadi perhatian Medvedev dalam mereformasi militer Rusia adalah persoalan korupsi.¹⁶ Secara keseluruhan, Medvedev menginginkan angkatan bersenjata Rusia modern yang sangat berbeda dengan Uni Soviet; perubahan radikal dari angkatan bersenjata tradisional berorientasi konflik skala besar menjadi “*fully filled*,

¹³ *Op.Cit.*, White, Sakwa, and Hale, 2010, hlmn: 254—261; Rod Thornton, “Military Modernization and the Russian Ground Forces”, *Strategic Studies Institute Monograph*, (2001)

¹⁴ *Op.Cit.*, White, Sakwa, and Hale, 2010, hlmn: 259.

¹⁵ Marcel de Haas, “Russia’s Military Reforms Victory after Twenty Years of Failure?”, *Clingendael Papers*, No. 5, (The Hague: Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’, 2011), hlmn: 5; Jim Nichol, “Russian Military Reform and Defense Policy”, (Congressional Research Service Report for Congress, 2011).

¹⁶ Dale Herspring’s similar assessment in “Is Military Reform in Russia for ‘Real’? Yes, But...,” dalam Stephen Blank and Richard Weitz, eds., *The Russian Military Today and Tomorrow: Essays in Memory of Mary Fitzgerald*, (Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, July 2010), pp. 151—191.

*sophisticated, equipped and well-trained permanent combat ready forces of (Western-style) brigade size, ready for regional power projection*¹⁷.

Reformasi sektor militer Rusia merupakan bagian dari program kebijakan pemerintah Rusia sejak tahun 1993 yang berusaha menciptakan tata kelola modern organisasi pemerintahan, khususnya di bidang pertahanan. Rusia memiliki payung hukum untuk program kebijakan sektor pertahanan berupa Konsep Keamanan Nasional (2000 dan 2009), Konsep Kebijakan Luar Negeri (1993, 2000, 2008), dan Doktrin Militer (1993, 2000, 2010). Setiap dokumen dibuat berdasarkan penilaian atas kondisi lingkungan regional dan global, bahaya, dan ancaman yang dihadapi Rusia dan bagaimana Rusia menangkal bahaya dan ancaman tersebut dalam sektor keamanan, politik luar negeri, dan militer. Dalam bidang militer, Doktrin Militer merupakan payung hukum dan bagian dari reformasi militer dalam bidang konsep, strategi, organisasi karena dokumen ini menjadi landasan bagi aplikasi program reformasi militer secara keseluruhan.

Secara teoretis, reformasi militer, dalam hal ini militer Rusia, didefinisikan sebagai: *“the sum of substantial quantitative and qualitative transformations of the military organization of the state, intended to raise its effectiveness and to bring it into accordance with changed domestic and international conditions.”*¹⁸ Pallin melanjutkan bahwa reformasi militer Rusia harus mencakup transformasi sistem komando secara nasional, modernisasi dan konversi kompleks industri militer, optimasi pelatihan mobilisasi populasi, transformasi ekonomi organ-organ sistem komando, dan perubahan fungsi setiap matra angkatan secara efisien.¹⁹ Sementara Miller menyebutkan beberapa alasan perlunya reformasi dalam tubuh militer Rusia: melemahnya kekuatan militer Rusia, kesalahan dalam pengeluaran pasukan setelah Soviet bubar, penurunan anggaran, ketidakmampuan industri memasok kebutuhan angkatan bersenjata, konsep strategi yang kuno, perlunya

¹⁷ *Loc.Cit.*, de Haas, hlmn: 5.

¹⁸ Carolina Vendil Pallin, *Russian Military Reform: A Failed Exercise in Defence Decision Making*, (New York: Routledge, 2009), hlmn: 50

¹⁹ *Ibid.*

pergeseran paradigma dari *totalitarian military* menjadi *democratic military*, dan dinamika regional.²⁰

Pemahaman konsep reformasi militer di atas dibangun atas dasar pengalaman Rusia sebagai negara besar yang tidak lagi memiliki kekuatan yang sama dengan Uni Soviet sejak awal tahun 1990-an. Beberapa aspek yang berkenaan dengan sektor pertahanan dan militer harus ikut menjadi bagian dari program reformasi jika Rusia ingin menciptakan sebuah angkatan perang baru yang profesional, sesuai dengan tuntutan zaman. Pemahaman ini tertuang dalam dokumen Doktrin Militer Republik Federasi Rusia tahun 1993, 2000, dan 2010. Putin menerjemahkan pemahaman konsep teoretis tersebut dengan merancang program reformasi militer yang bertujuan menghasilkan angkatan bersenjata yang efektif dan efisien, mampu bertempur dalam konflik skala kecil, dan didukung dengan teknologi persenjataan mutakhir.²¹

Penciptaan angkatan bersenjata modern merupakan tujuan akhir program reformasi militer Rusia. Secara umum, program reformasi dapat dibagi menjadi dua: personel dan struktur organisasi dan persenjataan. Reformasi militer di bidang personel dan struktur organisasi menyangkut rasionalisasi jumlah personel dan unit tempur. Dalam waktu sepuluh tahun terakhir terdapat penurunan jumlah personel angkatan bersenjata Rusia. Pada tahun 2012, jumlah personel angkatan bersenjata ditargetkan menjadi 1.000.000 orang. Jumlah ini merupakan gabungan dari tiga matra dan tiga satuan tempur independen²²:

- Angkatan Darat: *Сухопутные войска/Sukhoputnye Voiska* (SV)
- Angkatan Udara: *Военно-воздушные силы/Voyenno-Vozdushnye Sily* (VVS)
- Angkatan Laut: *Военно-морской флот/Voyenno-Morskoy Flot* (VMF)
- Pasukan Khusus Misil Strategis: *Ракетные войска стратегического назначения/Raketnye Voyska Strategicheskogo Naznacheniya* (RVKO)

²⁰ Steven E. Miller, "Moscow's Military Power: Russia's Search for Security in the Age of Transition", dalam Steven E. Miller and Dmitri Trenin, *The Russian Military: Power and Policy*, (Cambridge: The MIT Press, 2004), hlmn: 8—18.

²¹ *Loc.Cit.*, Thornton, 2001, hlmn: 11.

²² *Loc.Cit.*, Nichol, hlmn: 6.

- Pasukan Pertahanan Udara dan Luar Angkasa: *Войска воздушно-космической обороны/ Voyska Vozdushno-Kosmicheskoi Oborony* (VVKO)
- Pasukan Lintas Udara: *Воздушно-десантные войска/ Vozdushno-Desatnye Voyska* (VDV)²³

Tabel 4.4 Jumlah Total Personel Angkatan Bersenjata Rusia

Tahun	Jumlah Personel
2000	1.004.000
2004	1.212.700
2006	1.027.000
2008	1.027.000
2010	1.046.000

Sumber: IISS Military Balance 2001—2011

Pengurangan jumlah personel ini dirancang oleh Menteri Pertahanan Rusia Anatoly Serdyukov sebagai bagian dari program reformasi militer. Serdyukov mengumumkan program reformasinya pada pertengahan bulan Oktober 2008 mencakup empat elemen yang berkaitan dengan pengurangan personel dan restrukturisasi organisasi. Program ini ditargetkan tercapai pada tahun 2012, yaitu²⁴:

1. Pengurangan jumlah perwira tinggi militer dari 335.000 orang menjadi 150.000 orang pada tahun 2012. Penambahan jumlah perwira menengah (berpangkat letnan) dari 50.000 menjadi 50.000 orang.
2. Pengurangan jumlah unit tempur konvensional: SV dari 1.890 menjadi 172; VVS dari 340 menjadi 180; dan VMF dari 240 menjadi 123.
3. Pengurangan dan restrukturisasi jalur komando: *military district - army - division - regiment* menjadi *military district - operation command - brigade*

²³ Kementerian Pertahanan Republik Federasi Rusia www.mil.ru diakses tanggal 3 Juni 2012.

²⁴ Pavel K. Baev, "Military Reform Against Heavy Odds," dalam Anders Aslund, Sergey Guriev, and Andrew Kuchins, eds., *Russia After the Global Economic Crisis*, (Peterson Institute for International Economics, the Center for Strategic and International Studies, and the New Economic School, 2010), pp. 169—186.

4. Pengurangan jumlah akademi militer dengan menutup sebagian besar akademi militer tradisional yang terpusat di Moskwa dan membuka akademi baru di pusat-pusat komando yang baru dibentuk.²⁵

Alasan lain Medvedev dan Serdyukov melakukan program reformasi struktural adalah pengalaman Rusia dalam perang lima hari dengan Georgia bulan Agustus 2008.²⁶ Meskipun Rusia menang dalam perang tersebut, tetapi terdapat kekhawatiran bahwa Rusia akan dikelilingi oleh sistem persenjataan anti-rudal NATO. Pengalaman lainnya adalah pasukan Rusia terlihat kurang mampu menghadapi model pertempuran kota dalam skala kecil yang terjadi tidak saja di Georgia tetapi di Chechnya sejak tahun 1996. Baev menyebutkan bahwa “*The Russian-Georgian war further exposed shocking gaps in air support and command and control*”.²⁷ Dengan demikian, secara teknis, Serdyukov mengharapkan terjadinya perubahan fundamental angkatan bersenjata Rusia “. . . *from a mass mobilization army for vast land, sea, and air wars to “a performance-capable, mobile, and maximally armed army and navy ready to participate in three regional and local conflicts, at a minimum*”.²⁸

Berkaitan dengan dinamika kawasan Asia Timur dan berbagai kondisi lingkungan strategis di kawasan, reformasi di bidang militer yang dilakukan Rusia adalah perubahan struktur komando. Presiden Dmitry Medvedev pada tanggal 6 Juli 2010 mengeluarkan dekrit “*Strategic Military Territorial Formations of the Russian Federation*”.²⁹ Inti dekrit ini adalah pembentukan empat komando gabungan strategis (*joint strategic commands/JSC*) yang mewakili empat distrik militer di Rusia. Empat distrik militer baru tersebut adalah:

1. Komando Gabungan Strategis Barat, bermarkas di St. Petersburg, menggabungkan unit-unit militer yang bertempat di distrik Moskwa dan Leningrad, armada AL Baltik dan Utara, dan unit-unit lain di wilayah Kaliningrad

²⁵ *Loc.Cit.*, Nichol, hlmn: 16

²⁶ *Ibid.*, hlmn: 5—7.

²⁷ *Op.Cit.*, Baev, hlmn: 173.

²⁸ *Loc.Cit.*, Nichol, hlmn: 5.

²⁹ *Op.Cit.*, *The Military Balance 2011*

2. Komando Gabungan Strategis Selatan, bermarkas di Rostov-on-Don (Rostov na Donu), menggabungkan unit-unit distrik militer Kaukasus Utara, armada AL Laut Hitam, Kaspia, Markas Militer 102 di Gyumri (Armenia), dan markas militer di wilayah Abkhazia dan Ossetia Utara
3. Komando Gabungan Pusat, bermarkas di Yekaterinburg , menggabungkan unit-unit militer di distrik Volga-Ural, distrik militer Siberia bagian barat, Markas Militer 4 Dushanbe, Tajikistan, dan pangkalan udara di Kant, Kyrgystan
4. Komando Gabungan Strategis Timur, bermarkas di Khabarovsk, menggabungkan unit-unit militer di distrik Timur Jauh, armada AL Pasifik, dan unit-unit lain di Wilayah Khusus Kamchatka.

Penggabungan distrik militer ini, dari sebelumnya enam menjadi empat distrik, bertujuan untuk menciptakan sistem komando yang lebih terintegrasi, modern, dinamis, dan didukung teknologi mutakhir.

Gambar 4.1 Sistem Komando Gabungan 4 Distrik Militer Rusia



Sumber: IISS Military Balance 2011, hlmn: 175

Ujian pertama terhadap reformasi organisasional militer Rusia ini adalah latihan militer gabungan Vostok 2010, yang digelar pada 29 Juni sampai dengan 8 Juli 2010. Vostok 2010 merupakan latihan operasi dan strategi militer gabungan

Universitas Indonesia

terbesar Rusia pasca-Soviet yang melibatkan angkatan bersenjata matra darat, laut, dan udara.³⁰ Latihan ini menyimbolkan pergeseran perhatian pemerintah Rusia, dari sebelumnya fokus pada power politik di bagian barat menandingi NATO menjadi antisipasi dinamika kawasan timur sebagai akibat munculnya Cina sebagai kekuatan baru.³¹ Meskipun Rusia dan China telah menandatangani perjanjian persahabatan tahun 2001 dan kedua negara ini membentuk kerjasama keamanan *Shanghai Cooperation Organization* (SCO), Rusia secara rasional tetap menganggap Cina sebagai ancaman potensial. Latihan militer Vostok 2010 merupakan salah satu bentuk kewaspadaan Rusia terhadap potensi agresivitas Cina meskipun Rusia tidak pernah menyampaikan kekhawatirannya secara verbal

Rusia akan menghadapi kekuatan tradisional lain di Asia Timur selain Cina, yaitu AS. Kehadiran AS tetap dipertahankan sebagai penyeimbang bagi potensi besar kekuatan militer Cina di masa mendatang. Kemunculan Cina di Asia Timur tidak saja membuat khawatir Rusia dan AS sebagai *great power* tradisional, tetapi juga negara-negara lain di kawasan yang merespon dengan peningkatan kapabilitas pertahanan internal dan penciptaan dialog keamanan multilateral dengan tujuan penciptaan *mutual trust*. Dua bentuk respon tersebut merupakan keniscayaan yang telah terjadi di kawasan dan merupakan bentuk dampak sistemik dari kemunculan Cina.

Tabel 4.5 Perbandingan Kekuatan Militer Cina, Rusia, dan AS

	Cina		Rusia		AS	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Total Personel	2,28 jt	2,28 jt	1,03 jt	1,05 jt	1,58 jt	1,56 jt
MBT	6.550+	7.050	23.000	20.800	6.453+	5.795
AFV/APC	4.500	5.338	25.000	25.200+	26.000	19.881
Artileri	17.700	18.434	26.120	26.300+	8.137+	8.445+
Pesawat Tempur	1.907	1.998	2.000	2.300+	4.090	4.300+
Kapal Selam	65	71	66	67	71	71

³⁰ RIA Novosti, "Russian Army Reform after the Vostok-2010 Military Exercise", <http://en.rian.ru/analysis/20100709/159749435.html> diakses tanggal 26 Mei 2012.

³¹ Simon Saradzhyan, "The Role of China in Russia's Military Thinking", *Russian Analytical Digest*, No. 78, (4 May 2010).

SSBN	3	3	14	14	14	14
Kapal Perang Permukaan	80	78	57	32	110	114
Kapal Induk	-	-	1	1	11	11

Sumber: IISS Military Balance 2010—2011

Data yang disajikan IISS memperlihatkan kecenderungan peningkatan persenjataan antara Cina, Rusia, dan AS sebagai kekuatan utama di Asia Timur relatif lebih dominan pada matra udara. Peningkatan ini terlihat pada meningkatnya aktivitas ketiga negara dalam mengembangkan pesawat tempur generasi keempat dan kelima. Pada matra laut, Cina terlihat serius menambah jumlah kapal selamnya meskipun terdapat penurunan jumlah pada kapal perang permukaan. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena Cina memiliki kepentingan besar di kawasan Laut Cina Selatan. Di samping itu, Cina menyadari AS sebagai salah satu saingan yang hadir di kawasan merupakan negara dengan kekuatan maritim yang sangat kuat. Sementara untuk jenis kapal selam strategis, Cina belum mampu mengimbangi kekuatan Rusia atau AS. Data di atas memperlihatkan peta kekuatan ketiga negara secara keseluruhan berdasarkan tiga matra dalam tiga tahun terakhir.

Peta kekuatan regional yang menggambarkan dinamika di Asia Timur dapat dilihat dari penggelaran pasukan (*military deployment*) Rusia dan AS sebagai bentuk usaha penyeimbangan terhadap kemunculan Cina. Kekuatan Rusia diukur dengan mendata penggelaran kekuatannya di Komando Gabungan Strategis Timur, bermarkas di Khabarovsk, meliputi unit-unit Angkatan Darat dan Udara di distrik Timur Jauh, armada Angkatan Laut Pasifik, dan unit-unit lain di Wilayah Khusus Kamchatka. Sedangkan kekuatan AS diukur dengan mendata penggelaran kekuatannya di bawah Komando Pasifik yang memiliki markas utama di Hawaii dan beberapa markas pendukung di negara-negara Asia Timur.

Tabel 4.6 Kekuatan AS Komando Pasifik

	2006	2008	2009	2010
AD	22.000+	19.700+	19.000+	19.000+
AL				
Kapal Selam	27	26	28	31

Universitas Indonesia

Taktis				
Kapal Selam Strategis	-	9	8	8
Kapal Perang Permukaan	52	42	37	41
Kapal Induk	6	1	3	4
AU				
Pesawat Tempur	150+	200+	410+	500+

Sumber: IISS Military Balance 2007—2011.

Tabel 4.7 Kekuatan Rusia: Komando Gabungan Strategis Wilayah Timur

	2006	2008	2009	2010
AD	-	-	-	-
AL				
Kapal Selam Taktis	11	20	20	18
Kapal Selam Strategis	4	3	3	5
Kapal Perang Permukaan	8	15	15	8
Kapal Induk	-	-	-	-
AU				
Pesawat Tempur	360	316	332	319

Sumber: IISS Military Balance 2007—2011.

Tabel 4.8 Perbandingan Gelar Pasukan di Asia Timur

	Cina (overall)		Rusia (Eastern JSC)		AS (Pacific Command)	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
AD	800.000	800.000	-	-	19.000+	19.000+
AL						
Kapal Selam Taktis	65	71	20	18	28	31

Universitas Indonesia

Kapal Selam Strategis	3	3	3	5	8	8
Kapal Perang Permukaan	80	78	15	8	37	41
Kapal Induk	-	-	-	-	3	4
AU						
Pesawat Tempur	1.907	1.998	332	319	410+	500+

Sumber: IISS Military Balance 2010—2011.

Berdasarkan data di atas, tidak terlihat dampak signifikan yang saling mempengaruhi antara ketiga negara dalam hal peningkatan kapabilitas militer di Asia Timur. Meskipun demikian, Rusia dan AS telah memperlihatkan keseriusannya terhadap potensi kemunculan Cina sebagai kekuatan regional baru. Rusia telah mengubah strategi, taktik, dan rencana operasi militernya sejak tahun 2010 dan telah mencobanya dalam latihan militer Vostok 2010. AS, meskipun telah mengumumkan pengurangan anggaran pertahanan tahun 2013—2017 sebanyak 487 miliar USD, tetap memberikan perhatian besar terhadap kawasan Asia Timur dengan potensi kekuatan Cina.³² AS telah mengurangi jumlah personel militernya di kawasan Eropa, menarik mundur pasukan dari Afganistan dan Irak dan mengimbangnya dengan penambahan kekuatan udara dan laut di kawasan Asia Pasifik. Secara keseluruhan, langkah-langkah strategis Rusia, AS, dan Cina memperlihatkan dinamika sistem kawasan Asia Timur yang saling berkaitan dan menimbulkan dampak, baik terhadap sistem maupun terhadap negara-negara di kawasan.

Unsur kedua program reformasi militer Rusia yang dilakukan Serdyukov adalah reformasi di bidang persenjataan. Program ini telah berlangsung sejak masa pemerintahan Yeltsin dan memiliki nama Program Pengembangan Persenjataan (*Государственная программа развития вооружений/ Gosudarstvennaya programma razvitiya vooruzeniy [GPV]*). GPV pada masa

³² Department of Defense United States of America, *Defense Budget Priorities and Choices*, January 2012.

Yeltsin menargetkan peningkatan kapabilitas persenjataan untuk tahun anggaran 1996--2005.³³ Program ini tidak dapat berjalan sesuai rencana diakibatkan oleh krisis finansial yang melanda Rusia tahun 1998. Pada tahun 2002 Putin melanjutkan program GPV-2010 dengan memberikan penekanan pada penambahan jumlah persenjataan. Anggaran pertahanan difokuskan untuk pembelian persenjataan sementara anggaran untuk program penelitian dan pengembangan dikurangi. Pada tahun 2006 Putin melanjutkan reformasi persenjataan dengan GPV-2015 yang mencakup tahun anggaran 2007—2015. GPV-2015 menargetkan pada tahun 2025 angkatan bersenjata Rusia akan memiliki rasio persenjataan modern 70 persen berbanding 30 persen persenjataan kuno dengan proses pergantian sebanyak 5,5 persen jumlah persenjataan per tahun.³⁴

GPV-2015 tidak dapat berjalan sesuai target karena terjadinya kesalahan alokasi anggaran.³⁵ Jenis persenjataan yang menjadi fokus GPV-2015 adalah sistem persenjataan nuklir. GPV-2015 menargetkan pada tahun 2020 Rusia menambah jumlah misil Topol-M berbasis darat, kapal selam ICBM Bulava, dan pesawat pembom strategis. Perhatian terhadap penambahan jumlah persenjataan konvensional tetap diberikan dalam GPV-2015 dalam bentuk penambahan main battle tank, armored personnel carrier, pesawat tempur, helikopter tempur, dan sistem anti-rudal. Namun terdapat perbedaan pendapat antara Putin dengan Menteri Pertahanan Rusia saat itu, Sergey Ivanov, target utama yang ingin dicapai: pemutakhiran sistem persenjataan nuklir atau konvensional.³⁶

Medvedev melakukan koreksi terhadap GPV terdahulu dengan menargetkan program baru GPV-2020 yang akan dilaksanakan antara tahun 2011 sampai dengan 2020. Target yang ingin dicapai Medvedev tidak berbeda dengan Putin, yaitu modernisasi tujuh puluh persen sistem persenjataan.³⁷ Medvedev

³³ *Loc.Cit.*, de Haas, hlmn: 13.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Dmitry Gorenburg, "Russia's State Armaments Program 2020: Is the Third Time the Charm for Military Modernization?", *PONARS Eurasia Policy Memo*, No. 125, www.ponarseurasia.org diakses tanggal 3 Juni 2012.

menargetkan modernisasi sembilan sampai sebelas persen persenjataan per tahun selama sepuluh tahun. Awalnya pemerintah Rusia akan menggunakan anggaran sebesar 13 triliun rubel untuk memenuhi target 2011—2020. Angka ini kemudian dikoreksi oleh Vladimir Popovkin, Deputi Pertama Menteri Pertahanan, yang menaikkan anggaran sebesar lima puluh persen menjadi dua puluh triliun rubel.³⁸ Perhatian utama GPV-2020 adalah peningkatan kapabilitas sistem persenjataan angkatan udara sementara angkatan darat dan laut mendapatkan perhatian lebih sedikit.³⁹

Tabel 4.9 Target Modernisasi GPV-2020 Berdasarkan Persenjataan

Angkatan Udara	<ul style="list-style-type: none"> • Pesawat tempur generasi ke-5 (T-50 PAK FA): 10 unit antara tahun 2013—2015; 50--60 unit antara tahun 2016—2020 • Pesawat pengebom jarak jauh generasi terbaru (PAK DA): desain tahun 2010, prototype tahun 2015, dioperasikan tahun 2020 • Pesawat tempur generasi ke-4 Su-35BM: 48 unit antara tahun 2010—2015 • Pesawat tempur-pengebom Su-34: 32 unit antara tahun 2015—2020. • Pesawat tempur MiG-35: dalam proses pengembangan, unit pertama dioperasikan tahun 2013 • Pesawat latih Yak-130: 150 unit antara tahun 2015—2020, 10 unit akan dimodernisasi antara tahun 2011—2020 • Pesawat angkut An-124: 10 unit antara tahun 2015—2020, 10 unit akan dimodernisasi antara tahun 2011—2020 • Pesawat angkut An-70: 60 unit antara tahun 2011—2020 • Helikopter angkut Mi-26: data untuk jumlah unit tidak tersedia
Sistem Pertahanan Udara dan Kekuatan Misil	<ul style="list-style-type: none"> • Melanjutkan pengadaan sistem pertahanan udara misil S-400: target 23 resimen tahun 2015 dengan kepemilikan 8 sampai 12 misil per resimen • Pengembangan misil S-500: 2013 diharapkan dapat

³⁸ “Russia To Assign Trillions for Strategic Nuclear and Ground Forces”, http://english.pravda.ru/russia/economics/21-07-2010/114313-strategic_nuclear_forces-0/ diakses tanggal 2 Juni 2012.

³⁹ *Loc. Cit.*, Gorenburg, hlmn: 2

	<p>diproduksi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pantsir-S1, misil jarak dekat permukaan ke udara: 10 unit telah beroperasi sejak tahun 2010, penambahan 200 unit sampai dengan tahun 2016 • Pengembangan Misil Topol-M (SS-27) dengan 3 sampai 4 MIRV, menggantikan SS-18 dan SS-19 (ICBM) • Pengembangan RS-24 ICBM
Angkatan Laut	<p>Kapal Selam</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelas Borei (SSBN): 1 unit selesai uji coba tahun 2010, 3 unit dalam proses konstruksi, • Kelas Yasen (<i>multi-purpose attack submarine</i>): 1 unit beroperasi tahun 2010, 5 unit diharapkan beroperasi tahun 2020 • Kelas Lada (diesel): 1 unit beroperasi tahun 2010, 7 unit diharapkan beroperasi tahun 2020 • Kelas Kilo (modifikasi): antisipasi terhadap kegagalan pengembangan kelas Lada, 3 unit beroperasi di Armada Baltik <p>Kapal Permukaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kapal Induk: dalam proses desain, tahun 2020 diharapkan beroperasi • Kapal Serang Amfibi Kelas Mistral: 2 unit telah dibeli dari Prancis, 2 unit dibangun di Rusia dengan lisensi • <i>Landing ship</i> kelas Ivan Gren: 5 unit beroperasi tahun 2020 • <i>Destroyer</i>: 1 unit berkapasitas 10.000 ton akan dibangun tahun 2013, 3 unit diharapkan selesai dibangun tahun 2020, dalam 20 tahun ke depan diharapkan selesai 10 kapal • Frigate kelas Admiral Gorshkov: 2 unit dalam proses konstruksi, 6 unit diharapkan selesai sampai dengan tahun 2020, 20 unit diharapkan selesai sampai dengan 20 tahun mendatang • Frigate kelas Krivak IV: empat unit akan dipersiapkan sebagai antisipasi gagalnya konstruksi frigate kelas Admiral Gorshkov • Korvet kelas Steregushchii: 1 unit beroperasi tahun 2007, 1 unit tahun 2010, 3 unit diharapkan selesai tahun 2013, sepuluh unit diharapkan selesai tahun 2020 untuk melengkapi target 20 unit • Modernisasi kapal jelajah (<i>cruiser</i>) kelas Kirov dan Slava
Angkatan Darat	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana pembelian <i>main battle tank</i> T-90: data jumlah tidak tersedia • <i>Light armored vehicle</i> buatan Italia: data jumlah tidak

	<p>tersedia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem peluncur roket (<i>multiple rocket launcher system</i>) menggantikan BM-30 Smerch • Sistem misil anti-tank • Artileri mekanis • Rencana pembelian rudal balistik Iskander: data jumlah tidak tersedia • Modernisasi sistem navigasi dengan sistem satelit GLONASS
--	--

Sumber: Dmitry Gorenburg, "Russia's State Armaments Program 2020: Is the Third Time the Charm for Military Modernization?", *PONARS Eurasia Policy Memo*, No. 125, www.ponarseurasia.org; de Haas 2011, hlmn: 23.

GPV-2020 merupakan proyeksi sistem persenjataan yang ditargetkan Rusia sampai dengan tahun 2020. Komposisi persenjataan di atas memperlihatkan bahwa Rusia berusaha mengimbangi tren pengembangan sistem persenjataan global yang berfokus pada pesawat tempur generasi ke-4 dan ke-5. Pada matra laut, Rusia berusaha memperkuat persenjataan strategis dan konvensional permukaan. Rusia menargetkan memiliki paling tidak empat kapal induk sampai dengan tahun 2020. Hal ini menandakan target fleksibilitas yang ingin dicapai. Dalam pengembangan persenjataan matra darat, Rusia sedang memodernisasi sistem navigasi satelit GLONASS untuk mengimbangi dominasi GPS yang digunakan militer negara-negara anggota NATO. Modernisasi ini juga menandakan adanya target Rusia untuk memperbaiki sistem komunikasi, komando, dan kontrol angkatan bersenjata. Minimnya penambahan jumlah tank tempur menunjukkan bahwa Rusia mulai meninggalkan model bertempur skala besar dan bergeser ke arah pembentukan pasukan dalam skala kecil untuk mengantisipasi model pertempuran perkotaan dan skala kecil.

Rusia masih mengandalkan sistem persenjataan nuklir sebagai instrumen *deterrence* selain memodernisasi sistem persenjataan konvensional. Nuklir sebagai senjata strategis terus mengalami modernisasi. Hal ini terlihat pada pengembangan misil balistik Topol-M (SS-27) yang menggunakan sistem MIRV pada hulu ledaknya. Proses modernisasi ini diikuti oleh pengembangan kendaraan pengangkut misil, yaitu berupa kapal selam dan pesawat pembom jarak jauh.

Universitas Indonesia

Kedua unsur ini, misil dan kendaraan pengangkut, merupakan bagian utuh sistem persenjataan nuklir sebagai senjata strategis yang menempatkan Rusia sebagai *great power*. Meskipun sangat dihindari untuk digunakan, senjata strategis dapat menaikkan daya tawar sebuah Rusia dalam struktur keamanan sebuah sistem. Tujuan akhir Rusia memodernisasi sektor militernya adalah memproyeksikan kekuatan ke berbagai wilayah untuk pemenuhan kepentingan nasionalnya.

Asia Timur merupakan salah satu kawasan yang menjadi perhatian Rusia. Kawasan ini akan menjadi tempat Rusia memproyeksikan kekuatan militernya setelah Eropa. Hal ini terbukti dengan dua hal: Rusia menciptakan empat komando strategis gabungan dan Rusia melakukan latihan militer gabungan di wilayah timur. Empat komando strategis gabungan (Barat, Timur, Selatan, dan Tengah) yang dibentuk kementerian pertahanan Rusia pada tahun 2009 memperlihatkan preferensi Rusia terhadap potensi bahaya dan ancaman eksternal. Komando strategis gabungan Barat memiliki pengertian bahwa sumber ancaman Rusia masih datang dari arah Eropa, yaitu kekuatan NATO. Secara tradisional, NATO masih sumber ancaman utama Rusia. Hal ini dapat dilihat dari tiga dokumen strategis: Konsep Keamanan Nasional, Konsep Kebijakan Luar Negeri, dan Doktrin Militer. Fakta lain yang mendukung argumentasi ini adalah penggelaran pasukan (*military deployment*) Rusia terpusat di wilayah barat berdasarkan jumlah dan jenis persenjataan.

Tabel 4.10 Penggelaran Pasukan dan Persenjataan Rusia tahun 2010

	Western	Central	Southern	Eastern
AD	Comd 2 army HQ Tk 2 bde MR 5 bde SF 2 (Spetsnaz) bde; 1 (AB Recce) bn AB 3 (VdV) div Arty 2 bde AD 2 bde MRL 1 bde SSM 1 bde with <i>Iskander-M/Tochka</i> (SS-21 <i>Scarab</i>); 2 bde with <i>Tochka</i> (SS-21 <i>Scarab</i>)	Comd 2 army HQ Tk 1 bde MR 1 div (201 st); 7 bde SF 1 (Spetsnaz) bde AB 1 (VdV) bde Arty 1 bde AD 2 bde MRL 1 regt SSM 2 bde each with <i>Tochka</i> (SS-21 <i>Scarab</i>)	Comd 2 army HQ Recce 1 bde MR 7 bde; 3 (lt/mtn) bde; 2 bde (Armenia); 1 bde (Abkhazia); 1 bde (South Ossetia) SF 2 (Spetsnaz) bde Air Aslt 1 bde AB 1 (VdV) div Arty 1 bde MRL 1 bde; 1 regt SSM 1 bde with <i>Tochka</i> (SS-21 <i>Scarab</i>)	Comd 4 army HQ Tk 1 bde MR 10 bde SF 2 bde Air Aslt 2 bde Arty 4 bde AD 4 bde MRL 2 bde SSM 3 bde each with <i>Tochka</i> (SS-21 <i>Scarab</i>) MGA 1 div
AL	NORTHERN AND BALTIC FLEET SUBMARINES 43 STRATEGIC 9 SSBN TACTICAL 23: 3	-	BLACKSEA FLEET AND CASPIAN FLOTILLA SUBMARINES •	PACIFIC FLEET SUBMARINES 23 STRATEGIC 5 SSBN (of which one in reserve)

	SSGN; 13 SSN; 10 SSK SUPPORT 8: 7 SSAN (other roles); 1 SSA PRINCIPAL SURFACE COMBATANTS 16: 1 CV; 1 CGHMN; 1 CGHM; 9 DDGHM (of which 1 in refit); 2 FFGHM; 1 FFGM; 1 FFM		TACTICAL 1 SSK (also 1 <i>Som</i> (<i>Tango</i>) in reserve) PRINCIPAL SURFACE COMBATANTS 6: 2 CGHM (1 in reserve awaiting decommissioning); 1 DDGM; 3 FFGM	TACTICAL 18: 5 SSGN; 4 SSN; 9 SSK PRINCIPAL SURFACE COMBATANTS 8: 1 CGHM; 7 DDGHM
AU	AIRCRAFT BBR 39 Tu-22M <i>Backfire C</i> FTR 18 Su-33 <i>Flanker</i> D; 109 Su-27 <i>Flanker</i> ; 41 MiG-31 <i>Foxhound</i> ; 34 MiG-31 <i>Foxhound</i> ; FGA 29 Su-24/Su- 24MR <i>Fencer</i> ; 36 MiG- 29SMT <i>Fulcrum</i> ; 6 MiG-29UB <i>Fulcrum</i> ; 28 Su- 24MM2 <i>Fencer</i> ATK 57 Su-25UTG <i>Frogfoot</i> ASW 13 Tu-142MMR <i>Bear F/J</i> ISR 8 MiG-25RB <i>Foxbat*</i> ; 4 An-30 <i>Clank</i> ; 14 Su-24MR <i>Fencer*</i> MP 14 Il-38 <i>May*</i> TPT 12+ An-12 <i>Cub/An-24 Cokel/An-26</i> <i>Curl</i> HELICOPTERS ATK 59 Mi-24 <i>Hind</i> ASW Ka-27 <i>Helix A</i> EW 10 Mi-8 TPT Ka-29 <i>Helix B</i> ; 48Mi-8 <i>Hip</i> AD • SAM 600; SAM 525 incl S-300V	AIRCRAFT FTR 73 MiG-31 <i>Foxhound</i> TPT 36 An-12/An-26 <i>Curl/Tu-134 Crusty</i> HELICOPTERS ATK 24 Mi-24 <i>Hind</i> TPT 46: 6 Mi-26 <i>Halo</i> ; 40 Mi-8 <i>Hip</i> AD • SAM S-300	AIRCRAFT FTR 118: 60 MiG-29 <i>Fulcrum</i> ; 58 Su-27 <i>Flanker</i> FGA 82 Su-24 <i>Fencer/Su-24MR</i> ATK 77 Su-25 <i>Frogfoot</i> ISR 14 Su-24MR <i>Fencer*</i> MP 15 Be-12 <i>Mail*</i> TPT 12 An-12 <i>Cub</i> (MR/EW); An-26 HELICOPTERS ATK 24 Mi-24 <i>Hind</i> ASW Ka-27 <i>Helix</i> TPT • Medium Mi-8 <i>Hip</i> (MP/EW/Tpt); 72 Heavy 10 Mi-26 <i>Halo</i> Medium 28 Mi-8 <i>Hip</i>	AIRCRAFT BBR 17 Tu-22M <i>Backfire C</i> FTR 44 MiG-31 <i>Foxhound</i> ; 60 MiG-29 <i>Fulcrum</i> ; FGA 173: 115 Su-24M <i>Fencer</i> ; 10 Su-24M2 <i>Fencer</i> ; 48 Su-27SM <i>Flanker</i> ATK 72 Su-25 <i>Frogfoot</i> ISR 28 Su-24MR <i>Fencer-E*</i> ASW 14 Tu-142MMR <i>Bear F/J</i> MP 15 Il-38 <i>May</i> TPT 22An-12 <i>Cub</i> (MR/EW); An-26 <i>Curl</i> ; 1 Tu- 134 <i>Crusty</i> ; 1 Tu-154 <i>Careless</i> HELICOPTERS ATK 24 Mi-24 <i>Hind</i> ASW Ka-27 <i>Helix</i> TPT • Medium Ka-29 <i>Helix</i> ; Mi-8 <i>Hip</i> ; 48 Heavy 4 Mi-26 <i>Halo</i> Medium 56 Mi-8 <i>Hip</i> AD • SAM S-300P

Sumber: IISS Military Balance 2011. Catatan: satu divisi berjumlah 8.000—14.000 personel; satu brigade berjumlah 4.500—6.500 personel

Fokus pertahanan Rusia yang kedua adalah wilayah timur. Hal ini terlihat dari jumlah dan jenis persenjataan yang digelar di bawah Komando Strategis Gabungan Timur. Kesiapan komando timur telah diuji dengan penggelaran latihan militer Vostok 2010 yang dilakukan pada bulan Juni sampai Juli tahun 2010. Pemusatan kedua di wilayah timur ini tidak terlepas pula dari dinamika kawasan Asia Timur yang menyimpan potensi kerjasama dan sekaligus konflik bagi Rusia dengan negara-negara di kawasan. Rusia masih memiliki persoalan perbatasan dengan Jepang di kepulauan Kuril. Rusia dan Jepang tidak pernah terlibat dalam konflik senjata terbuka dalam proses penyelesaian sengketa ini meskipun Rusia

mulai menunjukkan agresivitasnya. Hal ini terlihat dari kunjungan presiden Rusia, Dmitry Medvedev ke pulau Kunashir, bagian selatan kepulauan Kuril, pada tanggal 1 November 2010.⁴⁰ Kunjungan Medvedev ini merepresentasikan gestur politik luar negeri Rusia yang afirmatif dan mengundang protes dari pihak Jepang berupa *temporarily recall* duta besar Jepang untuk Rusia, Masaharu Kono.⁴¹

Dinamika lain yang dihadapi Rusia di Asia Timur adalah kemunculan Cina sebagai *regional great power* baru. Kemunculan Cina ditandai dengan peningkatan kapabilitas ekonomi yang linear dengan militer. Anggaran militer Cina menunjukkan kenaikan yang stabil di atas sepuluh persen sejak tahun 2000. Pada tahun 2011, anggaran militer Cina adalah 601,1 miliar Yuan atau setara dengan 94,5 miliar Dolar AS.⁴² Jumlah ini menempatkan Cina di posisi kedua negara dengan anggaran militer terbesar di duni setelah AS. Peningkatan anggaran militer Cina diikuti dengan modernisasi sistem persenjataan ketiga matra.

Kemunculan Cina sebagai *regional great power* baru di Asia Timur membuat Rusia sedikit khawatir meskipun tidak ada pernyataan resmi pemerintah Rusia yang menunjukkan rasa kekhawatiran tersebut. Latihan militer bagungan Vostok 2010 merupakan bentuk kekhawatiran Rusia yang ditampilkan dalam bentuk uji kesiapan Komando Strategis Gabungan Timur. Jumlah dan jenis persenjataan yang digelar di komando timur juga mewakili kesiapan Rusia terhadap kemungkinan yang muncul dari agresivitas Cina di kemudian hari. Meskipun demikian, Rusia dan Cina tetap berusaha menjaga hubungan baik secara bilateral. Hal ini terbukti dengan pembentukan organisasi keamanan intergovernmental Shanghai Cooperation Organization (SCO) tahun 2001. Rusia-Cina telah menandatangani *friendship treaty* bersamaan dengan pembentukan SCO.⁴³ Kedua negara juga telah menandatangani perjanjian tidak saling

⁴⁰ "Russia's Medvedev Arrives in Kuril Islands" <http://en.rian.ru/world/20101101/161158991.html> diakses tanggal 2 Juni 2012.

⁴¹ "Medvedev's Trip to Disputed Kuril Islands Sparks Russian-Japanese Diplomatic Row" <http://en.rian.ru/world/20101102/161178283.html> diakses tanggal 2 Juni 2012.

⁴² IISS Military Balance 2011.

⁴³ Simon Saradzhyan, "The Role of China in Russia's Military Thinking", *Russian Analytical Digest*, No. 78, (4 May 2010). SCO beranggotakan Cina, Rusia, Kazakhstan, Kyrgystan, Uzbekistan, dan Tajikistan.

menggunakan senjata nuklir pada tahun 1992.⁴⁴ Negara-negara anggota SCO pun terlibat aktif dalam gelar latihan militer gabungan. Bulan Juni 2012 SCO menjadwalkan latihan militer dengan sandi “*Peace Mission 2012*” di Tajikistan. Satu-satunya sumber ancaman nyata bagi Rusia di masa mendatang berkaitan dengan kemunculan Cina adalah wilayah Timur Jauh dan Siberia yang kaya akan energi. Cina sebagai negara industri manufaktur akan terus mencari sumber energi baru untuk mendukung proses produksi domestiknya. Bukan tidak mungkin kehadiran Cina di wilayah Timur Jauh dan Siberia akan menjadi sumber ancaman bagi Rusia.

4.3 Kekuatan Ekonomi Rusia

Rusia mengalami transformasi sistem perekonomian dari model terpusat menjadi terbuka dalam dua tahap. Tahap pertama tahun 1991—1999 ditandai dengan kegagalan program reformasi ekonomi yang dijalankan pemerintahan Boris Yeltsin. Yeltsin menginginkan transformasi cepat perekonomian (*shock therapy*) dengan menggunakan metode stabilisasi, liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi.⁴⁵ Dalam enam tahun implementasinya, antara tahun 1992—1998, kebijakan *shock therapy* ternyata tidak berhasil. Joseph E. Stiglitz menyebutkan bahwa kaum reformis Rusia terlalu mengandalkan model-model ideal dalam buku-buku teks ekonomi tentang sebuah sistem ekonomi berorientasi pasar.⁴⁶ Para reformis mengabaikan faktor-faktor lain, seperti kondisi sosial masyarakat, kondisi institusi dan infrastruktur perekonomian Rusia, dan juga faktor kesejarahan dan budaya masyarakat Rusia yang telah terbiasa dengan model ekonomi terpusat. Puncak kegagalan reformasi ekonomi Rusia dekade 1990-an adalah ketidakmampuan Rusia menahan dampak krisis finansial Asia Timur yang mengakibatkan perekonomian Rusia semakin menurun.⁴⁷

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Richard Sakwa, *Russian Politics and Society 4th ed.*, (New York: Routledge, 2008), hlmn: 290.

⁴⁶ Joseph E. Stiglitz, *Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-lembaga Keuangan Internasional*, terj, Ahmad Lukman, (Jakarta: Ina Publikatama, 2003). Lihat Bab 6: Siapa yang Menjerumuskan Rusia dan Bab 7: Ketidakadilan Aturan-aturan Perdagangan dan Kejahatan Lainnya, untuk pemahaman lebih lanjut tentang kegagalan program reformasi ekonomi di Rusia.

⁴⁷ Anders Aslund, *Russia's Capitalist Revolution: Why Market Reform Succeeded and Democracy Failed*, (Washington DC: Peterson Institute for International Economics, 2007)

Tahap kedua adalah penguatan peran negara dalam pengaturan sistem ekonomi. Tahap ini ditandai dengan model generasi kedua program reformasi ekonomi yang dirancang oleh tim ekonomi Putin. Tujuan reformasi Putin adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi sampai delapan persen per tahun melalui reformasi perpajakan, reformasi perbankan, deregulasi, privatisasi, reformasi sektor sosial, penggabungan diri ke WTO, reformasi sistem peradilan, dan reformasi pemerintahan.⁴⁸ Bersamaan dengan program reformasi tersebut, langkah penting yang dibuat pemerintahan Putin adalah renasionalisasi perusahaan-perusahaan strategis yang sebelumnya diprivatisasi oleh pengusaha kaya. Sejumlah perusahaan yang berhasil direnasionalisasi negara sejak tahun 2004: Yuganskneftegaz dan Yukos diakuisi oleh Rosneft (minyak bumi), Sibneft (minyak bumi), Gazprom (gas bumi), United Heavy Machineries (engineering), Power Machines (engineering), AvtoVAZ (otomotif), RusHydro, Mosenergo (energi); Sberbank, Vneshtorgbank, Bank of Moscow (perbankan), dan Rostelekom (telekomunikasi).⁴⁹ Besarnya kepemilikan saham negara dalam sebagian besar perusahaan strategis telah memunculkan sebuah istilah baru, yaitu *state capitalism*.⁵⁰ Rangkaian program reformasi dan renasionalisasi perusahaan strategis menjadi kunci keberhasilan Rusia meningkatkan pertumbuhan ekonominya sejak tahun 2000.

Kemampuan Rusia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2000 didukung oleh surplus hasil ekspor sektor energi (minyak dan gas bumi). Pada tahun 2005, sektor energi menyumbang 30 persen terhadap PDB Rusia. Ekspor minyak dan gas bumi menyumbang 56 persen total ekspor Rusia pada tahun yang sama. Pada tahun 2010 sumbangan sektor energi terhadap PDB tetap pada angka 30 persen sementara sumbangan minyak dan gas bumi terhadap total ekspor meningkat menjadi 59 persen.⁵¹ Besarnya sumbangan minyak dan gas

⁴⁸ *Ibid.*, hlmn: 215.

⁴⁹ Carsten Prenger, "State-Owned Enterprises in Russia", (ICEF, Higher School of Economics, 2008).

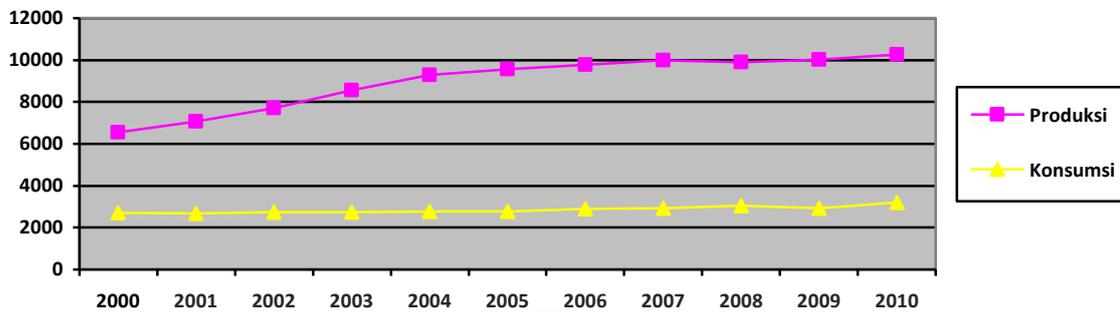
⁵⁰ "State Capitalism", Special Report, *The Economist* edisi 21 Januari 2012.

⁵¹ *BOFIT Weekly*, 27 January 2012,

http://www.suomenpankki.fi/bofit_en/seuranta/viikkokatsaus/Documents/w201204.pdf diakases tanggal 29 Mei 2012.

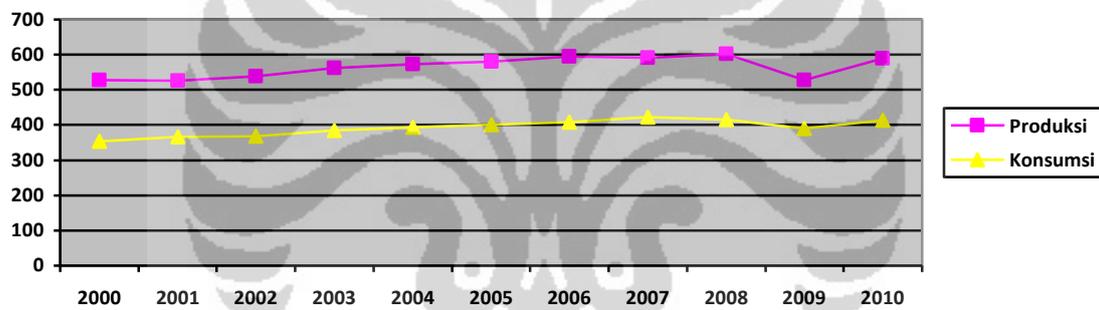
bumi terhadap PDB Rusia tidak terlepas dari besarnya cadangan minyak dan gas bumi dan tingkat produksi tahunan.

Diagram 4.4 Produksi dan Konsumsi Minyak Bumi Rusia (ribu barel/hari)



Sumber: BP Statistical Review of World Energy June 2011

Diagram 4.5 Produksi dan Konsumsi Gas Bumi Rusia (billion cubic metres [bcm]/hari)



Sumber: BP Statistical Review of World Energy June 2011

Tabel 4.11 Cadangan Minyak Bumi Rusia (dalam juta ton)

Region	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Urals federal district	1,152.0	1,146.0	1,261.1	1,303.1	1,461.6	1,400.1
Northwestern federal district	2.1	13.5	14.2	15.7	16.9	17.3
Southern and North Caucasian federal districts	3.5	4.5	5.4	8.8	9.7	10.6
Privolzhsky federal district	118.6	134.3	133.9	133.3	145.1	144.5
Siberian federal district	31.3	38.5	44.6	47.6	58.3	61.9
Far East federal district	2.7	2.7	3.3	45.8	46.0	51.1
Shelf	47.3	47.4	47.4	47.4	47.4	47.4
Total	1,357.5	1,386.9	1,509.9	1,601.7	1,785.0	1,732.9

Sumber: Gazprom in Figures Factbook 2005—2009 dan 2006—2010

Tabel 4.12 Cadangan Gas Bumi Rusia (dalam bcm)

Region	2005	2006	2007	2008	2009	2010
--------	------	------	------	------	------	------

Universitas Indonesia

Urals federal district	22,341.2	21,937.3	21,514.1	24,265.2	24,390.6	23,566.8
Northwestern federal district	94.2	93.2	93.3	92.2	90.4	89.3
Southern and North Caucasian federal districts	2,616.6	2,594.8	2,581.8	2,569.0	2,560.7	2,545.4
Privolzhsky federal district	830.4	810.6	792.8	774.7	758.5	751.3
Siberian federal district	303.9	295.0	275.5	291.7	284.7	308.3
Far East federal district	8.8	8.8	22.0	401.7	402.2	456.6
Shelf	2,935.6	4,114.5	4,505.9	4,728.7	5,091.3	5,334.6
Total	29,130.7	29,854.2	29,785.4	33,123.2	33,578.4	33,052.3

Sumber: Gazprom in Figures Factbook 2005—2009 dan 2006—2010

Pemerintah Rusia pada tahun 2010 menerbitkan Strategi Energi 2030 sebagai dokumen strategis yang mendasari kebijakan energi Rusia. Kebijakan energi sampai dengan tahun 2030 bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan secara efektif sumber daya energi dan potensi sektor energi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, dan mempromosikan penguatan posisi Rusia pada lingkungan ekonomi global.⁵² Strategi Energi menargetkan peningkatan produksi minyak dan gas bumi sampai 530—535 juta ton per tahun. Namun demikian, sebagai sektor strategis, pemerintah Rusia menempatkan sektor energi sebagai rahasia negara berdasarkan Undang-Undang Negara Federasi Rusia No.54-85-1 tahun 1993.⁵³ Dengan demikian, segala informasi menyangkut cadangan, ekstraksi, produksi, dan konsumsi sumber daya alam tidak akan pernah dibuka kepada publik oleh negara Rusia.

British Petroleum (BP) membuat estimasi bahwa Rusia merupakan negara dengan cadangan minyak bumi terbesar ke-8 di dunia (5,6% cadangan minyak dunia) jika dibandingkan dengan tiga negara teratas: Arab Saudi (19,8%), Iran (10,3%), dan Irak (8,6%).⁵⁴ Berdasarkan kalkulasi BP, jika Rusia

⁵² Ministry of Energy of the Russian Federation, *Energy Strategy of Russia for the Period up to 2030*, (Moscow, 2010).

⁵³ Yulia Grama, "The Analysis of Russian Oil and Gas Reserves", *International Journal of Energy Economics Policy*, Vol. 2, No. 2 (2012), pp.82—91. www.econjournals.com diakses tanggal 3 Juni 2012.

⁵⁴ *Ibid.*, hlmn: 84.

mempertahankan volume produksi tahunannya, maka cadangan minyak bumi Rusia akan menipis dalam 21,3 tahun dan cadangan gas bumi dalam 81 tahun.⁵⁵ Kalkulasi ini dibantah oleh Menteri Energi Rusia, Sergey Smatko, yang mengatakan bahwa cadangan minyak bumi Rusia akan dapat bertahan selama 40 tahun mendatang dengan kapasitas produksi berdasarkan Strategi Energi 2030.⁵⁶

Tabel 4.13 Tujuan Ekspor Minyak Bumi Rusia Berdasarkan Wilayah

Wilayah	2001	2003	2005	2007	2009	2010
Eropa	71	71	79	77	75	75
Asia Timur	3	3	4	10	11	15
CIS	8	11	8	7	7	4
Baltik	6	5	4	2	2	1
Lain-lain	13	10	5	4	6	5

Sumber: *Russian Oil Destination* wwwstratfor.com

Rusia mengekspor minyak bumi terbesar ke wilayah Eropa, diikuti Asia Timur, negara-negara CIS, negara-negara Baltik, dan kawasan lain. Berdasarkan data di atas, dapat dilihat adanya kecenderungan pergeseran tujuan ekspor minyak bumi Rusia dalam lima tahun terakhir. Asia Timur menjadi konsumen kedua terbesar minyak bumi Rusia menggeser CIS dan Baltik pada awal periode tahun 2000-an. Hal sejalan dengan tingginya permintaan dari negara-negara industri Asia Timur, yakni Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Cina merupakan konsumen minyak bumi terbesar Rusia di Asia Timur. Pada tahun 2010, Cina mengimpor 12,8 juta ton minyak bumi dari Rusia, naik tiga belas kali lipat dari tahun 2000 yang hanya 1,3 juta ton.⁵⁷ Rusia dan Cina telah memiliki rute pipa minyak bumi dari Skovorodino menuju Daqing yang mulai beroperasi tahun 2010 untuk tahap pertama (2.694 km) dan tahun 2013 akan diselesaikan pembangunan tahap 2 (2.045 km).⁵⁸

Jepang merupakan konsumen kedua terbesar minyak bumi Rusia di kawasan Asia Timur. Pada tahun 2010, Jepang mengimpor 13 juta metrik ton minyak bumi, naik empat kali lipat dari tahun 2001, yaitu sebesar 284 ribu metrik

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Shoichi Itoh, *Russia Looks East: Energy Markets and Geopolitics in Northeast Asia*, A Report of the CSIS Russia and Eurasia Program, (Washington DC: CIS, 2011).

⁵⁸ *Ibid.*, hlmn: 27.

ton.⁵⁹ Jepang dan Rusia telah memiliki kerjasama eksplorasi minyak bumi Sakhalin-1 yang resmi beroperasi tahun 2006 dan Sakhalin-2 yang merupakan gabungan eksplorasi minyak bumi dan gas. Kerjasama energi antara Rusia-Jepang mengalami sedikit hambatan terkait adanya sengketa perbatasan di kepulauan Kurils yang masih belum terselesaikan sampai sekarang.

Gas bumi merupakan komoditas ekspor terbesar pertama Rusia dalam sektor energi selain minyak bumi. Uni Eropa merupakan pangsa pasar gas terbesar Rusia. Uni Eropa mengimpor gas bumi Rusia sebesar 3,9 *trillion cubic feet* (tcf). Wilayah kedua pengimpor gas dari Rusia adalah negara-negara CIS, yaitu sebesar 2 tcf tahun 2010. Sementara itu, Asia menempati urutan keempat pengimpor gas dari Rusia, yakni sebesar 0,5 tcf tahun 2010.⁶⁰ Negara pengimpor gas terbesar Rusia adalah Ukraina, yaitu sebesar 37,8 bcm. Jerman merupakan negara kedua terbesar pengimpor gas Rusia, yaitu 33,5 bcm. Dengan jumlah ini, Jerman merupakan pengimpor terbesar gas Rusia di Uni Eropa.

Jepang merupakan pengimpor terbesar gas alam Rusia di kawasan Asia Timur pada tahun 2010, yaitu 8,23 bcm. Korea Selatan menempati urutan kedua pengimpor gas alam Rusia, yakni sebesar 3,9 bcm, diikuti Taiwan di urutan ketiga dengan jumlah 0,67 bcm, dan Cina di urutan keempat dengan jumlah 0,51 bcm.⁶¹ Rusia dan Jepang telah memiliki kerjasama ekspor gas alam melalui proyek Sakhalin-2 yang menggabungkan penjualan minyak bumi dan gas alam.⁶² Sementara itu, Rusia dan Cina masih dalam proses penyempurnaan kerjasama penjualan gas alam melalui jalur pipa gas Altai.⁶³

Tabel 4.14 Permintaan Energi Cina dan Jepang

Minyak Bumi (juta barel/hari)	2015	2020	2025	2030	2035

⁵⁹ Ibid., hlmn: 46.

⁶⁰ Sergey Paltsev, "Russia's Natural Gas Export Potential up to 2050", MIT Center for Energy and Environmental Policy Research, (July 2011), hlmn: 10.

⁶¹ BP Statistical Review of World Energy (June 2011).

⁶² *Loc.Cit.*, Itoh, hlmn: 53.

⁶³ *Loc.Cit.*, Paltsev, hlmn: 12; Julian Lee, "Russian Gas Export to China Move a (Small) Step Closer", Centre for Global Energy Studies, <http://www.cges.co.uk/resources/articles/2010/10/01/russian-gas-exports-to-china-move-a-small-step-closer> diakses tanggal 4 Juni 2012.

Cina	10,6	11,7	13,0	14,3	15,3
Jepang	3,8	3,5	3,2	3,0	2,8
Gas Alam					
(juta kubik/hari)	2015	2020	2025	2030	2035
Cina	169	216	266	331	395
Jepang	107	112	112	112	117

Sumber: Itoh, *Russia Looks East: Energy Markets and Geopolitics in Northeast Asia*, A Report of the CSIS Russia and Eurasia Program, (Washington DC: CIS, 2011), hlmn: 17 dan 21

Rusia merupakan mitra kerjasama sektor energi penting bagi Cina, Jepang, dan Korea Selatan dengan pertimbangan kedekatan geografis. Hal ini semakin diperkuat dengan program kerjasama jangka panjang Rusia-Cina, Rusia-Jepang, dan Rusia-Korea Selatan untuk mengeksplorasi sektor energi di wilayah timur Siberia dan Timur Jauh. Kerjasama antara Cina, Jepang, dan Korea Selatan dengan Rusia di sektor energi akan terus berlanjut sampai dengan 30—40 tahun mendatang didasarkan pada peningkatan permintaan sumber energi ketiga negara tersebut, baik dalam bentuk minyak bumi, gas alam, ataupun batu bara. Kerjasama antara Rusia dengan tiga negara industri Asia Timur tidak terbatas pada sektor energi, tetapi mencakup bidang lain, seperti investasi, transportasi, manufaktur, peralatan berat, dan kimia. Namun demikian, energi tetap menjadi komoditas andalan Rusia dalam menjalin kerjasama perdagangan dengan Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Besarnya potensi sumber energi Rusia membuat negara ini memiliki daya tawar yang relatif lebih tinggi terhadap Cina, Jepang, dan Korea Selatan dalam hal kerjasama energi dan ekonomi secara umum. Dengan demikian Rusia memiliki kekuatan ekonomi sektor energi sebagai modalitas pelibatan dirinya ke dalam kerjasama ekonomi dan perdagangan di Asia Timur.

4.4 Kekuatan Politik Rusia

Hans Morgenthau mengatakan bahwa politik internasional adalah ”*a struggle for power*”⁶⁴. Setiap negara akan memiliki tujuan akhir dalam politik internasional: kebebasan, keamanan, kesejahteraan, atau *power* itu sendiri. Negara mendefinisikan tujuan-tujuan nasionalnya dalam idealisme agama, filosofis, ekonomi, atau sosial. Meskipun idealisme setiap negara dapat berbeda, di dalam

⁶⁴ Hans Morgenthau, *Politics among Nations: Struggle for Power and Peace*, (New York: Alfred A. Knopf, 1948), hlmn: 13.

politik internasional setiap negara berjuang demi *power*. *Power* adalah kemampuan manusia untuk mengendalikan pikiran dan tindakan manusia lain.⁶⁵ Morgenthau mendefinisikan *political power* sebagai “. . . *the mutual relations of control among the holders of public authority and between the latter and the people at large.*”⁶⁶

Terminologi ”*political power*” dipadankan dengan ”kekuatan politik” meskipun Morgenthau dengan tegas menyatakan bahwa konsep ”*political power*” harus dibedakan dengan penggunaan kekuatan dalam bentuk kekerasan fisik. Kekutan politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan politik negara untuk mempengaruhi, mengendalikan, atau memberikan dampak terhadap tindakan negara lain atau perubahan dalam sebuah struktur sistem. Pendefinisian ini sejalan dengan argumentasi lanjutan Morgenthau bahwa kemampuan mempengaruhi, mengendalikan, dan memberikan dampak terhadap negara lain merupakan realisasi hubungan psikologis yang terkandung dalam konsep *political power*.⁶⁷ Kemampuan mempengaruhi dapat dilakukan dengan cara pengaturan, pengancaman, persuasi, (*orders, threats, persuasion*) atau gabungan ketiga unsur tersebut.

Negara merupakan organisasi memiliki fungsi otoritatif mengimplementasikan konsep kekuatan politik. Negara memiliki elemen *power* dalam proses implementasi tersebut. Morgenthau menyebutkan delapan lemen *power* yang dimiliki sebuah bangsa sebagai modalitas negara melakukan *struggle for power* dalam politik internasional: geografi, sumber daya alam, kapasitas industri, militer, populasi, karakter nasional, moral kebangsaan, dan kualitas diplomasi.⁶⁸ Delapan elemen ini adalah kesatuan utuh yang dapat digunakan sebagai instrumen pengukur kekuatan politik sebuah negara. Fungsi saling terkait elemen-elemen *power* tersebut dapat terlihat ketika sebuah negara memproyeksikan *power* yang dimiliki pada tataran bilateral, regional, atau global.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*, hlmn: 14.

⁶⁸ *Ibid.*, hlmn: 80—108.

Penjelasan dua sub-bab sebelumnya, tentang kekuatan militer dan ekonomi Rusia, merupakan bagian dari penjelasan kekuatan politik yang dimiliki Rusia. Elemen militer dan ekonomi merupakan elemen *power* bersifat materi yang dapat diukur kuantitas dan kualitasnya secara periodik. Kedua elemen tersebut merupakan modalitas utama Rusia untuk menunjang usaha-usaha nasionalnya dalam melakukan *struggle for power*, baik secara bilateral, regional, maupun global. Namun demikian, elemen *power* lain yang tidak kalah penting dan memiliki hubungan saling terkait dengan militer dan ekonomi adalah diplomasi. Rusia menggunakan kekuatan militer dan ekonomi sebagai pendukung usaha-usaha diplomatisnya dalam menciptakan pengaruh dan dampak terhadap negara lain atau struktur sistem. Bagian ini menjelaskan kekuatan politik Rusia dalam bentuk aktivitas diplomasinya untuk menciptakan pengaruh dan dampak pada tataran regional dan global.

Pemerintah Rusia merancang aktivitas politik luar negerinya dalam dokumen Konsep Kebijakan Luar Negeri tahun 1993, 2000, dan 2008. Ketiga dokumen ini dibuat berdasarkan kondisi strategis lingkungan regional dan global dan kepentingan nasional Rusia di dalam kedua lingkungan tersebut. Konsep tahun 1993 dirancang oleh pemerintahan Boris Yeltsin, konsep tahun 2000 dirancang Vladimir Putin, dan Konsep tahun 2008 dirancang oleh Dmitry Medvedev. Hal ini bukan berarti terdapat perbedaan visi di dalam Konsep tetapi menegaskan adanya perubahan dan konstinuitas yang didasarkan pada perubahan kondisi dan kebutuhan Rusia untuk menghadapi berbagai kondisi perubahan.

Secara umum tidak terdapat perbuahan visi di dalam ketiga Konsep. Rusia mengidealkan dirinya sebagai negara demokratis yang berusaha mencapai tujuan-tujuan nasionalnya, menjaga integritas teritorial, dan pelibatan aktif Rusia ke dalam komunitas bangsa-bangsa internasional. Tujuan nasional Rusia adalah pemanfaatan sumber daya untuk mencapai kepentingan-kepentingan bangsa dan pemeliharaan keamanan nasional. Pemeliharaan integritas teritorial merupakan fungsi pokok negara dan Rusia melakukannya dalam kondisi munculnya ancaman separatis dari dalam negeri, seperti Perang Chechnya dan konflik Ossetia Utara dan Abkhazia. Pelibatan Rusia ke dalam komunitas bangsa-bangsa internasional

menjadi penting bagi Rusia karena negara ini menganut nilai-nilai demokrasi setelah terlepas dari ideologi komunis era Soviet. Sedangkan perubahan yang terjadi umumnya menyangkut dinamika regional dan global yang berdampak, meskipun tidak signifikan, pada prioritas aktivitas kebijakan luar negeri.

Tabel 4.15 Prioritas Aktivitas Kebijakan Luar Negeri Rusia

1993	2000	2008
CIS	Forming A New World Architecture	The Emergence of A New World Order
Arms Control and International Security	Strengthening International Security	The Primacy of Law in International Relations
Promoting Economic Reform	International Economic Relations	Strengthening International Security
The USA	Human Rights and International Relations	International Economic and Environmental Cooperation
Europe	Information Supports for Foreign Policy Activities	International Humanitarian Cooperation and Human Rights
Asia Pacific Region		Information Supports for Foreign Policy Activities
South and West Asia		
Middle East		
Africa		
Latin America		
UN and International Organizations		
The Non-Aligned Movement		
Human Rights and Fundamental Freedoms		
Religions and Religious Organizations		
Environmental Problems		

Sumber: Konsep Kebijakan Luar Negeri Federasi Rusia tahun 1993, 2000, dan 2008

Perbedaan mendasar terdapat pada prioritas kebijakan luar negeri Rusia tahun 1993 dengan tahun 2000-an. Konsep tahun 1993 memberikan perhatian penuh pada pemeliharaan hubungan Rusia dengan negara-negara bekas Uni Soviet di Eropa Timur dan Asia Tengah. Fokus ini menandakan keinginan Rusia untuk mempertahankan pengaruhnya secara tradisional terhadap tetangga dekatnya. Hal ini juga menandakan bahwa Rusia secara serius belum ingin

memproyeksikan kekuatannya secara masif karena keterbatasan sumber daya. Konsep tahun 2000 dan 2008 memperlihatkan pergeseran fokus kebijakan luar negeri Rusia ke arah pemantapan posisinya sebagai salah kekuatan pada tataran global. Rusia telah menaruh perhatian terhadap kemunculan tatanan struktur global yang baru dan Rusia berkeinginan untuk terlibat aktif dalam penciptaan struktur tersebut. Hal ini tidak terlepas dari dukungan dua faktor: kepemimpinan yang kuat dan ketersediaan sumber daya nasional.

Faktor ketersediaan sumber daya nasional telah dijelaskan pada dua sub-bab sebelumnya. Perekonomian berbasis perdagangan sumber energi menjadi kekuatan utama Rusia. Perbaikan sektor ekonomi pula yang membuat Rusia mulai menunjukkan kembali pengaruhnya secara regional dan global. Bersamaan dengan itu, Rusia masih memiliki kapabilitas militer konvensional dan strategis yang signifikan. Sebagai tambahan, secara politik Rusia memiliki hak veto pada Dewan Keamanan PBB. Namun demikian, hal ini tidak akan terwujud jika tidak didukung oleh faktor kepemimpinan yang kuat. Keseluruhan ini unsur ini memperlihatkan keterkaitan yang kuat sebagai modalitas kekuatan politik Rusia dalam penataan struktur sistem internasional.

Penataan struktur sistem internasional yang dimaksud Rusia adalah penciptaan struktur sistem multipolar yang mengedepankan asas hukum internasional sebagai landasan tindakan negara dan menguatkan peran PBB dalam penyelesaian berbagai persoalan antarbangsa.⁶⁹ Multipolaritas yang diinginkan Rusia adalah independensi negara-negara atau kelompok di dunia untuk aktif dalam konstruksi struktur sistem yang stabil berdasarkan prinsip keadilan, saling menghargai, dan kerjasama yang saling menguntungkan.⁷⁰ Secara implisit, keinginan Rusia untuk aktif terlibat dalam penataan struktur sistem multipolar yang setara adalah bentuk kewaspadaan terhadap kemungkinan aksi-aksi unilateralisme AS dan keinginan NATO memperluas wilayah keanggotaan yang dipersepsikan Rusia sebagai ancaman.

⁶⁹ Konsep Kebijakan Luar Negeri Federasi Rusia tahun 2000.

⁷⁰ *Ibid.*

Rusia menunjukkan kekuatan politiknya dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir dalam berbagai kebijakan luar negeri dan upaya-upaya diplomasi terkait isu-isu regional dan global. Rusia memberikan bantuan kepada AS dalam perang terhadap terorisme setelah terjadinya serangan terhadap gedung WTO di New York, AS. Pada tahun 2002 Rusia mendapat pengakuan dari kelompok negara industri maju dalam bentuk keanggotaan dalam G8. Satu tahun kemudian, Rusia mengkritik aksi unilateralisme AS terhadap Irak. Bersamaan dengan itu, Rusia harus menonton terjadinya Revolusi Oranye di Ukraina yang berakibat pada terbukanya perpecahan elite pemerintahan Ukraina menjadi pro dan kontra-Rusia. Pada tahun 2006, Rusia mengecam tindakan militer Israel terhadap Lebanon.

Rusia menunjukkan kekuatan politiknya pada tahun 2006 dengan menggunakan energi sebagai senjata. Rusia memutuskan suplai gas ke Ukraina sebagai akibat tidak tercapainya kesepakatan harga antara kedua negara. Dampak pemutusan suplai gas tidak saja dirasakan oleh Ukraina tetapi juga oleh Jerman, Italia, dan Perancis sebagai konsumen Rusia di Eropa Barat. Kejadian yang sama kembali terjadi pada awal tahun 2009 setelah kedua negara kembali gagal mencapai kesepakatan harga. Selain sektor energi, Rusia juga aktif tampil dalam sektor keamanan regional. Pada bulan Februari tahun 2007, Presiden Putin memberikan pidato pada *Munich Security Conference*. Pidato ini mengecam tindakan NATO yang akan memasang instalasi sistem anti-rudal balistik di Republik Ceko dan Polandia. Pada tanggal 8 Agustus 2008, bertepatan dengan pembukaan Olimpiade Beijing, Rusia melakukan kampanye militer ke wilayah Georgia sebagai balasan invasi tentara Georgia ke Ossetia Utara dan Abkhazia.

Rusia juga aktif menjalin hubungan dengan negara-negara Amerika Latin yang menunjukkan kebangkitan sosialisme dan anti-AS. Rusia dan Venezuela melakukan kontrak jual-beli senjata sebesar 2 miliar dolar AS pada bulan September 2009 yang membuat AS khawatir.⁷¹ Kekhawatiran AS ini beralasan karena presiden Venezuela, Hugo Chavez merupakan pemimpin yang sangat anti-

⁷¹ "Chavez in 2 bn USD Russian Arms Deal", <http://news.bbc.co.uk/2/hi/8253822.stm>; "U.S. Concerned over Venezuela-Russia Arms Deal", <http://www.reuters.com/article/2009/09/15/us-usa-venezuela-arms-idUSTRE58E0TY20090915> diakses tanggal 2 Juni 2012.

AS. Rusia juga menjalin hubungan baik dengan Iran, negara yang dianggap AS sebagai negara "axis of evil" selain Irak dan Korea Utara. Rusia mendukung program nuklir Iran untuk tujuan damai dan meminta Iran untuk bekerja sama penuh dengan *International Atomic Energy Association* (IAEA). Pada bulan February 2011, Rusia mengambil langkah baru dalam isu nuklir Iran. Rusia mulai mendekati negara-negara anggota tetap DK PBB plus Jerman (P5+1) dan menentang segala bentuk sanksi yang akan diberikan DK PBB kepada Iran. Pada bulan Juli 2011, Rusia menawarkan pencabutan sanksi secara perlahan terhadap Iran dan sebagai imbalannya Iran harus bekerjasama dengan IAEA.⁷²

Aktivitas Rusia dalam keterkaitan dengan isu nuklir adalah keterlibatannya dalam forum dialog Six Party Talks yang membahas isu nuklir Korea Utara. Rusia dianggap negara yang pertama kali mengusulkan proses *six-party* pada tahun 1994.⁷³ Rusia menunjukkan konsistensi kebijakannya yang mempromosikan Korea sebagai wilayah bebas nuklir. Rusia menolak segala bentuk sanksi yang menggunakan kekerasan dan lebih memilih opsi dialog multilateral dalam mencari solusi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip dalam *Non-Proliferation Treaty* (NPT). Korea Utara menyambut positif inisiatif Rusia. Sementara itu AS justru sebaliknya, tidak mengakui peran positif Rusia dalam *Six Party Talks*.⁷⁴

Aktivitas politik luar negeri Rusia terus menunjukkan ketegasannya dalam beberapa tahun belakangan. Rusia memilih abstain pada saat DK PBB menjatuhkan sanksi bagi Libya pada tanggal 17 Maret 2001 lewat Resolusi 1973. Keputusan Rusia untuk abstain tidak sendirian tetapi bersama empat negara lain, yakni Brazil, Cina, India, dan Jerman.⁷⁵ Pada bulan Februari 2012, Rusia bersama Cina menggunakan hak veto mereka terhadap rencana sanksi DK PBB terhadap Suriah. Suriah merupakan mitra strategis Rusia di kawasan. Rusia memiliki akses

⁷² John W. Parker, "Russia and the Iranian Nuclear Program: Replay or Breakthrough?", *Strategic Perspective*, No. 9, (Washington DC, Institute for National Strategic Studies), hlmn: 1.

⁷³ Georgy Toloraya, "The Six-Party Talks: A Russian Perspective", *Asian Perspective*, Vol. 32, No. 4, (2008), pp.45—69.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Department of Public Information Security Council, "Security Council Approves 'No-Fly Zone' over Libya, Authorizing 'All Necessary Measures' to Protect Civilians, by Vote of 10 in Favour with 5 Abstentions", <http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10200.doc.htm> diakses tanggal 8 Juni 2012.

terhadap pelabuhan Tartus sebagai pangkalan angkatan laut Soviet sampai dengan tahun 1991. Pada tahun 2009 Rusia kembali ke Tartus, memodernisasi pelabuhan tersebut, dan menjadikannya sebagai pendukung operasi anti-bajak laut Somalia.⁷⁶ Kedekatan hubungan Rusia-Suriah merupakan salah satu alasan mengapa Rusia memveto draft resolusi DK PBB terhadap Suriah. Pada sisi lain, keputusan Rusia konsisten dengan konsep kebijakan luar negerinya yang mengedepankan proses dialog konstruktif dalam penyelesaian masalah. Proses negosiasi masih terus berlanjut dan Rusia tetap menunjukkan konsistensi kebijakan luar negerinya yang menentang segala bentuk penerapan sanksi berupa opsi militer.

Hubungan Rusia-AS menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir meskipun dalam beberapa isu di atas kedua negara berbeda pandangan. Isu nuklir merupakan salah satu isu penting yang menggambarkan perbaikan hubungan kedua negara. Rusia-AS menandatangani perjanjian *Strategic Arms Reduction Treaty* (START I) pada 31 Juli 1991 dan mulai berlaku sejak tanggal 5 Desember 1994. Perjanjian bertujuan mengurangi hulu ledak nuklir sampai dengan 6.000 jumlah maksimal dan sistem pengirimannya sampai dengan 1.500 jumlah maksimal⁷⁷. START I berakhir pada tanggal 5 Desember 2009 atau berlaku lima belas tahun. Pada bulan April 2010, di Praha, kedua negara memperbarui perjanjian START yang menuntut komitmen Rusia dan AS mengurangi persenjataan nuklirnya sampai dengan 1.550 hulu ledak nuklir dan 700 sistem pengirimannya.⁷⁸

Fakta-fakta di atas menunjukkan kekuatan politik Rusia pada tataran regional dan global. Penilaian terhadap kekuatan politik Rusia tidak dapat

⁷⁶ "Russia Set to Build Up Its Naval Facilities in Tartus", <http://www.globalsecurity.org/military/library/news/2009/07/mil-090720-rianovosti03.htm> diakses tanggal 4 Juni 2012.

⁷⁷ Stephen White, *Understanding Russian Politics*, (New York: Cambridge University Press, 2011) hlmn: 272—273. Selain START, Rusia-AS memiliki beberapa kesepakatan pengurangan senjata strategis: *Test Ban Treaty* 1963, *Comprehensive Test Ban Treaty* (CTBT) 1966, *Non-Proliferation Treaty* (NPT) 1968, *Anti-Ballistic Missile* (ABM) 1972 (AS mundur dari kesepakatan pada bulan Juni 2002), *Interim Agreement on Offensive Missiles* (SALT I) 1972, *SALT II* 1979, *Intermediate-Range Nuclear Force* (INF) 1987, *Conventional Armed Forces in Europe* (CFE) 1990, dan *Strategic Arms Reduction* (SORT) 2002.

⁷⁸ *Ibid.*; Matthew Rojansky and James F. Collins, "A Reset for the U.S.-Russia Values Gap", *Policy Outlook*, (Carnegie Endowment for International Peace, November 2011).

dilakukan dengan memisahkan elemen *power* yang dimiliki karena pada dasarnya keseluruhan elemen *power* saling berkait menjadi *national power*. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kekuatan politik Rusia menguat beriringan dengan semakin membaiknya situasi politik dalam negeri dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebagai akibat surplus perdagangan sektor energi. Meskipun ekonomi menjadi kekuatan kunci Rusia pada tahun 2000-an, kekuatan militer konvensional dan nuklir strategis tetap menjadi modal tradisional Rusia. Secara politis, Rusia sebagai anggota tetap DK PBB memiliki hak veto yang dapat mempengaruhi beberapa keputusan pada tataran internasional.

4.5 Rusia sebagai Kekuatan Baru

Rusia menyadari terjadinya perubahan struktur sistem internasional setelah Uni Soviet bubar. Struktur bipolar digantikan struktur multipolar yang ditandai dengan pemusatan *power* secara regional dan munculnya model politik internasional *multitrack*.⁷⁹ Berakhirnya Perang Dingin tidak secara otomatis menciptakan stabilitas global karena faktor militer dan *power* masih memegang peranan signifikan dalam politik internasional. Namun demikian, Rusia memiliki keyakinan bahwa kunci pertumbuhan nasional dan internasional pada abad ke-21 terletak pada faktor ekonomi dan sosial. Menghadapi perubahan fundamental ini, Rusia meletakkan kepentingan nasional sebagai landasan kebijakan luar negerinya, bukan ideologi seperti masa Uni Soviet. Dalam menjaga dan memenuhi kepentingan nasionalnya, Rusia berkeinginan untuk terlibat secara konstruktif dalam penataan struktur sistem internasional multipolar yang setara.⁸⁰ Pelibatan Rusia dalam proses penataan ini menempatkan Rusia sebagai *great power*⁸¹ yang berusaha terlibat mempengaruhi proses global penciptaan sistem yang stabil, setara, dan demokratis.⁸²

Rusia secara eksplisit menyatakan penurunan status diri dari *superpower* menjadi *great power*. Pengakuan ini ditegaskan kembali dengan keinginan Rusia untuk menciptakan struktur sistem multipolar yang stabil, setara, dan demokratis.

⁷⁹ Konsep Kebijakan Luar Negeri Federasi Rusia tahun 1993.

⁸⁰ Konsep Kebijakan Luar Negeri Federasi Rusia tahun 2000.

⁸¹ Konsep tahun 1993.

⁸² Konsep tahun 2000.

Rusia mengidealkan struktur sistem multipolar, bukan bipolar atau tripolar, dengan peran sentral organisasi internasional, seperti PBB dan DK PBB, sebagai badan regulator.⁸³ Rusia juga memandang perlu mengintegrasikan diri ke dalam proses globalisasi dengan penguatan sektor ekonomi dan penghargaan terhadap nilai-nilai universal HAM.⁸⁴ Pernyataan-pernyataan ini menandakan keinginan Rusia untuk tampil kembali sebagai kekuatan baru yang tidak mengancam bagi siapapun. Rusia ingin terlibat secara aktif dan konstruktif ke dalam berbagai komunitas internasional agar dapat mengambil keuntungan positif dari pelibatan tersebut.

Keinginan Rusia untuk terlibat ke dalam komunitas internasional tidak akan bermakna jika tidak ada penerimaan dari komunitas. Sebagai negara *great power* yang sedang bangkit, penerimaan Rusia ke dalam komunitas internasional tidak terlepas dari faktor *power politics* yang digunakan Rusia. Subbab sebelumnya telah menjelaskan kekuatan politik yang dimiliki Rusia sebagai modalitas pelibatan dirinya ke dalam komunitas internasional. Penerimaan Rusia ke dalam komunitas dapat dilihat dari dua faktor: kekuatan militer, ekonomi, dan politik yang dimiliki Rusia dan usaha Rusia mencitrakan diri sebagai kekuatan yang tidak mengancam. Faktor kedua menjadi sangat penting karena Rusia merupakan ahli waris kekuatan Uni Soviet dan potensi elemen *power* Rusia yang dapat digunakan sebagai senjata politik.

Penerimaan Rusia sebagai bagian komunitas internasional terlihat dari keterlibatan negara ini dalam berbagai forum kerjasama. Dalam bidang ekonomi, Rusia telah bergabung sebagai anggota *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) sejak tahun 1998. Setahun sebelumnya, Rusia resmi bergabung menjadi anggota negara industri maju, G8, diikuti dengan keikutsertaan Rusia dalam forum G20 pada tahun 1999. Pada bulan Desember 2011, Rusia secara resmi memperoleh keanggotaan di WTO setelah mendapatkan dukungan penuh dari AS dan negara-negara Eropa. Keterlibatan Rusia dalam forum kerjasama ekonomi regional dan global didasari pada kenyataan interdependensi ekonomi dunia.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

Rusia merupakan mitra perdagangan strategis dalam sektor energi. Negara-negara industri maju membutuhkan sumber energi Rusia untuk mendukung proses produksi. Sebaliknya, Rusia membutuhkan organisasi internasional bidang ekonomi untuk ikut serta menentukan pengaturan agenda yang akan memberikan keuntungan pada kepentingan nasional Rusia.

Pelibatan Rusia dalam kerjasama bidang keamanan umumnya berkaitan dengan normalisasi hubungan Rusia dengan AS. Salah satu kerjasama Rusia-AS yang menunjukkan normalisasi hubungan tersebut adalah kesediaan Rusia membuka wilayahnya untuk keperluan pemberantasan terorisme. Pada bulan september 2001 Putin mengumumkan rencana kebijakan perang melawan terorisme setelah serangan terhadap gedung WTO:

*“. . . share intelligence with its American counterparts, open Russian airspace for flights providing humanitarian assistance, cooperate with Russia's Central Asian allies to offer similar airspace access to American flights, participate in international search-and-rescue efforts, and increase direct assistance—humanitarian as well military—to the Northern Alliance, the guerilla army opposed to the ruling Taliban in Afghanistan.”*⁸⁵

Keterbukaan Rusia ini membuktikan pada dunia bahwa Rusia sangat ingin menjadi bagian komunitas internasional. Namun demikian, pendapat lain mengatakan bahwa kebijakan Putin bekerjasama dengan AS merupakan pembenaran bagi aksi militer Rusia menumpas terorisme di Chechnya.⁸⁶

Rusia dan NATO memperkuat dialog keamanan dengan membentuk NATO-Russia Council (NRC) pada tahun 2002. Tujuan pembentukan NRC adalah sebagai mekanisme untuk konsultasi, membangun konsensus, kerjasama, pembuatan keputusan bersama, dan penentuan aksi bersama.⁸⁷ Bidang kerjasama yang dibahas dalam NRC antara lain terorisme, proliferasi, peacekeeping, theatre missile defence, manajemen angkasa, kedaruratan sipil, reformasi sektor

⁸⁵ James Goldgeier and Michael McFaul, “George W. Bush and Russia”, *Current History*, edisi Oktober 2002.

⁸⁶ Andrew Jack, *Inside Putin's Russia*, (London: Granata Books, 2004), hal. 272.

⁸⁷ NATO-Russia Council, http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50091.htm diakses tanggal 4 Juni 2012.

pertahanan, logistik, dan teknologi yang difokuskan pada ancaman dan tantangan baru.⁸⁸ Makna pelibatan Rusia ke dalam forum NRC adalah normalisasi hubungan dua kekuatan besar dunia dalam upaya penciptaan struktur keamanan dunia yang baru setelah Perang Dingin usai. Proses ini tidak akan berhasil apabila tidak ada keinginan NATO menerima Rusia sebagai kekuatan baru yang tidak mengancam. Kerjasama ini menjadi sangat strategis karena isu-isu keamanan yang dibahas menentukan model struktur keamanan sistem, misalnya isu nuklir dan ABM. Sektor kerjasama program ABM merupakan pembahasan utama pada NATO Summit 20—21 Mei 2012 di Chicago.

Rusia tidak saja aktif dalam kerjasama bidang ekonomi dan keamanan tetapi juga membuka diri terhadap perkembangan di bidang agama. Rusia diterima sebagai negara pengamat di Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada tahun 2005. Pelibatan Rusia ke dalam OKI menjadi menarik karena Rusia merupakan negara dengan penganut Kristen Ortodoks terbanyak, yaitu sekitar 70—80 persen, sementara penganut Islam sekitar 5 persen. Hal ini menandakan Rusia, sebagai negara besar, menaruh perhatian terhadap permasalahan Islam global meskipun penganut Islam di Rusia sedikit.

Dinamika geopolitik dan geoekonomi setelah berakhirnya Perang Dingin banyak dipengaruhi oleh kemunculan Cina sebagai magnet baru pertumbuhan kawasan Asia Timur. Rusia merupakan negara yang banyak memberikan perhatian besar terhadap pergeseran pusran geopolitik dan geoekonomi dari Atlantik Utara menuju Asia Timur. Rusia telah terlibat dalam berbagai forum kerjasama multilateral di kawasan Asia Timur sejak awal tahun 1990-an. Pelibatan ini didasarkan pada kenyataan bahwa Rusia memiliki potensi sebagai mitra kerjasama bagi negara-negara di kawasan.

Tabel 4.16 Keterlibatan Rusia dalam Forum Kerjasama di Asia Pasifik

Nama Organisasi	Status Keanggotaan	Tahun
Russian National Committee Pacific Economic Cooperation	Anggota penuh	1992

⁸⁸ *Ibid.*

(RNCPEC)		
The Pacific Economic Cooperation Council (PECC)	Anggota penuh	1992
The Pacific Basin Economic Council (PBEC)	Anggota penuh	1994
ASEAN Regional Forum (ARF)	Anggota penuh	1994
Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)	Anggota penuh	1998
Shanghai Cooperation Organization (SCO)	Anggota penuh	2001
North Korea Nuclear Six Party Talks	Inisiator	2003
ASEAN-Russia Summit	Mitra Wicara	2005
East Asia Summit (EAS)	Anggota penuh	2011

Sumber: www.aseansec.org; www.aseanregionalforum.org; www.apec.org; www.sectsc.org

Keterlibatan Rusia dalam kerjasama bidang keamanan di Asia Timur ditandai dengan bergabungnya Rusia sebagai anggota ARF pada bulan Juli 1994. *Balance of power* merupakan salah satu faktor mendasar dibentuknya ARF.⁸⁹ ARF dirancang sebagai forum dialog konstruktif yang membahas berbagai isu keamanan kawasan dengan prinsip *confidence building*, *preventive diplomacy* dan *conflict resolution*. Keterlibatan Rusia sebagai negara yang pernah berpengaruh di kawasan menandakan perannya masih diperlukan sebagai penentu dalam dinamika keamanan sistem kawasan. Pada pertemuan AMM ke-26 tahun 1993, Menteri Luar Negeri Rusia, Andrey Kozyrev meyakinkan pemimpin ASEAN bahwa Rusia mampu berperan sebagai penjaga keamanan kawasan.⁹⁰ Penerimaan Rusia sebagai anggota ARF menegaskan status *great power* yang disandang Rusia. Hal ini berdasarkan pertimbangan *balance of power* yang membutuhkan peran negara *great power* sebagai penyeimbang sementara negara-negara lain di kawasan relatif tidak mampu mengimbangi potensi kekuatan Cina.

Kehadiran Rusia di Asia Timur diperlukan dalam hal penyeimbangan kekuatan terhadap Cina, Jepang, dan AS. Rusia sebelumnya pernah hadir sebagai

⁸⁹ Ralf Emmers, "The Influence of the Balance of Power Factor within the ASEAN Regional Forum", *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 23, No. 2 (August 2001), pp. 275—291.

⁹⁰ Paradorn Rangsimaporn, *Russia as an Aspiring Great Power in East Asia: Perceptions and Policies from Yeltsin to Putin*, (New York: Palgrave Macmillan, 2009), hlmn: 131.

penyeimbang di Asia Timur yang ditandai dengan kehadiran angkatan laut dan udara Rusia di Vietnam. Rusia meninggalkan Vietnam pada tahun 1991 diikuti keputusan AS untuk meninggalkan kawasan Asia Tenggara tahun 1992. Langkah AS membuat para negara-negara ASEAN khawatir akan munculnya dominasi Cina dan remilitarisasi Jepang tanpa ada kekuatan penyeimbang.⁹¹ Kehadiran AS tetap dipertahankan oleh ASEAN dengan cara menciptakan forum keamanan multilateral. Peran AS diharapkan dapat mereduksi ketidakpastian dan tantangan yang muncul sebagai akibat rekonfigurasi *power* setelah Perang Dingin. Namun demikian, Rusia ternyata ikut dilibatkan dalam proses dialog multilateral tersebut. Sebagai bekas *superpower*, Rusia diharapkan memiliki peran yang setara dalam penciptaan konfigurasi *power* yang stabil di kawasan.

Peran Rusia dalam ARF tidak saja bersesuaian dengan kondisi kawasan tetapi juga sejalan dengan kepentingan nasional Rusia. Bentuk kepentingan Rusia yang selaras dengan kondisi kawasan adalah munculnya isu-isu keamanan baru di samping beberapa isu keamanan tradisional yang masih belum terselesaikan. Penanganan terorisme merupakan salah satu isu yang menyangkut kepentingan nasional Rusia. ARF memiliki sesi khusus menyangkut isu terorisme, yaitu *Workshop on Prevention of Terrorism*. Terorisme merupakan isu multinasional yang menggejala setelah Perang Dingin. Rusia merupakan negara menjadi serangan aksi terorisme kaum pejuang separatis Kaukasus. *Workshop on Prevention of Terrorism* merupakan salah satu media bagi Rusia dan negara-negara ARF dalam proses penanggulangan aksi terorisme nasional, regional, maupun global.

Rusia sulit memberikan dampak bagi ARF baik secara institusional maupun substansial. ARF merupakan forum dialog keamanan kawasan dengan model organisasi yang longgar tanpa ikatan. ARF tidak dapat memberikan sanksi hukuman kepada negara anggota apabila melanggar norma aturan yang telah ditetapkan. ARF tidak memiliki angkatan bersenjata gabungan seperti yang

⁹¹ Erik Beukel, "ASEAN and ARF in East Asia's Security Architecture: The Role of Norms and Power", *Danish Institute for International Studies Report* (Copenhagen: Danish Institute for International Studies 2008: 4), hlmn: 27.

dimiliki oleh NATO. Keputusan yang dibuat dalam forum konsultasi diambil berdasarkan konsensus, berarti proses dialogis menjadi lebih penting dibanding elemen-elemen *power* yang lain. Keseluruhan fakta ini membuat sifat multilateralisme ARF menjadi kekurangan makna. Kedekatan bilateral, berdasarkan faktor historis atau kepentingan, tetap akan menjadi penentu dalam pembuatan keputusan secara konsensus.

Pada sisi lain, secara substansial ARF membahas isu-isu yang tidak menyentuh esensi konstruksi keamanan kawasan Asia Timur. Asia Timur mengandung potensi konflik historis yang sangat sensitif untuk dibahas dalam dialog multilateral. Rusia masih memiliki persoalan perbatasan wilayah kedaulatan di kepulauan Kuril dengan Jepang. Permasalahan ini tidak pernah dibahas dalam forum ARF. Rusia memiliki persoalan perbatasan dengan Cina dan menyelesaikannya secara bilateral tanpa harus membawanya ke forum ARF. Isu tradisional, seperti nuklir Korea Utara, lebih banyak dibahas pada forum *Six Party Talks* yang anggotanya adalah negara pemilik senjata nuklir di dunia. Isu sengketa wilayah di Laut Cina Selatan antara lima negara pemilik klaim hanya diwacanakan sebagai tantangan kawasan dalam beberapa pertemuan ARF dan tidak pernah dibahas secara multilateral meskipun menyangkut kepentingan lebih dari dua negara. Sementara itu, ARF lebih banyak membahas isu-isu keamanan yang relatif lunak, seperti terorisme, penanganan bencana, operasi *peacekeeping*, dan kerjasama SAR.

Rusia sebagai negara *great power* dengan kemampuan militer konvensional dan nuklir strategis harus menyesuaikan diri dengan pewacanaan isu-isu keamanan non-tradisional yang lebih banyak dibahas dalam ARF. Terorisme merupakan isu non-tradisional penting yang paling berhubungan dengan kepentingan nasional Rusia. Selain terorisme, Rusia sebagai *great power* lebih banyak berkepentingan dalam isu-isu tradisional, seperti nuklir dan ABM. ABM pernah disinggung Rusia dalam laporannya di dalam *ARF Annual Security Outlook* tahun 2007 tetapi tidak muncul lagi pada laporan tahun-tahun berikutnya. Isu militer yang menjadi perhatian Rusia di Asia Timur adalah proliferasi senjata

ringan (*small and light weapons/SALW*) dan *Man-Portable Air Defense System* (MANPADS) ilegal.

Isu lain di Asia Timur yang menyangkut kepentingan Rusia adalah permasalahan nuklir Korea Utara dan pelucutan senjata nuklir dikawasan untuk mewujudkan kawasan yang bebas dari senjata nuklir.⁹² Rusia merupakan inisiator bagi penyelesaian isu nuklir Korea Utara dalam format dialog *Six Party Talks*. Rusia merupakan bekas mitra tradisional Korea Utara pada masa Perang Dingin. Secara geografis, Rusia berada dalam jangkauan senjata nuklir Korea Utara. Dalam sektor ekonomi, Rusia memiliki kerjasama energi dengan Korea Selatan, Cina, dan Jepang. Peran Rusia dalam *Six Party Talks* adalah sebagai negara *nuclear power* yang mampu menyeimbangkan di antara negara-negara *nuclear power* lain yang berkepentingan. *Six Party Talks* sekaligus merupakan sarana bagi Rusia untuk memperlihatkan pada komunitas bangsa-bangsa di kawasan perannya sebagai stabilisator kawasan.

Kehadiran Rusia dalam kerangka kerjasama di Asia Timur yang terakhir adalah di *East Asia Summit* (EAS). Rusia pertama kali hadir di EAS tahun 2005 sebagai tamu undangan pemerintah Malaysia.⁹³ Lima tahun kemudian Rusia resmi bergabung di EAS dan pada tahun 2011 untuk pertama kalinya Rusia mengikuti EAS Summit di Bali, Indonesia. Berbeda dengan ARF, EAS membahas isu strategis yang lebih luas, yaitu isu-isu politik, keamanan, dan ekonomi regional berdasarkan kepentingan bersama dan memperhatikan tujuan-tujuan untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan ekonomi di Asia Timur.⁹⁴ Mengingat isu yang dibahas jauh lebih luas dari sekadar isu keamanan kawasan, kehadiran Rusia dalam EAS menjadi semakin penting mengingat luasnya kerjasama bilateral yang telah dibangun Rusia dengan sebagian besar negara di Asia Timur.

⁹² *ARF Annual Security Outlook 2011*.

⁹³ "East Asia Summit: World Model UN 2012", (Vancouver: Worldmun 2012) www.worldmun.org/upload/EAS.pdf diakses tanggal 8 Juni 2012.

⁹⁴ "Kuala Lumpur Declaration on the East Asia Summit", Kuala Lumpur, 14 Desember 2005, www.aseansec.org/18098.htm diakses tanggal 12 Februari 2012

Dampak kehadiran Rusia dalam EAS belum dapat diukur karena keterlibatan Rusia yang masih baru, yaitu sejak November 2011. Namun demikian, penilaian terhadap keterlibatan Rusia dalam EAS akan mengikuti pola yang sama dengan ARF. ARF dan EAS memiliki karakteristik institusional yang longgar. Pertemuan tahunan EAS bahkan hanya menghasilkan deklarasi bersama kepala negara mengenai perkembangan kawasan dalam berbagai bidang dan langkah strategis apa yang seharusnya diambil. Dengan luasnya isu bahasan dalam EAS, fungsi dan perannya akan banyak tumpang tindih dengan ARF, khususnya menyangkut isu-isu keamanan. Sementara itu, menyangkut isu ekonomi, kemiskinan, pertumbuhan kawasan, investasi, dan finansial, fungsi dan peran EAS akan banyak bersinggungan dengan APEC, WTO, dan G20.

ARF dan EAS memiliki beberapa fungsi sama yang seharusnya dapat dilebur untuk efisiensi. Namun demikian, sisi positif kehadiran ARF dan EAS di kawasan adalah kedua forum ini membuka pandangan negara di kawasan perihal isu-isu strategis, ancaman, tantangan, dan harapan ideal mengatasi berbagai persoalan di kawasan. Multilateralisme isu merupakan salah satu instrumen bagi pengekanan aktivitas kebijakan luar negeri negara yang relatif mengancam. Negara akan kehilangan kepercayaan di kawasan apabila gagal dalam proses *confidence building*. Kehilangan kepercayaan di kawasan berarti membuat negara terkucil dari komunitas kawasan. Hal inilah yang menjadi tantangan besar bagi Rusia yang terlibat secara aktif dalam kerangka kerjasama keamanan di kawasan Asia Timur. Rusia terus mencitrakan dirinya sebagai kekuatan baru yang tidak mengancam dan berkeinginan kuat untuk terlibat secara konstruktif menjaga stabilitas kawasan.

4.6 Rusia dan Distribusi *Power* di Asia Timur

Pelibatan Rusia dalam kerangka kerjasama keamanan di Asia Timur merupakan bentuk tindakan strategis ASEAN dalam merekonfigurasi *power* di kawasan. Rekonfigurasi *power* terjadi sebagai akibat dari dampak sistemik yang diberikan Cina setelah Perang Dingin. Besarnya kekuatan ekonomi Cina akan berkorelasi dengan peningkatan kekuatan militernya. Negara-negara di Asia Timur memandang perlu adanya upaya strategis untuk meredam potensi kebijakan

asertif Cina di kawasan. Menurut pemikiran realisme struktural, upaya yang mungkin dilakukan negara-negara di kawasan dalam hal meredam potensi kekuatan Cina adalah dengan melakukan tindakan *balancing* atau *bandwagoning*. Kedua tindakan tersebut dengan sendirinya akan menimbulkan dampak baru terhadap struktur sistem. Tindakan *balancing* yang dimaksud adalah pembentukan aliansi pertahanan oleh negara-negara di kawasan atau dengan cara mengundang *great power* di luar kawasan sebagai penyeimbang kekuatan Cina. Sedangkan tindakan *bandwagoning* akan berimplikasi pada dominasi Cina terhadap kawasan.

Negara-negara di kawasan Asia Timur yang tergabung dalam ASEAN memiliki peran penting dalam proses rekonfigurasi *power* setelah Perang Dingin. ASEAN merespon kemunculan Cina dengan melakukan tindakan *soft balancing* melalui mekanisme kerjasama keamanan kooperatif. Dalam kerangka berpikir realisme struktural, ASEAN tetap mempertahankan kehadiran AS di Asia Timur sebagai penyeimbang kekuatan Cina. Penyeimbangan ini tidak dilakukan dengan cara pembentukan aliansi pertahanan tetapi dengan cara membentuk kerjasama keamanan dialogis yang berusaha menyelesaikan isu-isu keamanan di kawasan melalui mekanisme konsensus. ARF merupakan forum kerjasama keamanan dialogis yang telah dirintis ASEAN sejak tahun 1994. Sebagai forum dialog keamanan konstruktif, ARF tidak dirancang sebagai aliansi pertahanan untuk menyeimbangkan kekuatan Cina dalam format *collective defense*. ASEAN berhasil merangkul negara-negara lain di luar kawasan, seperti AS, Rusia, Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Uni Eropa untuk terlibat dalam pembahasan isu-isu keamanan di kawasan Asia Timur.

Peran ASEAN sebagai aktor penentu rekonfigurasi *power* secara konstruktif sejak berakhirnya Perang Dingin menunjukkan keunikan struktur sistem di Asia Timur. Aktor utama dalam kerangka berpikir realisme struktural adalah negara. Negara merupakan aktor uniter yang memiliki fungsi sama dengan tujuan akhirnya mempertahankan eksistensi diri dalam sistem yang anarkis. Upaya mempertahankan eksistensi diri di kawasan Asia Timur tidak dilakukan oleh negara secara mandiri tetapi diambil alih ASEAN dengan cara multilateralisasi isu keamanan melalui dialog konstruktif. ASEAN bukanlah

aliansi pertahanan dengan sistem *collective defense* yang memiliki akumulasi kekuatan militer setara dengan Cina. Negara-negara anggota ASEAN pun tidak memiliki kekuatan militer relatif yang setara untuk mengimbangi Cina. Menyadari fakta tersebut, ASEAN berusaha menciptakan struktur keamanan kawasan melalui dialog keamanan konstruktif. Peran ASEAN ini bertentangan cara berpikir realisme struktural yang menuntut peran *great power* sebagai aktor penentu dalam struktur sistem. Dengan kata lain, ASEAN merupakan *middle power* yang mampu memberikan dampak sistemik dalam rekonfigurasi struktur keamanan di Asia Timur.

Tindakan ASEAN melibatkan Rusia dalam rekonfigurasi struktur keamanan bertujuan untuk menciptakan distribusi *power* yang setara di kawasan Asia Timur. Distribusi *power* kawasan Asia Timur pada masa Perang Dingin didominasi oleh AS dan Uni Soviet dengan karakter struktur bipolar. AS dan Uni Soviet membangun relasi *power* dengan negara-negara di Asia Timur secara bilateral. Setelah Perang Dingin berakhir, struktur sistem Asia Timur berubah menjadi multipolar yang ditandai dengan munculnya aktor-aktor baru yang berperan menentukan konfigurasi struktur keamanan. Multipolaritas sistem Asia Timur mensyaratkan proses distribusi *power* di antara aktor-aktor baru. Secara teoretis, distribusi *power* terjadi di antara *great power* dalam sebuah sistem dengan mengukur perbandingan kekuatan militer dan ekonomi relatif antar-*great power*. Distribusi *power* di kawasan Asia Timur tidak ditandai dengan persaingan antar-*great power* dalam bentuk persaingan dimensi politik, militer, dan ekonomi.

Peran ASEAN dalam proses rekonfigurasi struktur keamanan dengan tujuan distribusi *power* yang setara di kawasan Asia Timur lebih banyak ditentukan oleh faktor-faktor konstruktif menuju pembentukan sebuah komunitas. Pembentukan komunitas Asia Timur memerlukan komitmen dan keinginan politik negara-negara ASEAN. Pelibatan negara-negara lain yang secara geografis tidak berada di Asia Timur ke dalam ARF dan EAS merupakan bentuk pengaruh faktor konstruktif dalam pembentukan komunitas Asia Timur. ASEAN mengedepankan peran nilai dan norma dalam mengikat negara-negara ekstraregional ke dalam ARF dan EAS. Tujuan akhir yang ingin dicapai ASEAN dengan mengedepankan

nilai dan norma adalah terciptanya lingkungan kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera. Tujuan ini tidak akan tercapai apabila tidak ada peran dari negara-negara lain di luar ASEAN yang ikut bergabung dalam ARF dan EAS.

Pelibatan Rusia sebagai negara bekas *superpower* ke dalam ARF dan EAS dapat dilihat dari sudut pandang lain, yaitu keinginan Rusia untuk ikut berperan dalam penciptaan struktur sistem yang damai, stabil, dan sejahtera di Asia Timur. Keinginan Rusia untuk kembali hadir sebagai aktor signifikan di Asia Timur sejalan dengan program kebijakan luar negeri Rusia yang ditemukan dalam Konsep Kebijakan Luar Negeri Rusia tahun 1993, 2000, dan 2008. Rusia mempersepsikan dirinya sebagai aktor yang memiliki peran penting dalam penentuan stabilitas kawasan dan penciptaan tatanan struktur baru yang multipolar. Keinginan Rusia untuk kembali hadir di Asia Timur didukung oleh elemen *power* yang kembali diakumulasi Rusia sejak tahun 2000. Besar kecilnya pengaruh Rusia dalam sistem akan ditentukan oleh kemampuan Rusia menonjolkan elemen *political power*-nya dibanding militer dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan proses dialogis yang menonjol dari ARF dan EAS dalam membahas isu keamanan kawasan.

Pelibatan Rusia dalam kerangka kerjasama keamanan di Asia Timur ditentukan juga oleh multilateralisasi isu keamanan yang banyak menyangkut kepentingan nasional Rusia. Pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir, peredaran senjata ilegal, terorisme transnasional, kejahatan lintas batas, dan peredaran obat-obatan terlarang ilegal merupakan isu keamanan yang menjadi perhatian Rusia di Asia Timur.⁹⁵ Kehadiran Rusia dalam multilateralisasi isu keamanan Asia Timur menjelaskan proses distribusi *power* yang sedang berlangsung. Peran Rusia dengan sendirinya dapat menyeimbangkan peran *great power* lain di kawasan dalam hal pengaturan agenda dan proses penyelesaian isu keamanan. Multilateralisasi isu berarti tidak ada isu keamanan yang menjadi urusan internal sebuah negara meskipun negara memiliki kedaulatan dalam penyelesaiannya. Multilateralisasi isu keamanan sejalan dengan penciptaan

⁹⁵ ASEAN Regional Forum. *Annual Security Outlook 2004—2011*.

lingkungan sistem yang stabil. Stabilitas sistem merupakan syarat utama bagi berjalannya aktivitas ekonomi kawasan. Multilateralisasi isu keamanan merupakan bentuk keterkaitan dimensi aktivitas negara di kawasan.



BAB 5

KESIMPULAN

Penelitian ini menjelaskan alasan-alasan pelibatan Rusia ke dalam kerangka kerjasama keamanan di kawasan Asia Timur. Kerangka kerjasama keamanan di Asia Timur ditandai dengan peran ASEAN sebagai mediator bagi negara-negara pemilik kepentingan di Asia Timur. Model kerjasama yang dibangun berdasarkan prinsip dialog konstruktif dengan menentukan keputusan berdasarkan hasil konsensus. ASEAN berhasil menciptakan forum dialog keamanan *ASEAN Regional Forum* (ARF) tahun 1994 dan dialog strategis *East Asia Summit* (EAS) tahun 2005. Kedua forum ini dibuat dengan tujuan penciptaan stabilitas kawasan, pereduksian ketidakpastian dan tantangan setelah Perang Dingin, mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan ekonomi di Asia Timur.

Rusia sebagai bekas *superpower* yang pernah menanamkan pengaruh di Asia Timur dilibatkan ke dalam ARF dan EAS. Pelibatan ini mengandung kejanggalan berdasarkan kerangka berpikir neorealisme. Asia Timur digambarkan sebagai sistem regional dengan struktur multipolar. Multipolaritas ini ditandai dengan kemunculan Cina, Jepang, Korea Selatan, dan status quo AS sebagai stabilisator kawasan. Struktur multipolar menurut neorealisme relatif tidak stabil dibanding struktur bipolar. Pelibatan Rusia ke dalam Asia Timur dengan karakter struktur multipolar seharusnya membuat kawasan menjadi tidak stabil karena semakin banyak *great power*, semakin sulit mengatur distribusi *power*. Namun demikian, kawasan Asia Timur cenderung stabil sejak berakhirnya Perang Dingin meskipun terdapat lebih dari dua *great power* di dalamnya. ASEAN sebagai organisasi regional memegang peranan penting dalam penentuan stabilitas kawasan melalui proses pembentukan *confidence building* yang konstruktif dan berkelanjutan. ARF dan EAS merupakan bentuk institusionalisasi proses *confidence building* di Asia Timur.

Kehadiran Rusia di kawasan menegaskan statusnya sebagai *great power*. Hal ini didasari argumentasi Kenneth Waltz dan John Mearsheimer bahwa *great power-*

lah yang mampu menciptakan dampak sistemik terhadap struktur sistem. Penelitian ini menjelaskan mengapa Rusia dilibatkan ke dalam kerangka kerjasama keamanan kawasan Asia Timur meskipun negara ini secara geografis bukanlah bagian dari kawasan Asia Timur. Pelibatan Rusia dilihat dari empat faktor: kekuatan militer, kekuatan ekonomi, kekuatan politik, dan penerimaan kawasan terhadap Rusia sebagai kekuatan baru.

Pelibatan Rusia dalam kerangka kerjasama keamanan di Asia Timur merupakan bentuk tindakan strategis ASEAN dalam merekonfigurasi *power* di kawasan. Rekonfigurasi *power* terjadi sebagai akibat dari dampak sistemik yang diberikan Cina setelah Perang Dingin. Besarnya kekuatan ekonomi Cina akan berkorelasi dengan peningkatan kekuatan militernya. Negara-negara di Asia Timur memandang perlu adanya upaya strategis untuk meredam potensi kebijakan asertif Cina di kawasan. ASEAN merespon kemunculan Cina dengan melakukan tindakan *soft balancing* melalui mekanisme kerjasama keamanan kooperatif. Dalam kerangka berpikir realisme struktural, ASEAN tetap mempertahankan kehadiran AS di Asia Timur sebagai penyeimbang kekuatan Cina. Penyeimbangan ini tidak dilakukan dengan cara pembentukan aliansi pertahanan dengan format *collective defense* tetapi dengan cara membentuk kerjasama keamanan dialogis yang berusaha menyelesaikan isu-isu keamanan di kawasan melalui mekanisme konsensus.

Peran ASEAN sebagai aktor penentu rekonfigurasi *power* secara konstruktif sejak berakhirnya Perang Dingin menunjukkan keunikan struktur sistem di Asia Timur. Upaya mempertahankan eksistensi diri di kawasan Asia Timur tidak dilakukan oleh negara secara mandiri tetapi diambil alih ASEAN sebagai asosiasi negara sub-kawasan dengan cara multilateralisasi isu keamanan melalui dialog konstruktif. Peran ASEAN ini bertentangan cara berpikir realisme struktural yang menuntut peran *great power* sebagai aktor penentu dalam struktur sistem. Dengan kata lain, ASEAN merupakan *middle power* yang mampu memberikan dampak sistemik dalam rekonfigurasi struktur keamanan di Asia Timur.

Pelibatan Rusia ke dalam kerangka kerjasama keamanan di Asia Timur dapat dilihat dari sudut pandang lain selain penciptaan distribusi *power* yang setara. Pelibatan Rusia sejalan dengan keinginan Rusia untuk kembali hadir sebagai *great power* di Asia Timur yang tidak mengancam bagi kawasan. Keinginan Rusia dapat terlihat dari program kebijakan luar negerinya melalui dokumen Konsep Kebijakan Luar Negeri Federasi Rusia tahun 1993, 2000, dan 2008. Pelibatan Rusia bersinergi dengan multilateralisasi isu keamanan yang menyangkut kepentingan nasional Rusia. Multilateralisasi isu keamanan sejalan dengan penciptaan lingkungan sistem yang stabil. Stabilitas sistem merupakan syarat utama bagi berjalannya aktivitas ekonomi kawasan. Multilateralisasi isu keamanan merupakan bentuk keterkaitan dimensi aktivitas negara di kawasan.

Paradigma neorealisme memberikan penekanan analisisnya pada struktur sistem internasional sebagai faktor penjas, bukan negara dan bukan karakteristik makhluk sebagaimana ditekankan oleh realisme klasik. Pelibatan Rusia ke dalam kerangka kerjasama keamanan kawasan Asia Timur merupakan salah satu bentuk dampak sistemik yang muncul setelah Perang Dingin usai. Negara-negara kawasan melakukan rekonfigurasi struktur sistem kawasan dalam rangka menciptakan kembali *balance of power*. Rekonfigurasi struktur sistem melibatkan *great power* (AS, Rusia, Cina) dan *middle power* (ASEAN). Proses rekonfigurasi menjadi unik karena lebih banyak dimediasi oleh ASEAN sebagai *middle power*, bukan AS, Rusia, ataupun Cina. Dalam proses ini pelibatan Rusia dapat dijelaskan berdasarkan faktor kekuatan militer, ekonomi, politik, dan penerimaan Rusia sebagai kekuatan baru di kawasan.

Daftar Referensi

Buku dan Artikel

- Acharya, Amitav. "Regional Military-Security Cooperation in the Third World: A Conceptual Analysis of the Relevance and Limitations of ASEAN." *Journal of Peace research* Vol. 29, No. 1 (Feb. 1992) pp. 7—21.
- . *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order*. London: Routledge, 2001.
- Acharya, Amitav and Barry Buzan. *Non-western International Relations Theory: Perspectives on and beyond Asia*. New York: Routledge, 2010.
- Akopian, Regina. "The Great Powers and the Establishment of Security Regimes: The Formation of the Concert of Europe, 1792-1815." Disertasi Doktorat The State University of New Jersey, New Jersey, 2008.
- Alexandroff, Alan, Richard Rosecrance, and Arthur Stein. "History, Quantitative Analysis, and the Balance of Power". *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 21, No. 1, (Mar., 1977), pp. 35—56.
- Antolik, Michael. "The ASEAN Regional Forum: The Spirit of Constructive Engagement." *Contemporary Southeast Asia*. Vol. 16, No. 2 (September 1994), pp. 117—136.
- Aslund, Anders. *Russia's Capitalist Revolution: Why Market Reform Succeeded and Democracy Failed*. Washington DC: Peterson Institute for International Economics, 2007
- Aslund, Anders, Sergey Guriev, and Andrew Kuchins. eds. *Russia After the Global Economic Crisis*. Peterson Institute for International Economics, the Center for Strategic and International Studies, and the New Economic School, 2010.
- Bank of Finland Institute for Economies in Transition, BOFIT Russia Statistic, www.bof.fi/bofit_en/seuranta/venajatilastot/ 29 Mei 2012.
- Barbieri, Eliane Tschaen. "When Hegemons Arise: Explaining Balance of Power Failure in World History." Disertasi Doktorat Brandeis University, 2011.
- Betts, Richard K. "Wealth, Power and Instability: East Asia and the United States after the Cold War." *International Security*. Vol. 18, No. 3,(Winter 1993/4), pp.34—77.

- Beukel, Erik. "ASEAN and ARF in East Asia's Security Architecture: The Role of Norms and Power". *Danish Institute for International Studies Report*. Copenhagen: Danish Institute for International Studies, 2008: 4.
- Blank, Stephen and Richard Weitz. eds. *The Russian Military Today and Tomorrow: Essays in Memory of Mary Fitzgerald*. Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, 2010
- Boilard, Steve D. *Russia at the Twenty First Century*. Orlando: Harcourt Brace & Company, 1998.
- Brown, Archie and Lilia Shevtsova. (eds.). *Gorbachev, Yeltsin, and Putin Political Leadership in Russia's Transition*. Washington: Carnegie Endowment for International Peace, 2001.
- Butterfield, Herbert and Martin Wight (eds), *Diplomatic Investigations: Essays in the Theory of International Politics*, Massachusetts: Harvard University Press, 1966.
- Camilleri, Joseph A. *Regionalism in the Asia-Pacific Order*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing Inc., 2003.
- CIA, *The World Factbook*, www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs/html 25 Mei 2012.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. California: Sage Publications, Inc., 1994.
- Cronin, Bruce. *Community under Anarchy: Transnational Identity and the Evolution of Cooperation*. Columbia: Columbia University Press, 1999.
- de Haas, Marcel. "Russia's Military Reforms Victory after Twenty Years of Failure?" *Clingendael Papers*. No. 5. The Hague: Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael', 2011.
- Department of Defense United States of America, *Defense Budget Priorities and Choices*, January 2012.
- Department of Public Information Security Council. "Security Council Approves 'No-Fly Zone' over Libya, Authorizing 'All Necessary Measures' to Protect Civilians, by Vote of 10 in Favour with 5 Abstentions" <http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10200.doc.htm> 2 Juni 2012.
- East Asia Vision Group. "Towards an East Asian Community: Region of Peace, Prosperity and Progress," *East Asia Vision Group Report 2001*, www.mofa.go.jp/region/asia-paci/report2001.pdf 26 Maret 2012.

- Emmers, Ralf. "The Influence of the Balance of Power Factor within the ASEAN Regional Forum." *Contemporary Southeast Asia*. Vol. 23, No. 2 (August 2001), pp. 275—291.
- Evans, Gareth. "Australia, ASEAN, and the East Asian Hemisphere." Statement to the ASEAN PMC 7+1 Session, Bandar Seri Begawan, 2 August 1995. Diakses dari www.gevans.org 21 Mei 2012.
- Friedberg, Aaron. "Ripe for Rivalry: Prospects for Peace in a Multipolar Asia." *International Security*. Vol. 18, No. 3, (Winter 1993/4), pp.5—33.
- Goldgeier, James and Michael McFaul. "George W. Bush and Russia". *Current History*, edisi Oktober 2002.
- Gorenburg, Dmitry. "Russia's State Armaments Program 2020: Is the Third Time the Charm for Military Modernization?" *PONARS Eurasia Policy Memo*, No. 125, www.ponarseurasia.org 3 Juni 2012.
- Grama, Yulia. "The Analysis of Russian Oil and Gas Reserves". *International Journal of Energy Economics Policy*. Vol. 2, No. 2 (2012) pp.82—91. www.econjournals.com 3 Juni 2012.
- Haas, Ernst B. "The Balance of Power: Prescription, Concept, or Propaganda?" *World Politics*, Vol. 5, No. 4, (Jul., 1953), pp. 442—477.
- "The Balance of Power as a Guide to Policy-Making." *The Journal of Politics*, Vol. 15, No. 3, (Aug., 1953), pp. 370—398.
- Haas, Michael. "ASEAN's Pivotal Role in Asian-Pacific Regional Cooperation." *Global Governance*. Vol. 3, No. 3 (Sept.—Dec. 1997), pp.329—348.
- Healy, Brian and Arthur Stein. "The Balance of Power in International History." *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 17, No. 1 (Mar., 1973), pp. 33— 61.
- He, Kai. "Institutionalizing Security: Institutional Realism and Multilateral Institutions in Southeast Asia." Disertasi Doktoral Arizona State University, Arizona, 2007.
- Ikenberry, G. John and Michael Mastanduno (eds). *International Relations Theory and the Asia Pacific*. New York: Columbia University Press, 2003.
- Itoh, Shoichi. *Russia Looks East: Energy Markets and Geopolitics in Northeast Asia*. A Report of the CSIS Russia and Eurasia Program. Washington DC: CIS, 2011.

- International Institute for Strategic Studies. *The Military Balance 2004*. London: Routledge, 2004.
- . *The Military Balance 2007*. London: Routledge, 2007.
- . *The Military Balance 2009*. London: Routledge, 2009.
- . *The Military Balance 2010*. London: Routledge, 2010.
- . *The Military Balance 2011*. London: Routledge, 2011.
- Jack, Andrew. *Inside Putin' Russia*. London: Granata Books, 2004.
- Kaplan, Morton. *System and Process in International Politics*. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1957.
- Katzenstein, Peter J. *A World of Regions*. London: Cornell University Press, 2005.
- Kauppi, Mark. *International Relations Theory. 4th edition*. New York: Pearson Education, Inc., 2010.
- Kelley, Donald R. *Politics in Russia and Successor States*. Orlando: Harcourt Brace & Company, 1999.
- Kim, Jae Cheol. "Politics of Regionalism in East Asia: The Case of the East Asia Summit." *Asian Perspective*, Vol. 34, No. 3, 2010, pp. 113-136.
- Lee, Julian. "Russian Gas Export to China Move a (Small) Step Closer". Centre for Global Energy Studies,
<http://www.cges.co.uk/resources/articles/2010/10/01/russian-gas-exports-to-china-move-a-small-step-closer> 4 Juni 2012.
- Levy, Jack S. and William R. Thompson. "Balancing on Land and at Sea: Do States Ally against the Leading Global Power?" *International Security*, Vol. 35, No. 1 (Summer, 2010), pp. 7—43.
- Miller, Steven E. and Dmitri Trenin. *The Russian Military: Power and Policy*. Cambridge: The MIT Press, 2004.
- Ministry of Energy of the Russian Federation. *Energy Strategy of Russia for the Period up to 2030*. Moscow, 2010.
- Morada, Noel M. "ASEAN, Japan, and the United States in the ASEAN Regional Forum: A Constructivist Approach to the Study of an Emerging Multilateral Security Regime in the Asia Pacific." Disertasi Doktorat Northern Illinois University, Illinois, 2002.

- Morgenthau, Hans. *Politics among Nations 4th ed.* New York: Alfred Knopf, 1967.
- Mearsheimer, John. *The Tragedy of Great Power Politics.* New York: W.W. Norton, 2001.
- Nair, Deepak. "Regionalism in the Asia Pacific/East Asia: A Frustrated Regionalism?" *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 31, No. 1 (2008).
- Neumann, W. Lawrence. *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches 6th edition.* New York: Pearson Education Inc., 2006.
- Nichol, Jim. "Russian Military Reform and Defense Policy". Congressional Research Service Report for Congress, 2011.
- Niou, Emerson M.S. and Peter C. Ordeshook. "A Theory of the Balance of Power in International Systems." *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 30, No. 4, (Dec, 1986), pp. 685—715.
- Pallin, Carolina Vendil. *Russian Military Reform: A Failed Exercise in Defence Decision Making.* New York: Routledge, 2009.
- Paltsev, Sergey. "Russia's Natural Gas Export Potential up to 2050". MIT Center for Energy and Environmental Policy Research, July 2011.
- Parker, John W. "Russia and the Iranian Nuclear Program: Replay or Breakthrough?" *Strategic Perspective*. No. 9. Washington DC, Institute for National Strategic Studies.
- Prenger, Carsten. "State-Owned Enterprises in Russia". ICEF, Higher School of Economics, 2008.
- Paul, T. V., James J. Wirtz, and Michel Fortmann (eds). *Balance of Power Theory and Practice in the 21st Century.* California: Stanford University Press, 2004.
- Pempel, T. J. *Remapping East Asia: The Construction of Region.* New York: Cornell University Press, 2005.
- Pollard, A.F. "The Balance of Power." *Journal of the British Institute of International Affairs*, Vol. 2, No. 2, (Mar., 1923), pp. 51—64.
- Rangsimaporn, Paradorn. *Russia as an Aspiring Great Power in East Asia: Perceptions and Policies from Yeltsin to Putin.* New York: Palgrave Macmillan, 2009.

- Reiter, Dan. "Learning, Realism, and Alliances: The Weight of the Shadow of the Past." *World Politics*, Vol. 46, No.4 (July 1994), 502.
- Rojansky, Matthew and James F. Collins. "A Reset for the U.S.-Russia Values Gap". *Policy Outlook*. Carnegie Endowment for International Peace, November 2011.
- Ross, Robert S. "The Geography of Peace: East Asia in the Twentieth Century." *International Security*, Vol. 23, No. 4, (Spring, 1999), pp. 81—118.
- Sakwa, Richard. *Russian Politics and Society 4th ed.* New York: Routledge, 2008.
- Saradzhyan, Simon. "The Role of China in Russia's Military Thinking." *Russian Analytical Digest*. No. 78, 4 May 2010.
- Shambaugh, David and Michael Yahuda (eds). *The International Relations of Asia*. New York: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2008.
- Sheehan, Michael. *The Balance of Power: History and Theory*. London: Routledge, 1996.
- Soesastro, Hadi and Anthony Bergin. *The Role of Security and Economic Cooperation Structures in the Asia Pacific Region*. Jakarta: CSIS, 1996.
- Stiglitz, Joseph E. *Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-lembaga Keuangan Internasional*, terj. Ahmad Lukman. Jakarta: Ina Publikatama, 2003.
- Tang, Shiping. "A Systemic Theory of the Security Environment." *The Journal of Strategic Studies*. Vol. 27, No. 1, March 2004, pp. 1—24.
- The Economist*, edisi August 21st—27th 2010, October 2nd—8th 2010, dan December 4th—10th 2010.
- Thornton, Rod. "Military Modernization and the Russian Ground Forces." *Strategic Studies Institute Monograph*. 2001
- Toloraya, Georgy. "The Six-Party Talks: A Russian Perspective". *Asian Perspective*, Vol. 32, No. 4, (2008), pp.45—69.
- Tonnesson, Stein. "What Is It that Best Explain the East Asian Peace since 1979? A Call for Research Agenda." *Asian Perspective*. Vol. 33, No. 1, 2009, pp. 111—136.
- Walt, Stephen M. "Alliance Formation and the Balance of Power." *International Security*, Spring 1985, Vol. 9, No. 4.
- . *The Origins of Alliances*. New York: Cornell University Press, 1987.

Waltz, Kenneth N. "The Stability of Bipolar World." *Daedalus*, Vol. 93, No. 3 Summer, 1964, pp. 881—909.

------. *The Theory of International Relations*. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1979.

Weissmann, Mikael. *Understanding East Asian Peace Informal and Formal Conflict Prevention and Peacebuilding in the Taiwan Strait, the Korean Peninsula, and the South China Sea 1990-2008*. Goteborg: School of Global Studies Peace and Development Research University of Gothenburg, 2009.

White, Stephen. *Understanding Russian Politics*. New York: Cambridge University Press, 2011.

UNFPA. *The State of World Population 2011. People and Possibilities in a World of 7 Billion*. Diakses melalui situs www.unfpa.org 23 Mei 2012.

Weissmann, Mikael. *Understanding East Asian Peace Informal and Formal Conflict Prevention and Peacebuilding in the Taiwan Strait, the Korean Peninsula, and the South China Sea 1990-2008*. Goteborg: School of Global Studies Peace and Development Research University of Gothenburg, 2009.

White, Stephen, Richard Sakwa, and Henry E. Hale. *Developments in Russian Politics*. New York: Palgrave Macmillan, 2011.

Wulan, Alexandra Retno and Bantarto Bandoro. *ASEAN's Quest for a Full-Fledged Community*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Dokumen Non-Buku/Artikel

Annual Address to the federal Assembly of the Russian Federation, Moscow, Kremlin, July 8, 2000. <http://www.kremlin.ru> 24 September 2006.

ASEAN+3 Summit. "Final Report of the East Asia Study Group." Phnom Penh: Cambodia, 2002. www.aseansec.org 12 Februari 2012.

ASEAN Regional Forum. *Annual Security Outlook*. 2004.

ASEAN Regional Forum. *Annual Security Outlook*. 2005.

ASEAN Regional Forum. *Annual Security Outlook*. 2006.

ASEAN Regional Forum. *Annual Security Outlook*. 2007.

Universitas Indonesia

ASEAN Regional Forum. *Annual Security Outlook*. 2008.

ASEAN Regional Forum. *Annual Security Outlook*. 2009.

ASEAN Regional Forum. *Annual Security Outlook*. 2010.

ASEAN Regional Forum. *Annual Security Outlook*. 2011.

ASEAN Regional Forum. *Document Series 1994-2006*. Jakarta: The ASEAN Secretariat. 2007

“Chairman’s Statement. The First ASEAN Regional Forum.” Bangkok, Thailand, 25 July 1994. www.aseansec.org 12 Februari 2012.

“Chairman’s Statement of the 8th ASEAN + 3 Summit.” www.aseansec.org/16847.htm 12 Februari 2012.

“Joint Communique of the Twenty-Sixth ASEAN Ministerial Meeting”, Singapore, 23—24 July 1993. www.aseansec.org 12 Februari 2012.

“Kuala Lumpur Declaration on the East Asia Summit”, Kuala Lumpur, 14 Desember 2005 www.aseansec.org/18098.htm 12 Februari 2012.

“Russian Army Reform after the Vostok-2010 Military Exercise”, <http://en.rian.ru/analysis/20100709/159749435.html> 26 Mei 2012.

Berita Internet

“Chavez in 2 bn USD Russian Arms Deal”, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/8253822.stm> 2 Juni 2012.

“Medvedev’s Trip to Disputed Kuril Islands Sparks Russian-Japanese Diplomatic Row” <http://en.rian.ru/world/20101102/161178283.html> 2 Juni 2012

NATO-Russia Council, http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50091.htm 13 April 2012.

“Russia To Assign Trillions for Strategic Nuclear and Ground Forces” http://english.pravda.ru/russia/economics/21-07-2010/114313-strategic_nuclear_forces-0/ 2 Juni 2012.

“Russia’s Medvedev Arrives in Kuril Islands” <http://en.rian.ru/world/20101101/161158991.html> 2 Juni 2012.

Universitas Indonesia

“Russia Set to Build Up Its Naval Facilities in Tortus”,
<http://www.globalsecurity.org/military/library/news/2009/07/mil-090720-rianovosti03.htm> 4 Juni 2012.

“U.S. Concerned over Venezuela-Russia Arms Deal”,
<http://www.reuters.com/article/2009/09/15/us-usa-venezuela-arms-idUSTRE58E0TY20090915> 2 Juni 2012.

Situs Internet

www.aseansec.org

www.aseanregionalfroum.org

www.apec.org

www.sectsc.org

www.kremlin.ru

www.mil.ru

www.ers.usda.gov/data/macroeconomics/data/historicalrealgdpvalues.xls

www.taiwandocuments.org

www.citypopulation.de

www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

Russian Oil Destination. www.stratfor.com

Russian Federation Federal State Statistic Service, www.gks.ru 26 Mei 2012.